



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016



**BAGIAN ORGANISASI**  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep  
Tahun 2017

# KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***



Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahunan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang disesuaikan dengan sistematika Penyusunan dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketentuan dimaksud, memiliki dua fungsi yaitu :

**Pertama** : Disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan urusan serta sumber daya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;

**Kedua** : Merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai jaminan adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat serta sebagai informasi mengenai Penerapan Manajemen Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2016 terhadap Rencana Kerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan pada tahun pertama Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

Disamping itu, dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, tentu tidak lepas adanya kerja sama para stakeholders dan komitmen pihak yang terkait, yaitu Tim Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 serta Pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja serta pengukuran peningkatan kinerja dalam pelayanan publik bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk Akuntabilitas yang dipercayakan, serta diharapkan upaya perbaikan bersama secara berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sumenep “Super Mantap”. Keterkaitan dalam kerangka menjaga konsistensi dan sinergitas antara Visi dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan Nawacita Bapak Presiden RI termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep.

Sumenep,                      Maret 2017

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	Bab I/Hal. 1
A.    Latar Belakang .....	Bab I/Hal. 1
B.    Gambaran Umum Daerah .....	Bab I/Hal. 4
C.    Maksud dan Tujuan .....	Bab I/Hal. 109
D.    Isu-isa Strategis .....	Bab I/Hal. 109
E.    Metode Penyusunan .....	Bab I/Hal. 112
BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....	Bab 2/Hal. 113
A.,   Rencana Strategis .....	Bab 2/Hal. 113
B.    Rencana Kinerja Tahunan .....	Bab 2/Hal. 131
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	Bab III/Hal.143
A.    Capaian Kinerja Organisasi .....	Bab III/Hal.144
1.   Misi I .....	Bab III/Hal.145
2.   Misi II .....	Bab III/Hal.162
3.   Misi III .....	Bab III/Hal.186
4.   Misi IV .....	Bab III/Hal.216
5.   Misi V .....	Bab III/Hal.241
6.   Misi VI .....	Bab III/Hal.246
7.   Realisasi Anggaran .....	Bab III/Hal.248
BAB IV   PENUTUP .....	Bab IV/Hal.255
LAMPIRAN        :	
	- Perjanjian KinerjaTahun 2016
	- Matriks RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep 2016 – 2021
	- Pernyataan Telah Reviu Inspektorat



# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang dimaksud RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah baru dilantik.

Keterkaitan dalam kerangka menjaga konsistensi dan sinergitas antara Visi dalam RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dengan Nawacita Bapak Presiden RI termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep. Keterkaitan Visi Dan Misi Kepala Daerah Dengan Nawa Cita untuk mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam



rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Sistem akuntabilitas publik menjadi tanggung jawab Pemerintah karena merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjalankan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pedoman dimaksud, disusun dengan tujuan agar dapat dipakai sebagai bahan untuk membantu penyusunan sistem pengukuran kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat juga dapat mengetahui sejauh mana aparatur pemerintah mampu mengembangkan misinya. Hal ini diwajibkan bagi instansi penyelenggara pemerintahan guna mendorong tercapainya kemampuan mengelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan jawaban yang berisi penjelasan mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai media informasi untuk mengetahui sejauh mana peran Penyelenggara Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya di era otonomi daerah terhadap rencana dan kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan dalam program kegiatan kinerja tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merespon setiap kebijakan baru Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, sistematika penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada prinsipnya penyusunan laporan ini untuk memberikan ulasan informasi kinerja



yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditargetkan dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian terhadap kebijakan rencana tahunan 2016 yang ditargetkan dilakukan evaluasi pengukuran keberhasilan capaian kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja menggunakan metode skala ordinal, sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Yang tentunya dilakukan perbaikan melalui proses yang berkelanjutan dalam menajerial pemerintahan daerah.

Hal ini nantinya akan memberikan dampak adanya peningkatan kinerja disetiap tingkatan organisasi atas Penetapan Target Kinerjanya selama satu tahun berlangsung yang dilakukan secara konsisten dan integral tidak lepas dari Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Program Tahunan Pemerintah Daerah RKPD kemudian dituangkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai target Rencana Kerja yang ditetapkan sehingga mempermudah mengukur kinerjanya disetiap sasaran program /kegiatannya nantinya diharapkan mampu mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah, kondisi terakhir yang seharusnya terwujud sebagai upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.

## 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,47 km<sup>2</sup> (209.347 Ha) terbagi menjadi 27 Wilayah Kecamatan, 330 Desa, 4 Kelurahan, 1.547 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT) dengan komposisi penyebarannya terdiri dari 260 Desa dan 4 kelurahan di wilayah daratan dan 70 Desa di wilayah kepulauan, dengan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sumenep menurut Kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

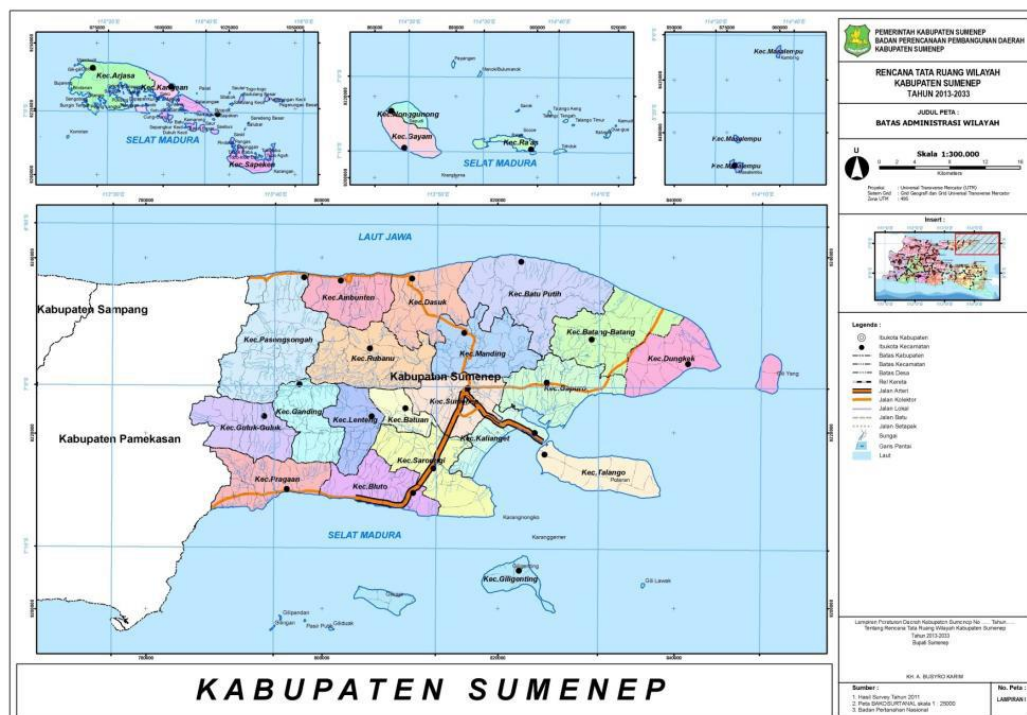
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km <sup>2</sup> )
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	16	40	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-Guluk	12	70	59,57



No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km <sup>2</sup> )
		Desa/Kel.	Dusun	
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batuputih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	48	201,89
<b>JUMLAH</b>		<b>334</b>	<b>1.547</b>	<b>2.093,47</b>

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep



Sumber : RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033

## 2. Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura yang terletak pada koordinat diantara 113o32'54" - 116o16'48" Bujur Timur dan diantara 4o55' - 7o24' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- *Sebelah Selatan* :Selat Madura



- *Sebelah Utara :Laut Jawa*
- *Sebelah Barat :Kabupaten Pamekasan*
- *Sebelah Timur :Laut Jawa dan Laut Flores*

Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua bagian wilayah yang terdiri dari :

- 1) Bagian Daratan dengan luas wilayah 1.146,93 Km<sup>2</sup> (54,79%) terbagi atas 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten.
- 2) Bagian Kepulauan dengan luas wilayah 946,54 Km<sup>2</sup> (45,21%) terbagi atas 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talango, Nonggunong, Gayam, Ra'as, Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Giligenting.

Berdasarkan gugus kepulauan, Kabupaten Sumenep memiliki 126 Pulau yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 Pulau) maupun tidak berpenghuni (78 Pulau), pulau yang terjauh di sebelah utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Kalimantan Selatan). Sedangkan Pulau yang paling Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau Sulawesi).

### **3. Topografi**

Keadaan topografi Kabupaten Sumenep pada umumnya tergolong daerah daratan rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya. Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter diatas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500-1000 meter diatas permukaan laut, sehingga ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu:



- 1) Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.
- 2) Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.
- 3) Sedangkan luas wilayah yang memiliki kemiringan > 60% berupa area pegunungan dengan luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48%.

#### **4. Topografi**

Keadaan topografi Kabupaten Sumenep pada umumnya tergolong daerah daratan rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya. Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut, sehingga ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.
- 2) Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.

Selain ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan. Wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,47 Km<sup>2</sup> (209.347 Ha), memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara lain:

- 1) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 0-30% luasnya sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%.



- 2) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 30-60% luasnya sekitar 437,39 Ha atau 21,02%, kawasan ini dapat dijumpai pada kawasan perbukitan.
- 3) Sedangkan luas wilayah yang memiliki kemiringan > 60% berupa area pegunungan dengan luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48%.

## 5. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur tanah yang ada di Kabupaten Sumenep sebagian besar terdiri dari jenis tanah alluvial, mediteran, grumosol dan regosol. Sedangkan ciri fisik tanah di Kabupaten Sumenep dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Alluvial Hodromorf dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Saronggi dan Batang-batang.
- 2) Alluvial Kelabu Kekuningan, dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Kota Sumenep dan Saronggi.
- 3) Jenis Tanah Litosol dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Guluk-guluk dan Lenteng.
- 4) Assosiasi Litosol dan Mediterian dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Bluto, Saronggi dan Talango.
- 5) Regusol Coklat Kekuningan jenis tanah ini terdapat di kecamatan Giligenting dan Gapura.
- 6) Complek Brown Fores Litosol dan Mediterian dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Pragaan, Ganding, Guluk-guluk, Saronggi, dan Ambunten.
- 7) Grumosol Kelabu, dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Ganding dan Kalianget.
- 8) Complek Mediterian Grumosol, Regusol dan Litosol dimana jenis tanah ini terdapat di kecamatan Batuputih dan Gapura.

## 6. Hidrologi

Potensi sungai di Kabupaten Sumenep tidak memiliki sungai besar yang ada hanyalah sungai-sungai kecil, antara lain Sungai Tambak Bukul, Sungai Saroka, Sungai Patrean, Sungai Ambat, Sungai Anjuk, Sungai Salagading, Sungai Bunlanjang, Kali Marengan yang bermuara di Selat Madura atau Laut Jawa.



Sungai terpanjang adalah Sungai Saroka dengan panjang sungai utama 45,897 km dan memiliki debit air terbesar, yaitu 143,25 m<sup>3</sup>/det.

## 7. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Sumenep umumnya beriklim panas dengan penyinaran matahari rata-rata dalam sebulan mencapai 79,28%. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan Oktober 2015 sebesar 99,8%. Sedangkan suhu udara maksimal pada tahun 2015 terjadi pada bulan Nopember sebesar 35,80C, suhu udara minimum terjadi pada bulan Pebruari 2015 sebesar 25,20C. Penguapan tertinggi terjadi pada bulan Nopember 2015 sebesar 6,2 mm dan penguapan terendah terjadi pada bulan April 2015 sebesar 3,2 mm. Kecepatan angin tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Januari sebesar 16 Knots atau 28,8 km/jam. Arah angin pada umumnya 42% berasal dari arah Barat Laut terjadi pada bulan Januari s/d April dan Desember 2015, berasal dari arah Timur sebesar 42% terjadi pada bulan Mei s/d Juli dan Nopember 2015. Sedangkan sisanya dari arah Tenggara sebesar 16% terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2015.

Tekanan udara rata-rata dari Januari s/d Nopember 2015 sebesar 1010,13 mb/bulan. Curah hujan terendah terjadi bulan Agustus s/d Nopember 2015 bahkan tidak ada sama sekali. Dengan demikian setiap tahun hampir semua daerah Kabupaten Sumenep mengalami musim kering yang agak panjang dari daerah lain.

## 8. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Sumenep seluas 209.347 Ha terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas penggunaan lahan terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Penggunaan Lahan Kabupaten Sumenep

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
<b>I</b>	<b>Lahan Pertanian</b>	<b>168.673,96</b>
<b>a.</b>	Lahan Sawah	25.681,96
	1. Irigasi teknis	4.650,44



No.	Penggunaan	Luas (Ha)
	2. Irigasi setengah teknis	1.837,95
	3. Irigasi sederhana	2.028,73
	4. Irigasi Desa	173,00
	5. Irigasi Tadah Hujan	16.991,84
<b>b.</b>	<b>Lahan pertanian bukan sawah</b>	<b>142.992,00</b>
	1. Tegal/kebun	117.341,00
	2. Ladang/Huma	2.388,00
	3. Sementara Tidak diusahakan	5.058,00
	4. Lainnya	18.205,00
<b>II</b>	<b>Lahan Bukan Pertanian</b>	<b>40.673,04</b>
	1. Rumah, bangunan dan hal sekitarnya	18.680,00
	2. Hutan Negara	21.207,00
	3. Rawa-rawa	48,00
	4. Lainnya	738,04
	<b>TOTAL</b>	<b>209.347,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep

Kondisi penggunaan lahan Kabupaten Sumenep didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah berupa tegal/kebun/ladang sebesar 142.992,00 Ha dan kemudian disusul dengan lahan bukan pertanian berupa permukiman, hutan negara, rawa dan rumah bangunan sebesar 40.673,04 Ha. Dari kondisi tersebut bahwa rata-rata penggunaan lahan pada wilayah ini sebagian besar belum terkelola dengan baik dimana tegalan dan ladang terlihat masih mendominasi dikarenakan untuk pemanfaatan lahan tersebut tergantung pada ketersediaan air atau masih tergantung pada kondisi musim tertentu.

Kawasan Lindung di Kabupaten Sumenep terdiri atas (1) Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Pulau Kangean Kecamatan Arjasa; (2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebar di Kabupaten Sumenep; (3) Kawasan Perlindungan Setempat; dan (4) Kawasan Sempadan Sungai.

Kawasan budidaya terdiri atas (1) Kawasan peruntukan hutan produksi tersebar di Pulau Kangean, Pulau Paliat, Pulau Sepanjang dan wilayah daratan Kabupaten Sumenep; (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di Kecamatan Dasuk, Batuputih, Guluk-Guluk, rubaru, Gapura, Saronggi, Pragaan Gayam dan Nonggunong; (3) Kawasan Pertanian; (4) Kawasan Perkebunan di Rubaru, Ganding, Lenteng; (5) kawasan perikanan berada di Pasongsongan, Bluto, Saronggi, Dungkek,



Batang-Batang, dan Kangean, (6) Kawasan Pertambangan Galian C di daerah Pasongsongan, Batuputih, Dasuk, dan Batang-Batang; (7) Kawasan Industri tersebar di Kabupaten Sumenep sesuai dengan potensi masing-masing wilayah; (8) Kawasan Pariwisata tersebar di Kabupaten Sumenep baik wisata budaya maupun wisata bahari.

### **1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten Sumenep dapat diidentifikasi wilayah untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti 1) Pertanian; 2) Peternakan; 3) Perkebunan; 4) Perikanan dan Kelautan; 5) Perindustrian dan Perdagangan; 6) Pertambangan dan Energi; 7) Pariwisata.

#### **1. Pertanian**

Berdasarkan peningkatan produksi hasil pertanian per tahunnya baik komoditas tanaman pangan maupun komoditas sayuran pada tahun 2011 - 2015 yang ditunjang juga oleh peningkatan luas areal pertanian, maka potensi pengembangan wilayah di bidang pertanian berdasarkan jumlah produksi komoditinya dapat dilihat secara terinci pada tabel 2.3 berikut ini.



Tabel 2.3  
Potensi Pertanian Tahun 2011-2015

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kuintal)					Luas Areal (Ha)					Wilayah Sentra Produksi
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>A</b>	<b>Tanaman Pangan</b>											
	Padi (gabah)	1.887.446,66	1.894.035,23	1.485.762,5	1.889.749,50	1.962.020,0	32.549	32.954	24.965	33.265	34.516	Arjasa, Gapura, Guluk-Guluk
	Jagung	4.314.633,4	4.328.518,4	3.826.407,71	3.976.005,8	4.183.860	152.826	144.175	141.041	139.934	143.753	Batuputih, Pasongsongan, Lenteng
	Kacang Tanah	105.375,8	73.448,11	64.688,57	841.97,3	59.607,6	6.408	4.546	4.672	5.346	4.042	Gapura, Dasuk, Nonggunong
	Kedelai	140.165,6	120.804,55	104.974,39	71.674,4	76.340,0	8.802	7.702	5.427	4.379	4.679	Guluk-Guluk, Ganding, Lenteng
	Kacang Hijau	213.717	144.195,1	109.286,23	128.453,3	160.661,6	13.281	8.894	7.327	8.678	11.514	Saronggi, Bluto, Lenteng
	Ubi Kayu	2.140.100,16	1.615.270,74	1.896.272,10	1.031.850,6	1.070.183,3	15.312	12.369	7.584	7.010	7.438	Saronggi, Dungkek, Manding
	Ubi Jalar	6.652,14	4.871,38	7.666,73	2.733,6	4.042,7	118	93	97	45	61	Lenteng, Arjasa, Gapura
<b>B</b>	<b>Sayuran</b>											
	Bawang Merah	9.015	16.355	25.369	15.947	26.017	122	198	334	235	372	Rubaru, Dasuk, Manding
	Cabe Merah	4.549	5.019	2.760	2.373	902	69	79	71	42	101	Rubaru, Gapura, Guluk-Guluk
	Cabe Rawit	61.094	65.076	50.138	42.848	12.496	1.026	95	1.255	777	1.333	Ambunten, Gayam, Nonggunong
	Ketimun	7.951	11.416	8.099	8.221	4.931	121	128	132	108	98	Arjasa, Rubaru, Gayam
	Tomat	3.345	3.965	3.067	4.130	1.383	39	59	44	44	45	Nonggunong, Manding, Batuan
	Terong	5.543	4.425	7.135	9.754	2.630	78	62	105	73	76	Batuan, Arjasa, Rubaru
	Kacang Panjang	5.370	5.370	4.873	4.795	1.420	153	130	143	113	140	Arjasa, Batuan, Manding

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015



## 2. Peternakan

Sektor peternakan cenderung fluktuatif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 untuk semua jenis ternak baik dari jumlah populasi dan produksi yang dihasilkan. Pada tahun 2015 jumlah populasi ternak mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2011, maka potensi pengembangan wilayah di bidang peternakan berdasarkan jumlah populasi jenis ternak dapat dilihat secara terinci pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4  
Potensi Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2012

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi		Produksi Daging (Kg)		Produksi Telur (Kg)		Wilayah Sentra Populasi
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	
<b>A</b>	<b>Ternak Besar</b>							
1	Sapi	357.038	360.862	2.661.361	2.689.865	-	-	Batuputih, Gayam, Batang-Batang
2	Kuda	2.122	2.120	-	-	-	-	Arjasa, Kangayan, Talango
3	Kerbau	5.189	5.187	-	-	-	-	Arjasa, Kangayan, Sapeken
<b>B</b>	<b>Ternak Kecil</b>							
1	Kambing	145.164	145.947	278.715	280.218	-	-	Gayam, Lenteng, Dungkek
2	Domba	37.411	37.628	65.469	65.849	-	-	Gayam, Nonggunong, Pragaan
3	Kelinci	2.422	2.593	-	-	-	-	Lenteng, Batuan, Manding
<b>C</b>	<b>Unggas</b>							
1	Ayam Buras	767.609	769.359	557.284	558.555	322.396	323.131	Lenteng, Nonggunong, Gayam
2	Ayam Ras Pedaging	328.440	331.475	249.941	273.467	-	-	Lenteng, Pragaan, Pasongsongan
3	Ayam Ras Petelur	302.959	306.625	-	-	1.963.174	1.986.930	Bluto, Saronggi, Ganding
4	Itik	55.254	55.415	45.584	45.685	258.588	259.160	Lenteng, Saronggi, Nonggunong
5	Itik Manila	12.015	12.066	9.943	9.947	20.041	20.111	Lenteng, Ambunten, Nonggunong

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2012



Potensi Peternakan Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2015

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi			Produksi Daging (Kg)			Produksi Telur (Kg)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>A</b>	<b>Ternak Besar</b>									
1	Sapi	345.095	349.081	353.124	2.572.338	2.602.050	2.632.186	-	-	-
2	Kuda	2.126	2.137		-	-	-	-	-	-
3	Kerbau	5.027	5.039	5.043	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Ternak Kecil</b>									
1	Kambing	146.835	147.735	148.683	281.923	283.651	285.471	-	-	-
2	Domba	37.838	38.083	38.414	66.217	66.645	67.225	-	-	-
3	Kelinci	2.824	2.954	3.357	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Unggas</b>									
1	Ayam Buras	771.569	773.734	776.742	560.159	561.731	563.915	324.059	324.968	326.232
2	Ayam Ras Pedaging	111.630	112.965	114.850	460.474	465.981	473.756	-	-	-
3	Ayam Ras Petelur	310.077	313.472	319.703	255.814	258.614	263.755	2.009.299	2.012.694	2.071.675
4	Itik	55.483	55.738	56.027	45.818	46.019	46.222	259.913	260.854	262.206
5	Itik Manila	12.118	12.217	12.290	9.997	10.079	10.139	20.213	20.378	20.500

Sumber : Dinas Peternakan dan BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Jika dilihat dari tabel diatas, untuk jenis ternak kecil (kambing, domba, kelinci) mengalami peningkatan dari jumlah populasi sebesar 184.997 ekor pada tahun 2011, naik menjadi sebesar 190.454 ekor pada tahun 2015. Untuk sapi dan kerbau cenderung mengalami penurunan dari jumlah populasi sebesar 362.227 ekor pada tahun 2011, menurun menjadi hanya menjadi 358.167 ekor pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenis unggas mengalami penurunan dari jumlah populasi 1.466.277 ekor pada Tahun 2011, turun menjadi 1.279.612 ekor pada tahun 2015.

Untuk sapi dan kerbau cenderung mengalami penurunan dari jumlah populasi sebesar 362.227 ekor pada tahun 2011, menurun menjadi hanya menjadi 358.167 ekor pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenis unggas mengalami penurunan dari jumlah populasi 1.466.277 ekor pada Tahun 2011, turun menjadi 1.279.612 ekor pada tahun 2015.



Untuk ternak sapi mengalami penurunan dari jumlah produksi daging sebesar 2.661.361 kg pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 2.632.186 kg pada tahun 2015. Jenis ternak kambing dan domba mengalami kenaikan dari jumlah produksi daging sebesar 344.184 kg pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 352.696 kg pada tahun 2015. Jenis ternak unggas mengalami peningkatan dari jumlah produksi daging sebesar 862.752 kg pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 1.357.787 kg pada tahun 2015. Jenis ternak unggas mengalami peningkatan dari jumlah produksi telur sebesar 2.564.199 kg pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.680.613 kg pada tahun 2015.

### 3. Perkebunan

Hasil produksi perkebunan Kabupaten Sumenep terdiri dari tembakau, jambu mente, cabe jamu dan kelapa. Hasil terbesar dari sektor perkebunan adalah dari hasil perkebunan kelapa. Berdasarkan jumlah produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Sumenep, maka potensi pengembangan wilayah di bidang perkebunan dapat dilihat secara terinci pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5  
Potensi Perkebunan di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2012

No	KOMODITI	LUAS LAHAN (Ha)		PRODUKSI (Ton)		PEMASARAN	WILAYAH SENTRA PRODUKSI
		2011	2012	2011	2012		
1	Tembakau	17.293,86	23.413,00	9.246,88	13.471,42	Pabrik Rokok Jawa dan Madura	Pasongsongan, Ganding, Guluk-guluk, Lenteng
2	Jambu Mente	9.595,91	9.652,62	3.097,02	3.469,37	Lokal, Surabaya	Dasuk, Rubaru, Batuputih
3	Cabe Jamu	2.379,35	2.398,89	8.336,59	8.671,22	Jawa	Bluto, Ganding, Lenteng
4	Kelapa	50.733,17	50.788,87	36.342,92	36.557,30	Surabaya, Lokal	Dungkek, Raas, Sapeken, Masalembu, Ganding

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2012



Potensi Perkebunan di Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2015

No	KOMODITI	LUAS LAHAN (Ha)			PRODUKSI (Ton)			PEMASARAN	WILAYAH SENTRA PRODUKSI
		2013	2014	2015	2013	2014	2015		
1	Tembakau	7.158,28	16.260,77	14.366,69	3.229,67	9.429,74	9.244,92	Pabrik Rokok Jawa dan Madura	Pasongsongan, Ganding, Guluk-guluk, Lenteng
2	Jambu Mente	10.097,63	10.897,63	10.912,63	3.469,76	4.430,48	4.974,31	Lokal, Surabaya	Dasuk, Rubaru, Batuputih
3	Cabe Jamu	2.451,89	2.501,89	2.517,39	8.671,58	9.468,71	9.868,69	Jawa	Bluto, Ganding, Lenteng
4	Kelapa	51.021,87	51.129,37	51.171,97	36.184,05	40.610,70	42.442,92	Surabaya, Lokal	Dungkek, Raas, Sapeken, Masalembu, Ganding

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Potensi hasil perkebunan kelapa dalam kurun waktu 5 tahun merupakan yang terbesar di Kabupaten Sumenep yaitu mencapai sebesar 36.342,92 Ton pada tahun 2011 dan meningkat hingga mencapai sebesar 42.442,92 Ton pada Tahun 2015. Sedangkan luas lahan produksi sebesar 50.733,17 Ha pada tahun 2011 dan 51.171,97 Ha pada tahun 2015 sehingga produktifitas produksi kelapa mencapai 1.235,35 Ton/Ha/tahun.

Potensi hasil perkebunan tembakau mencapai 9.246,88 Ton pada tahun 2011 dan menurun dengan produksi sebesar 9.244,92 Ton pada tahun 2015. Luas lahan produksi sebesar 17.293,86 Ha pada tahun 2011 dan 14.366,69 Ha pada tahun 2015. Potensi hasil perkebunan jambu mente mencapai 3.097,02 Ton pada tahun 2011 dan meningkat hingga sebesar 4.974,31 Ton pada tahun 2015. Luas lahan produksi sebesar 9.595,91 Ha pada tahun 2011 dan 10.912,63 Ha pada tahun 2015. Potensi hasil perkebunan cabe jamu mencapai 8.336,59 Ton pada tahun 2011 dan meningkat hingga mencapai 9.868,69 Ton pada Tahun 2015. Luas lahan produksi sebesar 2.379,35 Ha pada Tahun 2011 dan 2.517,39 Ha pada tahun 2015.

#### 4. Perikanan dan Kelautan

Dari letak geografis Kabupaten Sumenep dimana sebagian wilayah merupakan wilayah kepulauan dan laut sehingga



memiliki potensi yang cukup besar dari perikanan darat maupun perikanan laut, maka potensi pengembangan wilayah di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan jumlah produksi komoditasnya dapat dilihat secara terinci pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6  
Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No	KOMODITI	PRODUKSI (TON)					WILAYAH SENTRA PRODUKSI
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	Ikan Kerapu	2.015,19	1.956,40	1.968,90	1.991,90	69,27	Sapeken, Kangayan
2	Udang/Lobster	1.109,80	1.442,15	1.137,10	1.158,70	1.269,70	Arjasa, Kangayan, Sapeken, Masalembu, Raas, Gayam
3	Rumput Laut	575.490,01	578.200,05	569.651,41	583.697,05	562.122,90	Sapeken, Bluto, Saronggi, Talango, Dungkek
4	Bandeng	303,60	308,15	357,85	368,76	369,25	Kalianget, Saronggi
5	Kakap Merah	2.499,50	2.435,40	2.398,10	2.321,70	2.681,20	Arjasa, Kangayan, Sapeken, Masalembu, Raas, Gayam.
6	Udang Windu	96,80	98,74	99,42	97,12	80,69	Kalianget, Saronggi
7	Lele	103,85	112,44	124,72	131,71	66,99	Bluto, Kota, Saroggi, Pragaan, Lenteng, Kalianget

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Produksi rumput laut merupakan yang terbesar di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dengan produksi mencapai 575.490,01 Ton pada tahun 2011 dan meningkat hingga mencapai 562.123 Ton pada tahun 2015. Produksi terbesar kedua setelah rumput laut yaitu kakap merah mencapai 2.499,50 Ton pada tahun 2011 namun terus menurun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan hingga mencapai 2.681,20 Ton pada Tahun 2015.

Produksi kerapu juga menurun dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dengan produksi mencapai 2.015,19 Ton pada tahun 2011 terus menurun hingga mencapai 69,27 Ton pada tahun 2015.

Produksi udang/lobster mencapai 1.109,80 Ton pada tahun 2011 dan meningkat mencapai 1.269,70 Ton pada tahun 2015, sedangkan produksi udang windu mencapai 96,80 Ton pada tahun 2011 dan meningkat mencapai 80,16 Ton pada tahun 2015.



Tabel 2.7  
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

Komoditi		2011	2012	2013	2014	2015
A	Tangkap (ton)	44.494,80	44.697,70	45.798,65	46.737,84	46.739,50
B	Budidaya (ton)	535.787,40	551.103,43	571.027,42	585.121,21	600.792,99

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, 2015

## 5. Perindustrian dan Perdagangan

Potensi Sumber Daya Manusia dan kreativitas masyarakat Kabupaten Sumenep dapat dijadikan modal yang sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sehingga menjadi nilai jual yang optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya melalui pemberdayaan masyarakat di sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemberdayaan UKM berbasis sumber daya wilayah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Potensi pengembangan wilayah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan jumlah industri dapat dilihat secara terinci pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8  
Banyaknya Industri di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Jumlah Industri					Wilayah Sentra Industri
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1.	Industri Kecil	4.918	4.918	14.754	14.754	14.754	Dungkek, Batang-Batang, Pragaan
2.	Industri Besar dan Sedang	68	68	51	51	51	Saronggi, Pragaan, Bluto

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Industri kecil dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung meningkat atau bertambah jumlahnya, terdapat 4.918 unit industri kecil pada tahun 2011 dan terus bertambah hingga terdapat 14.754 unit industri kecil pada tahun 2015. Jumlah Industri Besar dan Sedang cenderung berkurang dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dengan jumlah 68 unit industri pada tahun



2011 dan terus berkurang hingga terdapat 51 unit industri pada tahun 2015.

Sedangkan perkembangan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sumenep berdasarkan jenis industrinya pada Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9  
Banyaknya Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Jumlah Tenaga Kerja					Wilayah Potensi
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Tenaga Kerja Industri Kecil	13.380	15.107	17.157	4.314	4.247	Dungkek, Batang-Batang, Pragaan
2.	Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang	5.799	7.758	9.660	13.017	12.972	Bluto, Batuan, Saronggi

## 6. Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan di Kabupaten Sumenep terdapat pertambangan mineral atau bahan galian non logam dimana potensi berdasarkan luas areal produksi dan hasil produksi yang telah dilakukan. Hasil produksi untuk bahan galian non logam masih dilakukan oleh masyarakat secara tradisional. Bahan mineral ini terdapat di wilayah daratan dan sebagian terdapat di wilayah kepulauan, sedangkan untuk Tambang Golongan A terdapat di wilayah kepulauan terutama di pulau Pagerungan Kecamatan Sapeken. Potensi pengembangan wilayah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan wilayah penghasil jenis pertambangan dapat dilihat secara terinci pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10  
Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumenep

PRODUKSI PERTAMBANGAN				
No	JENIS PERTAMBANGAN	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	LUAS AREAL (m2)	SENTRA PRODUKSI
1	Batu Gunung*	822.208	39.014.752,9	Batuputih, Lenteng
2	Pasir*	6.952	-	Dasuk, Batang-batang, Ambunten, Pasongsongan, Kalianget
3	Tanah Urug*	9.348	-	
4	Pasir Kerikil Batu*	63.672,4	-	
5	Pasir Kwarsa	-	41.242.847,96	Batuputih, Lenteng



PRODUKSI PERTAMBANGAN				
No	JENIS PERTAMBANGAN	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	LUAS AREAL (m <sup>2</sup> )	SENTRA PRODUKSI
6	Gypsum	-	76.500	Batuputih
7	Tanah Liat	-	19.303.101,27	Ganding, Raas, Gapura, Masalembu
8	Oker	-	11.993.502,2	Batuputih, Pragaan, Talango
9	Gamping/Dolomit*	6.952	78.029.505,69	Batuputih, Pragaan, Talango
10	Phospat	-	3.901.475,28	Pasongsongan, Lenteng, Bluto, Saronggi, Talango

PRODUKSI ENERGI			
No	JENIS ENERGI	JUMLAH PRODUKSI (MMBTU/Barel)	LOKASI
1	Gas Alam**	2.862.724,34	Sapeken
2	Minyak Bumi	-	Sapeken

Sumber : Kantor ESDM Kabupaten Sumenep, 2015

Keterangan :

\*Jumlah Produksi Komoditas berdasarkan Pajak Galian

\*\* Minyak Bumi tidak beroperasi (Shut Down)

- Berdasarkan Kumulatif Lifting Triwulan III/2014 (Periode Desember s/d Agustus 2014)

## 7. Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Sumenep meliputi kawasan wisata budaya, kawasan wisata alam, dan kawasan wisata buatan dan minat khusus.

- 1) Kawasan wisata budaya meliputi:
  - a. Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
  - b. Museum Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
  - c. Masjid Agung terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
  - d. Makam raja-raja Asta Tinggi dan Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
  - e. Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam;
  - f. Asta Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding.
  - g. Asta K. Abdullah terletak di Kecamatan Guluk-guluk;
  - h. Asta Gumuk terletak di Kecamatan Kalianget;
  - i. Asta K. Faqih/ Nyi Sitir dan Pemakaman Pekke terletak di Kecamatan Lenteng;



- j. Asta Jokotole terletak di Kecamatan Manding;
  - k. Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan Nonggunong;
  - l. Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan Saronggi;
  - m. Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak di Kecamatan Pasongsongan; dan
  - n. Asta Sayid Yusuf terletak di Kecamatan Talango.
- 2) Kawasan wisata alam meliputi :
- a. Pantai Lombang, rumah berkasur pasir, dan sumber air panas terletak di Kecamatan Batang-batang;
  - b. Pantai Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk;
  - c. Pantai Ponjug terletak di Kecamatan Talango;
  - d. Pantai Badur terletak di Kecamatan Batuputih;
  - e. Pantai Karamian, taman laut, dan terumbu karang terletak di Kecamatan Masalembu;
  - f. Sumber Air Kiermata Gua Mandalia terletak di Kecamatan Saronggi;
  - g. Sumber Air Belerang terletak di Kecamatan Pragaan;
  - h. Gua Kuning (Stalagtit), Gua Peteng, Gua Arca, sumber mata air batu karang, Pantai Batu Guluk, Pantai Mamburit (Wisata Bahari), terumbu karang, Taman Laut, Pulau Saobi terletak di Kecamatan Kangean;
  - i. Gua Tampeh terletak di Kecamatan Ganding;
  - j. Gua terletak di Kecamatan Nonggunong;
  - k. Wisata kesehatan di Pulau Gili Yang, Batu Tali terletak di Kecamatan Dungkek;
  - l. Batu Kodung terletak di Kecamatan Kalianget;
  - m. Gunung Pasir Panaongan, Sungai Grujugan terletak di Kecamatan Pasongsongan;
  - n. Taman Laut dan karang di Pulau Saor, Pantai Pasir Putih di Pulau Saor, taman laut, Pulau Sepanjang terletak di Kecamatan Sapeken; dan
  - o. Taman Laut Gililabak terletak di Kecamatan Talango.
- 3) Kawasan wisata buatan, wisata bahari dan minat khusus meliputi:



- a. Kolam renang meliputi:
  - (1) Kecamatan Kota Sumenep;
  - (2) Kecamatan Kalianget; dan
  - (3) Kecamatan Batuan.
- b. Wisata bahari meliputi:
  - (1) Kecamatan Kalianget;
  - (2) Kecamatan Talango;
  - (3) Kecamatan Batang-batang; dan
  - (4) Kecamatan Dasuk.
- c. Wisata minat khusus meliputi:
  - (1) Pembuatan Garam di Kecamatan Kalianget;
  - (2) Sentra Batik Tulis di Kecamatan Bluto;
  - (3) Pembuatan Ukiran di Kecamatan Pragaan, Kecamatan Kalianget;
  - (4) Pembuatan Keris di Kecamatan Saronggi.

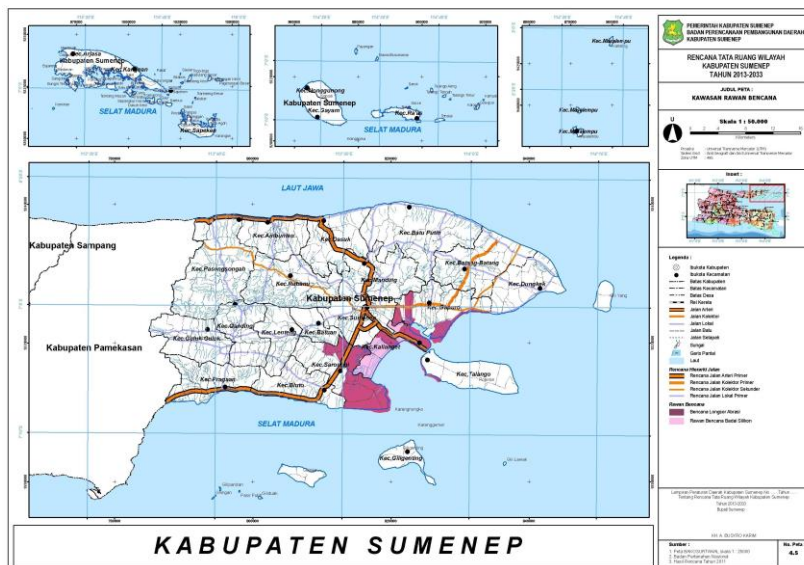
### **1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Sumenep berdasarkan potensi kejadian bencana terbagi atas :

1. Wilayah rawan longsor berada di wilayah Kecamatan Talango, Pasongsongan, Pragaan, Lenteng.
2. Wilayah rawan banjir meliputi wilayah Kecamatan Kalianget, Lenteng, Saronggi, Pragaan, Kota Sumenep.
3. Wilayah rawan bencana angin puyuh meliputi wilayah Kecamatan Kalianget, Bluto, Pragaan, Kota Sumenep, Kecamatan di wilayah kepulauan.
4. Wilayah rawan bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi Kecamatan Kalianget, Gapura, Ambunten, Dungkek, Batang-Batang, Pasongsongan, Kecamatan di wilayah kepulauan.



Gambar 2.2  
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Sumenep



Sumber : RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033

Jumlah kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor lainnya pada tahun 2014 mencapai 165 kali kejadian bencana dengan total kerugian mencapai Rp. 7.583.500.000,-. Kejadian terbanyak disebabkan oleh kejadian angin kencang/angin ribut/hujan deras sebanyak 108 kali dengan total kerugian sebesar Rp.1.797.000.000,-, sedangkan kejadian bencana dengan dampak kerugian material terbesar disebabkan oleh bencana kebakaran yang berlokasi di lingkungan Pasar Anom Sumenep dengan kerugian material sebesar Rp. 2.057.000.000,-. Jumlah kejadian dan dampak kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11  
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Sumenep

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Dampak Bencana	Estimasi Kerugian (Rp)
1	Banjir	5 Kali	303 Rumah 118,7 Ha 3 Bh jembatan	1.658.500.000
2	Longsor	6 Kali	4 Rumah 84 Ha 3 Korban Jiwa	625.000.000
3	Angin Puting Beliung	7 Kali	412 Rumah 4 Masjid 4 Mushalla 5 Org Luka	1.128.000.000



No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Dampak Bencana	Estimasi Kerugian (Rp)
4	Angin Kencang/Angin Ribut/ Hujan Deras	108 Kali	341 Rumah 1 Masjid	1.797.000.000
5	Kebakaran	30 Kali	25 rumah 1 Pasar 6 Org Luka	2.057.000.000
6	Sambaran Petir	6 Kali	2 Rumah 4 Korban Jiwa 4 Org Luka	13.000.000
7	Gelombang Pasang/Kecelakaan Laut	3 Kali	6 Perahu 44 Korban Jiwa 9 Org Luka	305.000.000

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumenep, 2015

Untukantisipasi dampak bencana dapat diminimalisir dengan deteksi dini bencana, melestarikan kawasan lindung, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam menangani masalah bencana secara optimal dimana masyarakat dilibatkan secara aktif didalam penanggulangan bencana secara dini dan ditunjang dengan peningkatan infrastruktur pendukung mitigasi bencana.

#### 1.1.4. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.072.113 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 509.791 jiwa (47,55%) dan perempuan 562.322 jiwa (52,55%) dengan sex ratio sebesar 90,65%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Sumenep menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :



Tabel 2.12  
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep 2015

Kecamatan District	Penduduk/Population		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Pragaan	33.382	35.793	69.175
020 Bluto	22.081	23.744	45.825
030 Saronggi	16.232	18.469	34.701
040 Giligenting	13.133	14.932	28.065
050 Talango	17.671	20.706	38.377
060 Kalianget	19.527	20.941	40.468
070 Kota Sumenep	35.946	38.420	74.366
071 Batuan	6.290	6.599	12.889
080 Lenteng	27.357	30.065	57.422
090 Ganding	17.467	18.968	36.435
100 Guluk-Guluk	24.893	27.082	51.975
110 Pasongsongan	20.994	22.695	43.689
120 Ambunten	17.810	20.303	38.113
130 Rubaru	17.446	19.422	36.868
140 Dasuk	14.506	15.740	30.246
150 Manding	13.587	14.836	28.423
160 Batuputih	20.317	22.524	42.841
170 Gapura	17.662	19.426	37.088
180 Batang Batang	24.880	27.604	52.484
190 Dungkek	16.823	19.476	36.299
200 Nonggunong	6.167	7.076	13.243
210 Gayam	15.136	17.305	32.441
220 Rias	17.974	19.351	37.325
230 Sapeken	22.493	23.838	46.331
240 Arjasa	29.208	34.015	63.223
241 Kangayan	10.266	11.398	21.664
250 Masalembu	10.543	11.594	22.137
<b>Jumlah/Total</b>	<b>509.791</b>	<b>562.322</b>	<b>1.072.113</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sumenep  
Source : Statistic of Sumenep Regency

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep sampai bulan Nopember 2015 mencapai 1.104.264 jiwa. Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Berikut tabel jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Sumenep.



Tabel 2.13  
Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 – 2015

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah	km <sup>2</sup>	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47
<b>Jumlah Penduduk :</b>						
- B P S	Jiwa	1.048.177	1.053.640	1.061.211	1.067.202	1.072.113
- Dispenduk & Capil	Jiwa	973.812	1.100.616	1.101.986	1.103.419	1.104.264
<b>Pertumbuhan penduduk:</b>						
- B P S	%	0,56	0,52	0,72	0,56	0,46
- Dispenduk & Capil	%	14,8	11,5	0,12	0,13	0,08
<b>Kepadatan penduduk :</b>						
- BPS	jiwa/km <sup>2</sup>	501	503	507	510	512
- Dispenduk & Capil	jiwa/km <sup>2</sup>	465	526	526	527	527

Sumber :BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Sumenep, 2015

Berdasarkan tabel diatas dan data dari BPS, dalam 5 (lima) tahun rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep sebesar 0,59% dengan prosentase atau laju pertumbuhan penduduk meningkat cukup fluktuatif dalam tiap tahunnya. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,56%, tahun 2012 sebesar 0,52%, tahun 2013 sebesar 0,72%, tahun 2014 sebesar 0,56% dan tahun 2015 sebesar 0,46%.

Adapun laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dari tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan dengan prosentasi laju pertumbuhan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk sebesar 14,8%, tahun 2012 sebesar 11,5%, tahun 2013 sebesar 0,12%, tahun 2014 sebesar 0,13% dan perhitungan sampai bulan Nopember 2015 sebesar 0,08%.

Aspek keagamaan menjadi indikator dinamika penduduk Kabupaten Sumenep. Secara umum mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep beragama Islam. Selanjutnya diikuti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain. Perkembangan jumlah pemeluk agama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun akan dirinci sebagai berikut :



Tabel 2.14  
Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Islam	Orang	1.043.971	1.050.643	1.058.808	1.065.333	1.065.333
2.	Kristen	Orang	1609	1.560	1.110	768	768
3.	Katolik	Orang	1303	929	729	938	938
4.	Hindu	Orang	741	161	101	31	31
5.	Budha	Orang	537	285	205	76	76
6.	Konghucu	Orang	16	62	258	41	41
7.	Lain-lain	Orang	-	-	-	15	15

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, 2015

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Sumenep beragama Islam dengan perincian data tahun 2015 untuk penduduk beragama Islam sejumlah 1.065.333 orang, penduduk beragama Katolik sejumlah 938 orang, penduduk beragama Kristen sejumlah 768 orang, penduduk beragama Budha sejumlah 76 orang, penduduk beragama Konghucu sejumlah 41 orang, penduduk beragama Hindhu sejumlah 31 orang, dan penganut agama lainnya sejumlah 15 orang.

## 1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhannya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Dengan demikian, perhitungan pertumbuhan ekonomi sudah tidak dipengaruhi oleh faktor harga atau dengan kata lain benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi sektor pendukungnya.



Tabel 2.15  
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 –2015

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,05	6,51	6,64	5,70	6,23

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Jika dilihat dari tabel diatas, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Terdapat peningkatan dari tahun 2011–2013 dengan angka pertumbuhan sebesar 6,05% pada tahun 2011, 6,51% pada tahun 2012, 6,64% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep menunjukkan tren negatif atau menurun pada angka 5,70%. Kondisi negatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep diawali kenaikan harga BBM dan terdepresiasinya nilai tukar rupiah pada dollar AS. Selanjutnya, kejadian bencana alam, kesulitan distribusi barang terutama pada wilayah kepulauan dimana kelancaran distribusi barang tergantung pada moda angkutan laut yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca juga menjadi pemicu melemahnya pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,23%, hal ini disebabkan usaha Pemerintah Kabupaten Sumenep berusaha mengambil serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Tingkat perekonomian suatu daerah dapat diketahui melalui penggunaan pendekatan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gambaran mengenai besaran produksi barang dan jasa, yang biasa disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung baik atas dasar harga berlaku (ADHB) menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu



sebagai tahun dasar perhitungan. Secara khusus, hasil dari perhitungan PDRB akan diperoleh Pendapatan Regional suatu wilayah. Jika Pendapatan Regional ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan perkapita yang dapat digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain. Adapun PDRB yang disajikan dengan harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu sedangkan apabila dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk per kapita.

Secara umum, aktifitas perekonomian di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir sehingga kinerja perekonomian Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan bergerak positif. Progresifitas Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB (ADHB) Kabupaten Sumenep tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16  
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Tahun 2011-2015

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.420,72	36,78	7.253,80	36,13	8.294,52	32,71	9.436,66	33,30	10.481,05	38,82
2	Pertambangan & Penggalian	4.670,26	26,75	5.644,48	28,11	8.982,80	35,42	9.907,56	34,99	6.525,85	24,17
3	Industri Pengolahan	863,27	4,95	942,30	4,69	1.061,85	4,19	1.200,44	4,24	1.337,16	4,95
4	Pengadaan Listrik & Gas	5,90	0,03	6,19	0,03	6,23	0,02	6,40	0,02	6,91	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8,48	0,05	9,20	0,05	10,10	0,04	10,50	0,04	11,12	0,04
6	Konstruksi	1.121,25	6,42	1.269,85	6,32	1.399,85	5,52	1.568,94	5,54	1.712,40	6,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.775,86	10,17	2.027,26	10,10	2.295,95	9,05	2.516,12	8,88	2.821,68	10,45
8	Transportasi dan Pergudangan	160,80	0,92	172,60	0,86	196,24	0,77	225,75	0,79	260,39	0,96
9	Penyediaan Akomodasi	102,08	0,58	112,98	0,56	126,03	0,50	141,58	0,50	158,88	0,59



NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	dan Makan Minum										
10	Informasi dan Komunikasi	712,70	4,08	821,60	4,09	929,84	3,67	1.048,30	3,70	3.171,65	11,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	266,66	1,53	317,34	1,58	375,69	1,48	426,87	1,51	486,63	1,80
12	Real Estate	158,82	0,91	174,10	0,87	196,68	0,78	216,60	0,76	238,82	0,88
13	Jasa Perusahaan	31,89	0,18	35,02	0,17	40,11	0,16	44,41	0,16	49,11	0,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,18	3,52	671,24	3,34	732,10	2,89	755,39	2,72	822,49	3,05
15	Jasa Pendidikan	371,85	2,13	437,54	2,18	506,82	2,00	575,99	2,03	655,21	2,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,13	0,30	59,67	0,30	68,30	0,27	78,17	0,28	88,42	0,33
17	Jasa lainnya	119,21	0,68	124,54	0,62	136,93	0,54	153,01	0,54	170,24	0,63
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>17.457,07</b>	<b>100</b>	<b>20.079,70</b>	<b>100</b>	<b>25.360,04</b>	<b>100</b>	<b>28.312,66</b>	<b>100</b>	<b>28.998,01</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Jika dilihat pada tabel diatas Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 17.457,07 milyar, sedangkan pada tahun 2015 mencapai Rp. 26.998,00 milyar Rupiah. Dari beberapa sektor dalam PDRB ADHB salah satunya yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam tahun 2011-2012 merupakan penyumbang tertinggi PDRB ADHB secara berurutan sebesar 36,78%; 36,13%. Akan tetapi pada tahun 2013-2014 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bukan lagi penyumbang PDRB tertinggi melainkan berubah ke sektor pertambangan dan penggalian dengan komposisi secara berurutan 35,42%; 34,99% dari total PDRB ADHB Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada tahun 2015, PDRB ADHB sektor pertambangan dan penggalian kembali menurun dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang PDRB ADHB tertinggi.



Progresifitas perkembangan struktur ekonomi PDRB (ADHK) Kabupaten Sumenep tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17  
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2015

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.041,03	37,63	6.308,81	35,71	6.681,01	32,86	6.886,80	32,06	7.184,42	33,03
2	Pertambangan & Penggalan	3.946,46	24,58	4.743,72	26,85	6.364,22	31,56	6.878,21	32,02	6.378,32	29,32
3	Industri Pengolahan	817,41	5,09	864,68	4,89	929,10	4,61	992,18	4,62	1058,78	4,87
4	Pengadaan Listrik & Gas	5,97	0,04	6,41	0,04	6,60	0,03	6,77	0,03	6,84	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8,39	0,05	8,92	0,05	9,49	0,05	9,75	0,05	9,97	0,05
6	Konstruksi	1.049,85	6,54	1.130,16	6,40	1.196,92	5,94	1.274,04	5,93	1.313,58	6,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.701,87	10,60	1.887,15	10,68	2.076,74	10,30	2.227,80	10,37	2.376,42	10,93
8	Transportasi dan Pergudangan	159,21	0,99	167,78	0,95	183,28	0,91	200,86	0,94	219,17	1,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,64	0,62	107,97	0,61	117,62	0,58	129,09	0,60	141,45	0,65
10	Informasi dan Komunikasi	698,58	4,29	795,89	4,51	896,59	4,45	1.008,51	4,70	1.084,81	4,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	251,24	1,56	285,84	1,62	324,09	1,61	354,32	1,65	383,96	1,77
12	Real Estate	151,87	0,95	163,41	0,93	176,18	0,87	191,26	0,89	206,23	0,95
13	Jasa Perusahaan	30,47	0,19	31,93	0,18	34,21	0,17	36,82	0,17	39,67	0,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	586,34	3,65	601,41	3,40	613,01	3,04	621,04	2,90	634,56	2,92
15	Jasa Pendidikan	351,03	2,19	386,16	2,19	420,83	2,09	457,54	2,13	496,38	2,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,76	0,32	55,88	0,32	61,20	0,30	66,54	0,31	72,37	0,33
17	Jasa lainnya	114,66	0,71	118,91	0,67	126,98	0,63	135,13	0,63	143,54	0,66
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>16.064,77</b>	<b>100</b>	<b>17.665,02</b>	<b>100</b>	<b>20.218,07</b>	<b>100</b>	<b>21.476,77</b>	<b>100</b>	<b>21.750,48</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2016

Pada tabel diatas terlihat PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan kenaikan yang positif selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2011 sebesar Rp. 16.064,77 milyar, tahun 2012 sebesar Rp. 17.665,02 milyar, tahun 2013 sebesar



Rp. 20.218,07 milyar, tahun 2014 sebesar Rp. 21.476,77 milyar, dan tahun 2015 sebesar Rp. 21.750,48 milyar. Progresifitas perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.18  
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB) dan (ADHK)  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB(ADH B)	Milyar Rp	17.457,07	20.079,70	25.360,04	28.312,66	28.998,01
2.	PDRB(ADH K)	Milyar Rp	16.064,77	17.665,02	20.218,07	21.476,77	21.750,48

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2016

Jika dilihat pada tabel diatas perkembangan PDRB (ADHB) Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan, pada tahun 2011 sebesar Rp.17.457,07 milyar sedangkan pada akhir tahun 2015 mencapai Rp.28.998,01 milyar. Sejalan dengan pertumbuhan PDRB (ADHB), PDRB (ADHK) juga mengalami kenaikan. PDRB (ADHK) Kabupaten Sumenep pada tahun 2011 sebesar Rp. 16.064,77 milyar sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 21.750,48 milyar.

### 3. Inflasi

Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen penting dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada 17 (tujuh belas) sektor dan laju inflasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.19  
Pertumbuhan Inflasi Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 –2015

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi	Persen	4,18	5,05	6,62	8,04	2,62

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2015

Laju inflasi Kabupaten Sumenep selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat dari tahun 2011 mencapai 4,18%, pada tahun 2012 mencapai 5,05%, pada tahun 2013 mencapai 6,62%, pada



tahun 2014 mencapai 8,04% dan pada tahun 2015 laju inflasi mengalami penurunan mencapai 2,62% akibat dari membaiknya kondisi perekonomian nasional sehingga harga barang cenderung stabil.

Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi pada tahun 2015 adalah kelompok bahan makanan sebesar 2,90%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,14%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,24%, kelompok kesehatan sebesar 0,03%.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2015 antara lain; kelompok sandang sebesar 0,33%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,15%, kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%.

#### **4. Disparitas**

Wilayah Kabupaten Sumenep yang terbagi atas kepulauan dan daratan membutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin pemerataan pembangunan. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah strategis dalam pembangunan Kabupaten Sumenep yang masalahnya didasarkan pada perbedaan yang cukup signifikan antara kemajuan antar daerah/wilayah baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan. Wilayah kepulauan selalu diidentikkan sebagai wilayah terisolir karena letak geografisnya jauh dari pusat pemerintahan daerah tertinggal karena keterbatasan prasarana dan sarananya seperti kondisi jalan dan alat transportasi yang menghambat aksesibilitas dan mobilitas sosial dan ekonomi serta jumlah penduduk miskinnya yang banyak menjadi sangat dominan. Disparitas kondisi ini memerlukan kebijakan perencanaan pembangunan yang sistematis, akseleratif dan berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kabupaten Sumenep di satu sisi telah menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita yang



cukup tinggi, namun apabila dilihat dari segi aspek regional atau daerah pembangunan yang dilaksanakan sebagian besar telah menyebabkan terjadinya perbedaan hasil pelaksanaan pembangunan ekonomi atau ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sumenep. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumenep ditinjau dari aspek pemerataan hasil pembangunan. Berikut ini tabel tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Tabel 2.20  
Tingkat Ketimpangan di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2010 -2015

Tahun	Tingkat Ketimpangan
2010	0,28
2011	0,26
2012	0,27
2013	0,27
2014	0,27
2015	0,27

Sumber :Diolah Bappeda Kabupaten Sumenep, 2015

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut diatas diukur dengan Indeks Williamson. Angka Indeks Williamson yang semakin kecil/rendah atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan pendapatan antar wilayah yang semakin kecil atau dengan kata lain pendapat semakin merata. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa Indeks Williamson Kabupaten Sumenep tahun 2010 sebesar 0,28 dan tahun 2011 sebesar 0,26. Pada tahun 2012-2015 Indeks Williamson Kabupaten Sumenep cenderung tetap pada angka 0,27. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sumenep tergolong cukup kecil atau cukup merata.

### 1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Indek Pembangunan Manusia

Secara rinci, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dalam Tabel berikut :



Tabel 2.21  
Perkembangan Tingkat IPM  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	IPM	Persen	58,70	60,08	60,84	61,43	62,66
2.	Indeks Pendidikan						
	- b Harapanlama Sekolah	Tahun	11,59	12,01	12,18	12,39	12,40
	- r Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,63	5,68	5,72	5,85	5,90
3.	Indeks Daya Beli						
	- D Pengeluaranper Kapita	Juta Rp/Th	6.524.000	6.834.000	7.093.000	7.143.000	7.549.910

ta Diolah, Bappeda Kabupaten Sumenep,2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di daerah dari 3 aspek yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan dan daya beli. Dimana Human Development Index (IPM) juga sebagai intrumen dari dimensi luas seperti dimensi doing and being : human capabilities yaitu : dimensi panjang usia : kesehatan, gizi dan lingkungan alam dan sosial; pengetahuan, dan standar hidup layak (a decent standard of living) yang disederhanakan menjadi pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perlu di ketahui pada akhir tahun 2015 perhitungan Index Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan metode baru yaitu dengan tahun dasar 2010. Semula perhitungan IPM untuk aspek pendidikan menggunakan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu komponen, saat ini AMH dipandang oleh PBB sudah kurang relevan karena AMH di sebagian negara/daerah sudah sangat tinggi sehingga dalam metode yang baru memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah (sebagai pengganti Angka Melek Huruf) sehingga bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Perubahan yang kedua adalah yang semula menggunakan formula rata-rata



arithmetik (rata-rata hitung) dalam perhitungan IPM metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Hal ini dimaksudkan agar capaian yang rendah pada salah satu komponen tidak dapat ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi, sehingga berdasarkan perhitungan IPM metode baru (dikonversi) dapat digambarkan angka IPM Kabupaten Sumenep 5 (Lima) tahun terakhir sebagai berikut. Pada tahun 2011 berada pada level 58,70%, sedangkan tahun 2012 sebesar 60,08%, tahun 2013 sebesar 60,84%, tahun 2014 sebesar 61,43% dan tahun 2015 sebesar 62,66%.

## 2. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia setelah bidang pendidikan. Angka usia harapan hidup termasuk indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan indikator disamping penyumbang peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumenep. Adapun perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2011 – 2015 sebagaimana tabel 2.22.

Tabel 2.22  
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup  
Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,09	65,10	65,25	70,02	70,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2015

Tingkat keberhasilan dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Masyarakat, semakin besar angka harapan hidup masyarakat dapat dipastikan bahwa pelayanan kesehatan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan yang lebih baik. Pada tahun 2011 angka harapan hidup Kabupaten Sumenep mencapai 65,09 tahun, tahun 2012 mencapai 65,10 tahun,



tahun 2013 mencapai 65,25 tahun, tahun 2014 mencapai 70,02 tahun dan tahun 2015 mencapai 70,42

### 3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2011-2015 kenaikannya baru mencapai 0,27% yakni dari 5,63 tahun 2011 menjadi 5,90 pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya prosentase penduduk yang hanya berijazah SD/MI atau yang sederajat yakni 21,60%, tamat dari tingkat SLTP sebesar 7,2 % dan SLTA sebesar 6,73%. Dengan demikian berpengaruh kepada rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sumenep setingkat dengan lulusan SD/MI yaitu 5,63. Secara rinci perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel 2.23.

Tabel 2.23  
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah  
Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,63	5,68	5,72	5,85	5,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2015

### 4. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak



bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	23,10	21,87	21,29	20,48	19,68
2.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu (Jiwa)	242,128.89	230,431.07	225,931.82	218,562.97	210,991.84

Sumber: Data Diolah, Bappeda Kabupaten Sumenep,2015

Dari data diatas dapat kita lihat prosentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep cenderung fluktuatif yaitu berada pada level 23,10% di tahun 2011, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang bersifat administrative price seperti adanya kenaikan harga BBM, TDL, LPG yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak kepada meningkatnya masyarakat miskin. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sumenep terus melakukan upaya untuk dapat menekan jumlah rumah tangga miskin melalui intervensi program kegiatan lintas Perangkat Daerah, baik melalui penyediaan sarana infrastruktur penunjang, bantuan kegiatan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.



## 5. Pengangguran

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.25  
Perkembangan Pengangguran  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,80	3,71	3,61	3,18	3,17

Sumber: Data Diolah, Bappeda Kabupaten Sumenep,2015

Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami tren penurunan mulai dari tahun 2011 sebesar 3,80%, tahun 2012 sebesar 3,71%, tahun 2013 sebesar 3,61%, tahun 2014 mencapai 3,18%, dan pada tahun 2015 mencapai 3,17%, hal ini berarti Kebijakan dan program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi sudah dapat memberikan ruang lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Khusus untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, baik di pedesaan maupun perkotaan. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri harus menjadi fokus perhatian pula.

## 6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup bermakna. Harapan Pemerintah Angka Kematian Bayi ini dapat ditekan hingga menjadi 40 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (anak usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebanyak 49 bayi atau 3,41 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu sebanyak 62 bayi atau 3,88 bayi per 1000 kelahiran hidup.



Terjadi penurunan kematian bayi sebesar 20,96% di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

Pada tahun 2015 ini capaian kinerja kematian bayi tidak hanya untuk kematian neonatal tetapi juga bayi usia 1 tahun. Dari jumlah kematian bayi sebanyak 230, terdapat 188 (81,74%) merupakan kematian neonatal dan 42 (18,26%) kematian bayi. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Tahun 2011 – 2015 dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26  
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup  
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Kasus	Angka Kematian Bayi (AKB)
2011	153	10,24
2012	105	6,93
2013	59	3,73
2014	62	3,88
2015	49	3,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

## 7. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu yang diperoleh dengan perhitungan jumlah kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) nasional sesuai dengan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 sebanyak 10 kasus atau 48,71 per 100.000 kelahiran hidup. Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 7 kasus atau 63,71 per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan tahun 2014 kematian ibu tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 3 kasus (30%). Angka Kematian Ibu tersebut lebih baik dibandingkan angka nasional sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.27.



Tabel 2.27  
Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2011 – 2015

	Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH)		
	Jumlah Kelahiran Hidup(Kelahiran)	Kematian Ibu Melahirkan(Orang)	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 KH)
2011	14.949	13	86,97
2012	15.136	11	72,67
2013	15.289	9	58,87
2014	15.696	10	63,71
2015	15.594	7	48,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

### 9. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota untuk provinsi berdasarkan prevalansi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

- a. Rendah :dibawah 10 %
- b. Sedang :10 – 19 %
- c. Tinggi :20 – 29 %
- d. Sangat tinggi :30 %

Penurunan angka prosentase gizi buruk atau KEP (Kekurangan Energi Protein) menunjukkan tingkat perbaikan pelayanan di bidang kesehatan. Secara rinci perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Sumenep Tahun 2011–2015 (lihat tabel 2.28) mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan 2013 akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dan tahun 2015 diprediksi kembali menurun sebagaimana tabel 2.28.

Tabel 2.28  
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 – 2015

Uraian	Capaian Kinerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase balita dengan gizi buruk	0,34	4,98	4,61	3,08	2,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2015



### 1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 1.3.1. Fokus Urusan Wajib

##### 1. Pendidikan

Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan agar semua warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Capaian kinerja perluasan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.29  
Perkembangan Jumlah Lembaga, Jumlah Siswa dan Guru TK

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lembaga					
	TK/RA	407	370	370	380	362
2.	Siswa					
	TK/RA	6,173	14,510	14,510	14,625	13,522
3.	Guru					
	TK/RA	1,896	1,457	1,457	1,509	1,417

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Tabel 2.30  
Perkembangan Jumlah Lembaga, Jumlah Siswa dan Guru SD/SMP/MTs

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lembaga					
	SD/SMP / MTs / MI	780	764	764	767	772
2.	Siswa					
	SD/SMP / MTs / MI	91,717	88,319	88,319	86,445	84,005
3.	Guru					
	SD/SMP / MTs / MI	9,922	10,005	10,005	16,842	16,420

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Tabel 2.31  
Perkembangan Jumlah Lembaga, Jumlah Siswa dan Guru Pendidikan Menengah

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lembaga					
	SMA / MA / SMK	45	51	80	90	97
2.	Siswa					
	SMA / MA / SMK	13,916	15,861	17,788	18,584	18,576
3.	Guru					



No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	SMA / MA / SMK	1,304	1,459	1,951	2,173	2,140

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

### a. Angka Melek Huruf

Peningkatan prosentase Angka Melek Huruf atau penurunan buta aksara menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tingkat ketercapaiannya 78,64% pada tahun 2015 telah mencapai 78,98%. Hal ini menandakan bahwa penduduk kabupaten Sumenep yang masih belum terbebas dari buta aksara (latin) sebesar 21,02 % dari jumlah penduduk usia di atas 15 tahun. Perkembangan Angka Melek Huruf sebagaimana tabel 2.32.

Tabel 2.32  
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melek Huruf	78,64	79,94	78,50	78,83	78,98

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2015

Untuk jumlah penduduk di atas 15 tahun yang sudah terbebas dari buta aksara di Kabupaten Sumenep sebagaimana tersaji pada tabel 2.33.

Tabel 2.33  
Jumlah Penduduk Melek Huruf  
Tahun 2011 - 2015 di Kabupaten Sumenep

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	786.605	790.280	793.980	797.705	801.433

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep

### b. Angka Partisipasi Kasar

Secara umum Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya cukup tinggi termasuk



peningkatan sarana prasarana yang memadahi untuk menampung lulusan dari tiap tingkatan, namun dalam penyebarannya masih ada beberapa daerah atau kecamatan yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pencapaian peningkatan APK. Secara rinci perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel 2.34.

Tabel 2.34  
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PAUD	45,82	48,48	51,14	53,80	56,46
2.	SD/MI	117,95	104,38	100,06	117,06	118,07
3.	SMP/MTs	103,58	93,82	96,16	101,50	102,35
4.	SMA/MA/SMK	97,19	112,18	80,98	95,96	97,75

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

### c. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah jumlah siswa sejak tahun pertama masuk sampai akhir tahun pelajaran di setiap tingkatan satuan pendidikan yang ditamatkan. Secara rinci perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Sumenep tahun 2011 - 2015 sebagaimana pada tabel 2.35.

Tabel 2.35  
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

No.	Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Angka Pendidikan yang ditamatkan :</b>						
1.	SD/MI	97,51	98,40	96,88	97,56	98,65
2.	SMP/MTs	96,42	99,20	99,19	98,62	99,68
3.	SMA/MA	98,26	98,29	98,51	97,35	98,43



**Nilai Rata-Rata Ujian Nasional :**

1.	SD/MI	5.53	5.71	5.89	6.07	6.25
2.	SMP/MTs	5.87	5.99	6.11	6.23	6.35
3.	SMA/MA	6.33	6.41	6.49	6.57	6.65

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Tabel 2.36  
Perkembangan Angka Putus Sekolah  
Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	0,70	0,68	0,66	0,63	0,58
2.	SMP/MTs	0,71	0,69	0,65	0,61	0,57
3.	SMA/MA	0,74	0,72	0,69	0,67	0,62

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

**d. Angka Partisipasi Murni**

Secara umum Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah masuk pada tingkatan pendidikan sudah sesuai dengan usia sekolah yakni pendidikan SD/MI 7 - 12 tahun, SMP/MTs 13 - 15 tahun, SMA/MA/SMK 16-18 tahun. Secara rinci perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2015 sebagaimana pada tabel 2.37.

Tabel 2.37  
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

No	Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	99,50	98,87	96,34	99,21	99,30
2.	SMP/MTs	80,58	80,75	80,88	95,80	96,35
3.	SMA/MA/SMK	79,19	79,14	79,93	91,50	92,35

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep



## 2. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari salah satu indikator keberhasilannya, yaitu kualitas pelayanan yang terdiri dari 2 (Dua) aspek, yaitu sarana kesehatan dan sumber daya aparatur kesehatan. Dua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Pemerintah kabupaten juga senantiasa tanggap terhadap permasalahan yang ada sehingga mengutamakan pelayanan dan kedekatan terhadap masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sumenep memantapkan keberadaan puskesmas, revitalisasi posyandu serta pengembangan Badan Layanan Umum Kesehatan. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.38  
Perkembangan Sarana Kesehatan Tahun 2011-2015

No.	Jenis Fasilitas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2.	Rumah Sakit Bersalin	1	-	1	1	1
3.	Klinik Bersalin	1	1	1	1	1
4.	Puskesmas	30	30	30	30	30
5.	Puskesmas Pembantu	71	71	71	71	71
6.	Poli/BP	8	8	8	8	8
7.	Klinik/Praktek Dokter	104	104	103	102	102
8.	Poskesdes	332	332	187	332	332
9.	Posyandu	1285	1285	1476	1476	1476
10.	Puskesmas Keliling	30	30	30	27	27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai.



Tabel 2.39  
Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015

No.	Jenis Tenaga	Jumlah	Rasio per 100.000 penduduk	Target IIS per 100.000 penduduk
1.	Dokter Umum	106	14,62	14,62
2.	Dokter Spesialis	9	9,37	9,37
3.	Dokter Gigi	29	4,40	4,40
4.	Farmasi	39	7,78	7,78
5.	Bidan	255	51,16	51,16
6.	Perawat	483	73,84	73,84
7.	Ahli Gizi	42	3,28	3,28
8.	Sanitasi	17	6,47	6,47
9.	Kesehatan Masyarakat	9	4,12	4,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep selama periode 2011-2015 telah melaksanakan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Perkembangan panjang dan kondisi jalan dan jembatan Kabupaten Sumenep sebagaimana Tabel berikut :



Tabel 2.40  
Perkembangan Jalan Di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 – 2015

NAMA	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015 *
<b>I. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas</b>						
1). Jalan Nasional	m	48,506	48,506	48,506	48,506	48,506
2). Jalan Propensi	m	61,120	61,120	61,120	61,120	61,120
3). Jalan Kabupaten / Kota	m	1,520,394	1,534,146	1,554,826	1,554,826	1,466,749
4). Jalan Desa / Lokal	m	109,506	95,754	95,754	95,754	75,611
5). Jalan Tol	m					
<b>II. Kondisi Jalan</b>						
1). Aspal ( Penetrasi )	m	1,445,150	1,336,795	1,243,826	1,259,580	1,042,159
2). Berbatu	m	74,798	55,000	55,000	55,000	34,578
3). Hotmix ( Aspal Beton )	m		142,351	256,000	256,000	435,865
4). Cor Beton	m					15,555
5). Kerikil	m	73,047	65,304	65,304	55,250	
6). Tanah	m	36,905	30,450	30,450	24,750	14,203
7). Lainnya						
<b>III. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Total Kabupaten)</b>		<b>1,519,774</b>	<b>1,520,394</b>	<b>1,534,146</b>	<b>1,554,826</b>	<b>1,542,360</b>
<b>Wilayah Daratan</b>		<b>987,853</b>	<b>988,256</b>	<b>997,195</b>	<b>1,010,637</b>	<b>990,088</b>
1). Jalan Baik	m	873,788	529,425	551,837	609,037	569,412
2). Jalan Sedang	m	21,437	74,120	119,438	119,438	175,747
3). Jalan Rusak Sedang	m	52,972	244,121	204,913	167,635	-
4). Jalan Rusak Berat	m	39,657	140,591	121,008	114,528	244,929
<b>Wilayah Kepulauan</b>		<b>531,921</b>	<b>532,138</b>	<b>536,951</b>	<b>544,189</b>	<b>552,272</b>
1). Jalan Baik	m	416,439	305,438	297,143	327,943	306,606
2). Jalan Sedang	m	11,543	39,911	64,313	64,313	94,633
3). Jalan Rusak Sedang	m	28,523	81,450	60,338	45,265	-
4). Jalan Rusak Berat	m	75,415	105,340	115,158	106,669	151,033

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep

Tabel 2.41  
Perkembangan Jembatan Di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 – 2015

NAMA	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015 *
<b>I. Jembatan (Total Kabupaten)</b>						
1). Panjang	m	1,984	1,959	2,009	2,009	2,209
2). Jumlah	buah	256	261	266	270	207
<b>Wilayah Daratan</b>						
1). Panjang	m	1,488.29	1,469.54	1,507.04	1,507.04	1,657.04
2). Jumlah	buah	220	225	229	232	178
<b>Wilayah Kepulauan</b>						
1). Panjang	m	496.10	489.85	502.35	502.35	552.35
2). Jumlah	buah	36	36	37	38	29

Sumber: Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep

Sampai dengan tahun 2015 panjang jalan yang terbangun 1.542.360 m, baik di daratan (990.088 m) maupun kepulauan (552.272 m). Total panjang jalan di wilayah daratan 68,04 % dalam kondisi baik, sedangkan di kepulauan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 50,20%.

Sampai dengan tahun 2015 panjang jembatan yang terbangun 2.209 m, baik di daratan (1.657,04 m) maupun kepulauan (552,35 m). Total



panjang jembatan di wilayah daratan 84,83 % dalam kondisi baik, sedangkan di kepulauan panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 79,31%.

Tabel 2.42  
Perkembangan Kondisi Sumber Daya Air Di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	10,92 m/Ha	11,07 m/Ha	11,23 m/Ha	13,51 m/Ha	13,81 m/Ha
2.	Luas irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (ha)	5.126	5.191	5.325	5.470	5.615
3.	Luas Wilayah Kebanjiran	1.04%	0.86%	0.69%	0.51%	0.33%
4.	Persentase Perlindungan terhadap Abrasi Pantai	1.50%	1.75%	2.25%	2.75%	3.25%

Sumber: Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sumenep

Sampai dengan tahun 2015 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 13,81 m/Ha, mengalami peningkatan sebesar 2,89 m/Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 5.615 Ha.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi genangan/banjir pada wilayah pertanian mengalami peningkatan dengan berkurangnya luas wilayah banjir dari tahun ke tahun menjadi 0,33 % pada Tahun 2015. Demikian pula perlindungan terhadap abrasi pantai dilakukan setiap tahun meningkat menjadi 3,25 % pada tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan dan RTH privat sebesar 10%. Sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Sumenep memiliki RTH publik sebesar 5,15 %. Kawasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kabupaten Sumenep antara lain : Taman Adipura alun-alun perkotaan, Hutan Kota Kebonagung, Stadion A. Yani, Stadion Giling, Taman Sare, RTH taman batas kabupaten, RTH perkotaan kecamatan, RTH jalur hijau dalam kota, RTH fungsi tertentu makam raja-raja Asta Tinggi, Taman Makam Pahlawan.

Secara terperinci capaian target dan realisasi luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.43  
Target dan Realisasi Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Target	24%	22%	23%	24%	25%
2.	Realisasi	23%	21%	21%	20%	5,15%

Sumber Data: Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sumenep

Salah satu kegiatan pembangunan penataan ruangan adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka pemanfaatan pengawasan ruang. Dari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2016 Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memberikan izin mendirikan bangunan kepada 1.450 bangunan yang telah memenuhi persyaratan.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana, rumah layak huni, pemenuhan air bersih, sistem drainase pengolahan limbah dan permukiman.

Sampai dengan tahun 2015 Prosentase Rumah Tangga pengguna air bersih sebesar 67%, Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik sebesar 70%, prosentase jalan lingkungan (kota/desa) dalam kondisi baik 368.780 m<sup>2</sup>, prosentase rumah layak huni sebesar 20%, jumlah tersedianya MCK/MWK sebagai penunjang tempat ibadah sebanyak 277 unit, prosentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 50%, dan cakupan trotoar kawasan perkotaan 32.651 m<sup>2</sup>.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada tahun dasar yaitu tahun 2010 sebanyak 199.540 KK dengan target 49.885 KK dan sampai dengan tahun 2015 dapat terealisasi sebanyak 42.424 KK atau 65%. Dengan kata lain masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang masih belum tertangani.



## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumenep bergantung pada situasi yang aman, tertib dan tentram. Oleh karena itu, pembangunan kesatuan bangsa dan sosial politik di era reformasi mengarah pada penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban melalui penataan instrumen sosial masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan mampu menyerap aspirasi sosial politik masyarakat sehingga dapat meredam konflik dan gejolak sosial politik di masyarakat. Perkembangan jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Tahun 2011-2015 di Kabupaten Sumenep dapat disajikan pada tabelberikut :

Tabel 2.44  
Perkembangan Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan) Tahun 2011-2015 di Kabupaten Sumenep

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pelanggaran K3	67	45	n.a	125	134
2.	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	55	38	n.a	86	72

Sumber :SIPD Kabupaten Sumenep, 2015

Tabel 2.45  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Prosentase Penegakan Perda	51.12	48.39	53.73	83.58	85.35
2.	Cakupan patrol Petugas Satpol PP	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.00 penduduk	0.54	0.51	0.85	1.13	1.13

Sumber :Satpol PP Kabupaten Sumenep



## 6. Sosial

Masalah sosial yang mengiringi dinamika masyarakat di Kabupaten Sumenep antara lain kecacatan dan rendahnya aksesibilitas bagi penyandang cacat, ketunasan, keterlantaran, dan ketidaktuntasan dalam penanganan korban bencana alam. Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengambil kebijakan strategis untuk penanganan masalah-masalah sosial yang ada. Kebijakan sosial yang digulirkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mengurangi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilakukan melalui pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial. Berikut data jumlah penduduk rawan sosial di Kabupaten Sumenep.

Tabel 2.46  
Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial  
Tahun 2011 -2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Keluarga Fakir Miskin	Jiwa	42.751	53.083	110.048	67.917	66.405
2.	Balita Terlantar	Jiwa	422	239	373	53	48
3.	Anak Terlantar	Jiwa	5.810	1.744	4.326	1.684	1.506
4.	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	3.987	7.007	15.625	5.969	5.866
5.	Gelandangan	Jiwa	0	0	0	0	0
6.	Komunitas Adat Terpencil	Jiwa	2.151	132	413	210	152
7.	Penyandang Cacat	Jiwa	5.448	3.444	5.314	3.686	3.325
8.	Korban Bencana Alam	Jiwa	0	0	0	0	0
9.	Korban lain	Jiwa	0	0	0	0	0
10.	Pengemis	Jiwa	202	259	314	259	235

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa selama periode Tahun 2011-2015 perkembangan jumlah penduduk



rawan sosial di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2015 fakir miskin sejumlah 66.405 jiwa, balita terlantar sejumlah 48 jiwa, anak terlantar sejumlah 1.506 jiwa, lanjut usia terlantar sejumlah 5.866 jiwa, komunitas adat terpencil sejumlah 152 jiwa, penyandang cacat sejumlah 3.325 jiwa, pengemis sejumlah 235 jiwa, dan tidak terdapat gelandangan serta korban bencana alam.

## 7. Ketenagakerjaan

Pembangunan di sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep dititikberatkan pada pengembangan sistem ketenagakerjaan secara terpadu dan terarah dalam rangka peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja agar mampu bersaing, sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep selama kurun waktu 2010-2014, dapat diketahui dari tabel dibawah berikut :

Tabel 2.47  
Kondisi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Angkatan kerja (15-60 tahun)	455.151	443.854	624.294	622.460	626.640
2.	Jumlah Penduduk bekerja	411.158	400.976	457.741	486.248	606.520
3.	Jumlah pengangguran terbuka	23.712	22.875	23.618	20.791	19.961
4.	Jumlah pengangguran terbuka (TPT) %	2,1	2,5	3,61	3,18	3,17
5.	Jumlah pencari kerja	43.993	42.877	38.894	40.762	19.871
6.	Pencari Kerja yang Terdaftar	2.518	1.648	1.677	1.246	1.105
7.	Rata-rata Upah Minimum (Rp.)	785.000	825.000	965.000	1.225.000	1.253.500

Sumber data : SIPD Dinas Tenaga Kerja, November 2015

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.



Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang tersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja yang dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48  
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2011- 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio penduduk yang bekerja	88,29	93,02	96,32	96,39	96,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk yang bekerja terjadi fluktuatif pada setiap tahunnya.

### 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup kaum perempuan yang ditempuh melalui kebijakan peningkatan kedudukan dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan dengan sasaran meningkatnya kedudukan, peranan dan kualitas perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Jumlah perempuan yang berperan secara aktif dalam dunia kerja baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta juga mengalami peningkatan per tahunnya. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat diketahui berdasarkan tabel dibawah berikut :

Tabel 2.49

Indikator Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2013	2014
1.	% Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66.79	73.56
2.	% Partisipasi perempuan di lembaga swasta	33.21	26.44
3.	Rasio KDRT	0.02	0.01
4.	Jumlah Kasus KDRT	61	34
5.	Kasus Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	42	34

Sumber data : BPMP dan KB, 2015

### 9. Pangan

Pangan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu dan keamanannya secara merata dan terjangkau oleh setiap individu. Untuk mewujudkan kondisi tersebut didukung oleh 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan dan sub sistem distribusi pangan.

Urusan pangan dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan Pangan yang melekat pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Capaian urusan ketahanan pangan dapat dilihat dalam tabel 2.50.

Tabel 2.50  
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan  
Tahun 2011-2015

Uraian	Capaian Kinerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan penduduk :					
a. Ketersediaan Beras	120.436	148.731	111.594	189.689	189.688



Uraian	Capaian Kinerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
b. Ketersediaan jagung	431.463	433.655	408.206	397.601	357.605
c. Ketersediaan Gula Pasir	-	-	-	-	-
d. Ketersediaan Telur	2.544	2.867	2.592	2.604	2.649
e. Ketersediaan Daging	4.129	4.219	2.699	4.272	4.306
f. Ketersediaan Ikan	17.130	14.148	23.803	23.161	22.612

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep

Dari capaian kinerja tersebut, secara umum masing-masing capaian kinerja mengalami perubahan setiap tahunnya. Selama periode tahun 2011 - 2015 rasio ketersediaan pangan. Dibandingkan dengan kebutuhan bahan pangan penduduk menunjukkan kenaikan. Namun kondisi lain terjadi pada ketersediaan beras yang menurun pada tahun 2015. Penurunan tersebut dikarenakan terjadi penurunan produksi padi di Kabupaten Sumenep yang berdampak langsung terhadap ketersediaan beras pada tahun tersebut. Pada tahun yang sama, ketersediaan telur mengalami perubahan dari tahun sebelumnya (2014). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan berupa telur, sehingga dapat dikatakan pemenuhan akan kebutuhan protein mengalami kenaikan.

Capaian kinerja peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap penyuluh salah satunya diukur dengan tersusunnya program penyuluhan. Program penyuluhan disusun per kecamatan sebagai pedoman bagi penyuluh pertanian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahunnya. Program penyuluhan kecamatan mengacu kepada program penyuluhan Kabupaten Sumenep. Salah satu indikator peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh didalam mengimplementasikan teknologi pertanian tepat guna kepada kelompok tani/gapoktan diwujudkan dalam bentuk penerapan



teknologi budidaya (kaji terap komoditas pertanian), sehingga inovasi teknologi pertanian dapat tersosialisasikan.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Sumenep bertanggung jawab terhadap tercapainya Ketahanan Pangan Daerah yang diukur dengan stabilitas harga dan pasokan pangan dan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selama periode tahun 2011-2015 rasio ketersediaan pangan dibandingkan dengan kebutuhan bahan pangan penduduk penunjukan kenaikan. Tahun 2015 mengalami surplus atau kelebihan ketersediaan beras sebesar 189.688 ton, Jagung sebesar 357.605 ton, Telur sebesar 2.649 ton, Daging sebesar 4.306 ton dan Ikan sebesar 22.612 ton.

## 10. Pertanahan

Perkembangan Pembangunan Bidang Pertanahan di Kabupaten Sumenep selama lima Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51  
Perkembangan Pembangunan Bidang Pertanahan  
Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kasus Tanah Negara Yang Terdaftar	Kasus	-	10	10	-	1
2.	Jumlah Kasus Tanah Negara Yang terselesaikan	Kasus	-	3	8	-	1
3.	Penyelesaian Kasus Tanah	%	-	30	80	-	100
4.	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	Buah	-	2	3	5	1
5.	Jumlah Izin Lokasi Yang Diterbitkan	Buah	-	2	3	5	1
6.	Penyelesaian Izin Lokasi	%	-	100	100	100	100

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep

Data banyaknya bidang dan luas tanah berdasarkan status kepemilikan menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep sampai dengan tahun 2014 sebesar : 250.587.603 Ha (106.003 bidang) dengan rincian sebagai berikut :



- a. Luas Lahan Hak Milik (HM) : 195.939.825 Ha (102.274 bidang)
- b. Luas Lahan Hak Pakai (HP) : 51.783.071 Ha (1.616 bidang)
- c. Luas Lahan Hak Bangunan (HGB) : 2.864.707 Ha (2.113 bidang)

### **11. Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini masih mengakibatkan kerugian bagi perikehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa manusia. Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan terus dilakukan tidak saja oleh pemerintah namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Mengingat parameter lingkungan yang cukup kompleks, maka IKLH merupakan alat yang sangat berguna dan sederhana namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. Pada saat ini masih difokuskan pada media lingkungan : air, udara dan lahan/hutan. IKLH dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat ditujukan lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yaitu merupakan ukuran capaian keberhasilan kualitas lingkungan hidup, dimana menghasilkan nilai sebesar 69,6%. Perkembangan penanganan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep selama kurun waktu Tahun 2011 – 2015 dapat diketahui pada tabel berikut :



Tabel 2.52  
Perkembangan Penanganan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2015

No.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa/Kelurahan dalam kriteria desa bersih	-	-	-	4	2	2
2.	Jumlah industri/perusahaan/badan usaha yang menyusun dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	22	39	45	63	129	52
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	69.6
4.	Jumlah Pengawas/ahli lingkungan yang terbentuk persatuan penduduk	-	-	1	-	-	-
5.	Luas Hutan Mangrove (Ha)	2.712	2.762	2.782	3.027	3.037	3.037

Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep

Pengukuran prosentase penanganan sampah di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Kalianget dan Batuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sampah yang tertangani sebesar 194 m<sup>3</sup>/hari. Perkembangan penanganan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep selama kurun waktu Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui pada tabel berikut :



Tabel 2.53  
Perkembangan Penanganan Sampah  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)/satuan penduduk	ltr/org/hr					
	a. Target		4.2	4.4	4.6	4.8	5
	b. Realisasi		4.2	4.4	4.6	4.8	5
	c. Capaian (%)		100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan Sampah	m <sup>3</sup> /hr					
	a. Target		176.5	181.5	186	191	198
	b. Realisasi		157	176	181.5	188	194
	c. Capaian (%)		88.95	96.97	97.58	98.43	97.98
3	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)/satuan penduduk	jiwa/pddk					
	a. Target		5225	4950	4675	4400	4125
	b. Realisasi		5225	4950	4675	4400	4125
	c. Capaian (%)		100	100	100	100	100

Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup Kab. Sumenep

## 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tantangan yang dihadapi adalah masih belum tertatanya administrasi kependudukan yang merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menyangkut data kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Oleh karenanya pemerintah daerah secara kontinyu melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang keluarannya adalah dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara atas status dan keperdataan/hak-hak sipil seseorang, serta data kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

## 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Derajat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Sumenep yang masih tinggi menjadikan upaya untuk meningkatkan



kesejahteraan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Masih banyaknya jumlah penduduk miskin ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, kemampuan daya beli dan pendapatan membawa pengaruh yang signifikan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep. Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat masyarakat di pedesaan yaitu melalui memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk penguatan Lembaga Pemberdayaan Desa/Kelurahan (LPMD/K), pembinaan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat di bidang otomotif dan pertukangan, serta pembinaan dan penguatan manajemen kelompok Pengelola Air Bersih (HIPPAM) dan kelompok Pengelola Irigasi (HIPPA) pedesaan.

Lembaga ekonomi pedesaan merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian secara mikro yang diharapkan nantinya akan memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan penguatan lembaga ekonomi pedesaan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan memberikan pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### **14. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana**

Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Sumenep dapat dilihat melalui peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Baru sebagaimana Tabel dibawah ini :



Tabel 2.54  
Perkembangan Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif  
di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pasangan Usia Subur (PUS)	250.257	251.928	246.328	250.093	249.365
2.	Peserta KB Aktif	187.473	182.425	161.201	168.993	154.533

Sumber :BPS Kabupaten Sumenep

### 15. Perhubungan

Perkembangan pembangunan perhubungan di Kabupaten Sumenep selama kurun waktu Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 2.55  
Perkembangan Pembangunan Perhubungan  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	Kondisi Kinerja sampai dengan Tahun :				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Perhubungan</b>						
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan					
	- Jumlah Pelabuhan/Dermaga	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	6 unit
	- Jumlah Tambatan Perahu	99 unit	102 unit	102 unit	102 unit	102 unit
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal					
	- Jumlah terminal angkutan umum	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
	- Jumlah Halte	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit	5 unit
4	Jumlah Uji Kir angkutan umum	5.678 kendaraan	5.923 kendaraan	5.906 kendaraan	6.056 kendaraan	6.521 kendaraan
5	Jumlah rambu yang terpasang	3587 unit	3689 unit	3813 unit	3921 unit	4.021 unit
6	Jumlah PJU					
	- Wilayah Daratan	2.878 unit	2.900 unit	2.920 unit	2.954 unit	3.144 unit
	- Wilayah Kepulauan	302 unit	303 unit	324 unit	350 unit	355 unit
7	Luas lahan untuk prasarana bandar udara	279.958 m2	334.260 m2	334.260 m2	371.610 m2	459.006 m2

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab.Sumenep

Sebagai daerah kepulauan, kapal laut dan perahu merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat Sumenep, khususnya yang berada di kepulauan. Sumenep memiliki 5 (lima) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Talango, Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Penyeberangan kalianget,



Pelabuhan Penyeberangan (Kalianget-Talango), dan Pelabuhan Boom di Kertasada kalianget.

Bandara Trunojoyo berdiri sejak era pemerintahan Bupati Soemaroem yang memerintah di Sumenep pada tahun 1970an. Bandara Trunojoyo mengalami era keemasan pada awal-awal pembangunannya diawali dengan penerbangan secara langsung jemaah haji Sumenep ke Surabaya tanpa melalui perjalanan darat yang menempuh waktu kurang lebih empat jam. Pada tahun 2011, untuk menjadikan bandara ini lebih nyaman dan bisa didarati oleh pesawat berukuran lebih besar, pemerintah daerah setempat membebaskan lahan untuk perpanjangan runway bandara yang sebelumnya 905 meter menjadi 1.600 meter. Pada tahun 2012, sudah tercatat ada dua Sekolah penerbangan yang memanfaatkan bandara ini, yaitu Sekolah Penerbangan Merpati Nusantara Airlines dan Sekolah Penerbangan PT Wing Umar Sadewa.

Sejak bulan Mei 2015 Bandar Udara Trunojoyo mulai melayani penerbangan perintis yaitu rute Sumenep – Surabaya dan Sumenep – Jember dengan operator penerbangan perintis maskapai Susi Air. Pada Tahun 2016, operator penerbangan perintis dikerjasamakan dengan maskapai penerbangan AirFast.

## 16. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam pembangunan, hal ini terkait pula dengan penyebarluasan informasi yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di tingkat desa di wilayah Kabupaten Sumenep. Jumlah radio pemerintah dan non pemerintah yang berada di Kabupaten Sumenep dapat disajikan dalam tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56  
Banyaknya Radio Pemerintah/Non Pemerintah  
di Kabupaten Sumenep

No.	Nama Studio	Frekuensi
1	RRI Sumenep (Jl. Urip Sumoharjo No. 2 69411)	1.098 KHz
	- Pro 1	2,961 MHz
	- Pro 2	3,22 MHz
	- Pro 3	3,171 MHz



No.	Nama Studio	Frekuensi
2	Radio Gema Sumekar (Jl. Dr. Cipto No. 2 Sumenep)	95,4 MHz
3	Nada FM Madura 9Jl. KH Mansyur No.65A Sumenep)	102,9 MHz
4	Madu FM (Jl. Adirasa Kav 15 Perum Bumi Sumekar Asri)	88,7 MHz
5	Rama FM (Jl Mahoni No. 17 Pangarangan Sumenep)	102,1 MHz
6	Nusa FM (Jl. Trunojoyo No. 295 Sumenep)	96,2 MHz
7	Permata FM (KIM) Karya Makmur (Jl. Desa Aeng panas No 113 Prenduen Sumenep	99 MHz
8	RASDA FM (Komplek ponpes Al Amien Putra II Sumenep)	106,5 MHz
9	Radio UNIJA FM (Jl. Raya Sumenep-Pamekasan)	107,2 MHz
10	PORNAMA FM (Jl trunojoyo Gedungan)	107,7 MHz
11	Kharisma FM (Jl Trunojoyo Sumenep)	87,9 MHz
12	Machan FM (Jl adirasa no 5-7 Kolor Sumenep)	88,5 MHz
13	Citra FM (jl raya Kalianget No 191 Kalianget Barat Sumenep)	103,1 MHz
14	AKN (Jl raya lenteng SKB Batuan)	98,2 MHz

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep

### 17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Sumenep dapat disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.57

Jumlah Koperasi di Kabupaten Sumenep

No	Jenis Data	2013	2014	2015
1	Jumlah Koperasi	1.255	1.297	1.358
-	Koperasi Aktif	1.086	859	918
-	Koperasi Tidak Aktif	169	438	440
2	Koperasi Induk	2	2	2
3	Koperasi Primer	1.255	1.297	1.356
-	KUD	24	24	24
-	Non KUD	1.086	1.299	1.334

Sumber : SIPD Dinas Koperasi dan UKM, 2015

### 18. Penanaman Modal

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sumenep selama 2 (Dua) tahun terakhir meningkat. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 237.611.120.290,- meningkat menjadi Rp.396.069.566.864,- pada tahun 2015, atau meningkat



kira-kira sebesar 40,01 %. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka meningkatkan investasi tersebut antara lain dengan mengikuti/mengadakan pameran baik pada skala regional maupun nasional.

Tabel 2.58  
Realisasi Investasi Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2015

Realisasi Investasi	2011	2012	2013	2014	2015
PMDN	17.963.135.900	476.863.260.087	408.285.309.235	237.611.120.290	396.069.566.864

Sumber :Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep

## 19. Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sumenep bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan dan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan pemuda sehingga pemuda di Kabupaten Sumenep bisa lebih termotivasi untuk berkarya dan siap untuk memerangi pengangguran dikalangan pemuda.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Sumenep menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Selain itu, dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu pembangunan di bidang olahraga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang ditujukan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung



hakekat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, meningkatkan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini serta mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga yang setinggi tingginya dalam kaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan citra bangsa dan kebanggaan nasional. Capaian indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.59  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Organisasi Pemuda	285	286	287	19	213
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	31	32	33	3	22
3	Jumlah Kegiatan Olahraga	18	18	22	54	97
4	Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta )	6	6	7	-	1
5	Jumlah Klub Olahraga	1,000	1,002	1,004	28	159
6	Jumlah Organisasi Olahraga	31	32	33	18	18
7	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4	4

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Sumenep

## 20. Statistik

Pengembangan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sumenep merupakan modal untuk berkembang kearah yang lebih baik untuk daerah ataupun masyarakat baik masyarakat yang terlibat langsung maupun masyarakat di sekitarnya. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, pariwisata, sarana dan prasarana daerah, pertanian serta potensi-potensi yang lain. Pengembangan potensi tersebut perlu di dukung dengan ketersediaan data-data yang menggambarkan kondisi sebenarnya tentang Kabupaten Sumenep. Data-data ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan gambaran umum maupun khusus yang tersusun secara teratur dan terperinci. Hal ini dimaksudkan agar pengguna data dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses data-data yang diperlukan. Terlebih lagi bagi para



pengambil kebijakan, data-data tersebut digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan berdasarkan pembangunan potensi yang ada di Kabupaten Sumenep. Data-data tersebut tertuangkan didalam buku Kabupaten Sumenep Dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten Sumenep.

## **21. Persandian**

Untuk menjabarkan kewenangan daerah terkait urusan persandian maka dilakukannlah pemetaan urusan persandian dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Oleh karena itu Lembaga Sandi Negara selaku Pembina tunggal persandian perlu memfasilitasi pengembangan kompetensi dengan menyelenggarakan diklat fungsional maupun diklat teknis yang aplikatif.

## **22. Kebudayaan**

Pembangunan bidang seni dan budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan lain yang didapati manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya daerah salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan kebudayaan dan memelihara serta melestarikan benda-benda bersejarah. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan dapat disajikan dalam Tabel berikut.



Tabel 2.60  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	23	23	29	55	49
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	12	10	32
4	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	-	-	3	2	4
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya					
5	yang dilestarikan	65	65	65	376	212

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Sumenep

### 23. Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan bertujuan mendorong terwujudnya peningkatan SDM, dan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perkembangan pembangunan dibidang perpustakaan dalam dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.61  
Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja Utama	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pengunjung Perpustakaan	-	11.869 pengunjung	15.431 pengunjung	18.384 pengunjung	19.155pengunjung
2.	Jumlah Koleksi Buku/Bahan Pustaka di Perpustakaan	-	45.605 eks	50.686 eks	54.263 eks	65.886 eks
3	Pelayanan Perpustakaan	-	38 lembaga	42 lembaga	42 lembaga	50 lembaga

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep

### 24. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketersediaan sumber daya



manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional menjadi sangat penting sehingga perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik ataupun informasinya. Perkembangan Sistem Kearsipan di Kabupaten Sumenep dapat diketahui melalui Tabel berikut:

Tabel 2.62  
Perkembangan Sistem Kearsipan Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja Utama	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pembinaan Kearsipan Desa	-	90 desa	34 desa	113 desa	-
2.	Pembinaan SDM Pengelola Arsip	-	900 orang	340 orang	1.130 orang	125 orang

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep

### 1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Sumenep mempunyai potensi perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan baik perikanan laut maupun perikanan darat. Hal ini sangat mendukung dengan adanya daerah kepulauan untuk perikanan air laut yang memiliki garis pantai yang cukup panjang maupun untuk perikanan darat. Pembangunan perikanan dan kelautan disamping dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah juga dituntut untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Kegiatan sektor perikanan dapat dibedakan atas perikanan laut dan perikanan darat. Kegiatan perikanan darat meliputi perikanan tambak, kolam, keramba dan perikanan perairan umum.

#### 2. Pariwisata

Pengembangan pariwisata memiliki nilai strategis, mengingat membutuhkan upaya yang terarah dan terpadu dalam pengembangan pariwisata melalui kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dengan sektor-sektor pembangunan yang lain sehingga tercipta iklim pengembangan yang lebih baik, selaras, seimbang dan serasi.



Kegiatan kepariwisataan merupakan suatu jasa yang memanfaatkan sumber alam dan lingkungan yang memiliki kekhususan tertentu seperti kebudayaan, peninggalan sejarah, keindahan alam dengan menjaga dan memelihara kelestariaannya dalam usaha pengembangan wisata. Ditinjau dari keragaman potensi budaya, permasalahan dan isu strategis pengembangan produk wisata Kabupaten Sumenep, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan kualitas produk wisata sebagai peluang investasi agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat disekitar area wisata.

Tabel 2.63  
Kunjungan Wisatawan ke Tujuan Obyek Wisata  
Di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2013-2015

No	Obyek Wisata	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Pantai Slopeng	81	13.924	53	22.416	40	37.795
2.	Pantai Lombang	0	37.360	95	31.536	131	62.494
3.	Museum Kraton	0	40.433	90	32.406	165	43.603
4.	Asta Tinggi	9	390.080	25	247.649	11	198.518
5.	Asta Yusuf	1	167.771	0	70.648	6	84.048
6.	Asta Panaongan	0	24.516	3	25.032	0	12.037
7.	Situs Banteng	0	0	94	1.084	47	1.411
8.	Situs Batogung	0	0	18	9.373	8	5.193
9.	Waterpark	0	0	0	104.101	9	76.490
JUMLAH		91	674.084	378	544.245	417	626.926

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR dalam Sumenep In Figure 2015



Tabel 2.64  
Daftar Nama dan Alamat serta Klasifikasi Jasa Akomodasi  
/Hotel di Kabupaten Sumenep

No.	Nama Akomodasi	Alamat	Klasifikasi	Lokasi
1	Wijaya I	Jl Trunojoyo No. 45-47	2	1
2	Wijaya II	Jl. KH. Wahid Hasyim	2	1
3	Hotel C1	Jl. Sultan Abdurrahman	2	1
4	Family Nur	Jl. Sultan Abdurrahman No. 1	2	1
5	Safari Jaya	Jl. Trunojoyo No. 90	2	1
6	Suramadu	Jl. Trunojoyo No. 121	2	1
7	Losmen Baitul Kamul	Jl Raya Pelabuhan Kalianget	2	1
8	Hotel Garuda	Jl. Kamboja	3	2
9	Utami Sumekar	Jl. Trunojoyo	2	1
10	Sumekar	Jl. Trunojoyo No. 53	2	1
11	Mitra Land	Jl. Trunojoyo No. 191	2	1
12	Hotel Apple	Jl. Payudan Barat I A	2	1
13	Dreamland	Jl. Trunojoyo	2	1

Sumber data : BPS Kabupaten Sumenep

Keterangan :

Kode Kolom 4 :

1.Berbintang

2.Melati

3.Lainnya

Kode Kolom 5 :

1.Berdiri Sendiri

2.Satu Lokasi dengan Bangunan Lain

3.Kawasan Wisata

### 3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor penting yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memberikan kontribusi pertama terhadap PDRB Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar 33,3% pada tahun 2015. Besarnya sumbangan sektor pertanian dimungkinkan oleh luasnya lahan pertanian yang ada. Disamping itu sektor pertanian memiliki backward dan forward linkages, sehingga



aktivitas sektor pertanian mampu menumbuhkan sektor yang lainnya, misalnya aktivitas budidaya pertanian secara umum memerlukan pupuk, benih/bibit, tenaga kerja, obat-obatan, alat dan mesin pertanian dan sebagainya; sedangkan pada saat/pasca panen memerlukan transportasi, tenaga kerja, alat dan mesin pengolah, packaging serta pemasaran, sehingga peningkatan aktivitas pertanian mampu menarik input dari sektor industri benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian serta tenaga kerja; output sektor pertanian digunakan sebagai input pada sektor industri pengolahan baik industri mikro, kecil, menengah maupun industri besar (misalnya penggilingan padi, lumbung desa, perusahaan makanan/minuman, industri krupuk/kripik dan sebagainya); produk pertanian juga mampu mengaktifkan perdagangan produk primer dan setengah jadi pada pedagang pengepul komoditas, pasar atau pusat perdagangan, serta menghidupkan restoran, warung dan pengusaha makanan perorangan.

Dari uraian di atas sektor pertanian mampu menggerakkan multiplier effect yang sangat berperan dalam menghasilkan value added (nilai tambah) sehingga sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa komoditas dalam sektor pertanian ini antara lain adalah padi, jagung, kedelai, kacang hijau, bawang merah beberapa tanaman sayuran seperti : cabe, kacang panjang, bayam, kangkung, tomat dan lain-lain.

Komoditas ini dianggap mempunyai nilai jual dan dapat dibudidayakan, volume produksi tinggi dan dapat diperkirakan nilai keuntungan produksi setiap tonnya. Berdasarkan kepada kondisi diatas maka diperlukan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal peningkatan jumlah luas panen dan produksi dari tiap-tiap komoditas diatas dengan cara memperhatikan sarana dan prasarana yang menunjang kepada peningkatan produksi komoditas tersebut seperti, irigasi, penyuluhan pertanian, dan sarana produksi lainnya.



Disamping itu terdapat kelemahan produk-produk pertanian diantaranya harga komoditas pertanian relatif labil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sifat produk yang mudah busuk, cepat rusak, ketersediaannya tergantung musim, tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya agar produk pertanian mempunyai nilai jual yang tinggi. Langkah tersebut diantaranya peningkatan kualitas produk, kejelasan harga produk, pemilihan lokasi dan saluran pemasaran yang strategis dan promosi produk.

Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan dan atau meningkatkan produksi sebagai akibat penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan pertanian. Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.65  
Produktifitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya  
Tahun 2011 – 2015

No.	Produktifitas (ton/ha)	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi sawah	4,55	6,03	6,02	5,73	5,72
2.	Jagung	2,83	3,05	2,82	2,82	2,87
3.	Kedelai	1,60	1,54	1,61	1,63	1,65
4.	Kacang tanah	1,64	1,67	1,57	1,58	1,60

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep

Padi merupakan komoditi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor pertanian, memiliki posisi yang sangat strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Tabel 2.66 memberikan gambaran tentang produksi padi di Kabupaten Sumenep. Luas Panen, Produksi dan rata-rata produksi Padi sawah dan Padi Ladang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 relatif menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Masalah



yang dihadapi berkaitan dengan ketahanan pangan ini adalah tingginya ketergantungan konsumsi pada bahan pokok beras (padi), sementara kelancaran distribusi pangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan petani masih belum optimal. Dalam kaitannya dengan upaya mengurangi ketergantungan konsumsi pada padi (beras), maka perlu dilakukan upaya-upaya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan pada dasarnya memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Diversifikasi pangan dapat diukur dengan melihat Pola Pangan Harapan (PPH).

Tabel 2.66  
Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Tahun 2011 - 2015

No.	Tahun	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
1.	2011	27.723	1.641.297	59,20	4.826	246.149,4	51,00
2.	2012	29.892	1.802.585	60,30	1.793	91.450,03	51,00
3.	2013	23.040	138.629	6,02	1.925	9.946,3	5,17
4.	2014	31.315	179.423	5,73	1.950	9.551	4,90
5.	2015	31.631	181.235	5,79	1.970	9.647	4,95

Sumber :Bappeda Kabupaten Sumenep

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan adalah dengan melihat indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan alat statistik untuk mengukur kemampuan daya tukar barang-barang hasil produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani maupun kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diharapkan adalah di atas 100 yang berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar.



Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Bidang peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Sektor peternakan di Kabupaten Sumenep, dilihat dari jumlah populasi ternak besar (sapi) cenderung terus mengalami kenaikan. Demikian juga untuk ternak kecil (kambing dan domba) populasinya terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jenis unggas, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari jumlah populasi 6.202.963 ekor pada tahun 2011, naik menjadi 7.599.741 ekor pada tahun 2015. Peningkatan populasi unggas ini terjadi pada semua jenis populasi, baik pada ayam ras petelur, ayam pedaging, ayam kampung, itik, angsa, kelinci, entok maupun puyuh.

Tabel 2.67  
Banyaknya Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Kelinci  
Kabupaten Sumenep

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ternak Besar :					
	- Sapi	357.038	360.862	345.095	349.081	353.124
	- Kerbau	5.189	5.189	5.027	5.039	5.043
2.	Ternak Kecil :					
	- Kambing	145.212	145.9477	146.751	147.735	148.683
	- Domba	37.411	37.628	37.838	38.083	38.414
3.	Unggas & kelinci :					
	- Ayam Ras Petelur	302.959	307.407	310.077	313.472	319.703
	- Ayam Ras Broiler	328.440	332.309	111.630	112.965	114.850
	- Ayam Kampung	767.609	769.805	771.569	773.734	776.742
	- Itik	67.269	67.481	67.655	67.955	68.317
	- Kelinci	2.422	2.593	2.904	2.954	3.357

Sumber : Buku Saku Bappeda Kabupaten Sumenep



Dalam upaya mencukupi kebutuhan konsumsi hewani, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat. Konsumsi protein hewani masyarakat masih cukup rendah sebesar 4,19 gr/kapita/hari masih jauh dari konsumsi minimal sebesar 6 gr/kapita/hari. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan produksi daging dan telur. Produksi daging dan telur masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan potensi wilayahnya, dengan produksi tahun 2015 sebagai berikut, produksi 4.342.669 kg dan telur 2.680.613 kg.

Pada sektor pertanian jenis komoditi potensial tanaman hortikultura Kabupaten Sumenep yang dapat dikembangkan adalah jagung karena Kabupaten Sumenep mempunyai luas lahan jagung 152.425 hektare yang merupakan lahan terluas di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan komoditi potensial peternakan yang memiliki nilai produksi cukup besar adalah Sapi. Usaha penggemukan sapi diharapkan dapat menjadi usaha yang potensial dikembangkan di Kabupaten Sumenep.

Beberapapermasalahan pokok pada sektor pertanian adalah adanya alih fungsi lahan, produktivitas dan efisiensi usaha pertanian yang rendah. Masalah lain yang harus diatasi adalah penerapan teknologi yang masih rendah yang mampu diadopsi oleh masyarakat yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pemanfaatan teknologi dan hasil pertanian, masih kurangnya investasi di bidang agro industri, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian serta kredit dan infrastruktur pertanian. Permasalahan umum peternakan berkaitan dengan lambatnya pertumbuhan populasi ternak dan kesehatan hewan ternak karena terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan.

#### **4. Kehutanan**

Perkembangan Luas Hutan Rakyat dan Lahan Kritis di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.68  
Luas Hutan Rakyat dan Lahan Kritis  
Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Hutan Rakyat (Ha)	8.572,75	8.915,03	9.225,03	10.910,03	11.790,30
2.	Luas Lahan Kritis (Ha)	103.473,70	103.131,42	102.835,95	101.150,95	100.198,95

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, antara lain sumber daya minyak, gas, air, batu gunung, pasir kerikil, pasir uruk, batu kapur dan garam. Batu gunung dan pasir ada dimanfaatkan sebagai salah satu bahan bangunan atau untuk urugan. Seiring dengan adanya jembatan Surabaya Madura yang berdampak pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sampai dengan akhir tahun 2015 ijin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan sebanyak 44 ijin dengan luas usaha 1.744,87 Ha yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan, dari total 56 penambang yang ada. Disamping penambangan sirtu yang dilakukan oleh badan usaha, masyarakat banyak yang melakukan penambangan sirtu (atau yang biasa disebut dengan pertambangan rakyat). Kondisi di lapangan, penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bersifat illegal atau liar.

Hal inilah, yang akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep ke depan, karena berdampak pada kerusakan lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang terpenting adalah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan/pemantauan berkala, pengaturan-pengendalian, serta pendataan/inventarisasi khususnya terhadap pertambangan rakyat sesuai Peraturan Perundangan tentang pertambangan.



Selain usaha pertambangan sirtu, sumber daya lain yang banyak dimanfaatkan untuk industri/usaha adalah air bersih. Sampai tahun 2015 ijin penggunaan air bawah tanah (ABT) yang dikeluarkan sebanyak 524 ijin, tetapi jumlah pengguna ABT sebanyak 605 usaha.

Dilihat dari sumbangan pajak galian C (sirtu) pada APBD dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir berkisar antara 1,58 - 2,86 %, sedangkan sumbangan pajak penggunaan air bawah tanah pada tahun 2014 sebesar 4,09% dan pada tahun 2015 sebesar 5,17%. Besaran realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69  
Rekapitulasi Target-Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Tahun 2011 – 2015

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Pajak Galian C (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
2011	186.570.000	172.954.962	92,70 %
2012	250.000.000	207.608.833	83,04 %
2013	325.000.000	179.386.348	55,20 %
2014	325.000.000	429.862.831	132,27 %
2015	422.000.000	398.072.976	94,33 %

Sumber : DPPKA Kabupaten Sumenep 2015

Tabel 2.70  
Sumbangan Pajak Air Tanah terhadap Target Realisasi  
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target (Rp)	Pajak Air Tanah (Rp)	Prosentase Realisasi (%)
2011		-	-
2012	50,000,000	41.975.323	83,95 %
2013	65,000,000	70.810.474	108,94%
2014	70,000,000	116.169.296	165,96%
2015	91,000,000	157.351.059	172,91%

Sumber : DPPKA Kabupaten Sumenep 2015



Sedangkan sumbangan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sumenep, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011- 2015) sebagaimana dalam tabel 2.71.

Tabel 2.71  
Sumbangan Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2011 – 2015

Tahun	Juta Rp	%
2011	3.946.458,6	26,75
2012	4.743.721,0	28,11
2013	6.364.221,7	35,42
2014	6.878.207,4	34,99
2015*	7.435.899,9	34,92

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep 2015

Sedangkan untuk sub sektor energi sebagian besar terpenuhi dari penggunaan energi listrik yang disediakan oleh PLN dan pemakaian LPG. Perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2011 - 2015 dapat dilihat dalam tabel 2.72.

Tabel 2.72  
Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015

Uraian	Capaian				
	2011	2012	2013	2014	2015
a. Peningkatan ketaatan pengguna Air Bawah Tanah	71,07%	73,22%	86,61%	74,35%	75,06%
b. Peningkatan ketaatan penambang terhadap peraturan perundangan	82,14%	85,71%	94,64%	89,29%	89,62%

Sumber: Kantor ESDM Kabupaten Sumenep 2015

Dari capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa ketaatan pengguna air bawah tanah dan penambang terhadap peraturan



perundangan menunjukkan perkembangan yang baik, dimana hal tersebut mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian masih ada atau ditemui penambang pasir batu (sirtu) yang dilakukan oleh masyarakat atau yang dikenal dengan pertambangan rakyat tidak memiliki ijin sehingga dapat dikategorikan sebagai penambang liar. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang melakukan pengeboran atau pemakai air bawah tanah secara liar/tanpa ijin sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap keseimbangan neraca air tanah.

## 6. Perdagangan

Urusan perdagangan adalah mengembangkan perdagangan dengan memperluas jaringan pemasaran, memperlancar distribusi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha. Urusan perdagangan juga dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Guna mendukung perekonomian kerakyatan dengan mengutamakan jaringan pemasaran untuk perdagangan kecil maka perlu adanya revitalisasi pasar daerah yang memadahi.

Tabel 2.73

Perkembangan Urusan Perdagangan Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pasar Daerah	38	38	38	38	38
2.	Pasar Desa	58	58	58	58	58

Sumber: DPPKA Kabupaten Sumenep 2015

## 7. Perindustrian

Urusan perindustrian mengemban tugas untuk meningkatkan produksi sektor industri yang berperan dalam rangka mengurangi pengangguran, serta menciptakan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Urusan



ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Perkembangan sasaran kegiatan urusan Perindustrian secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.74.

Tabel 2.74  
Perkembangan Urusan Perindustrian di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perkembangan Industri Kecil Menengah Besar (IKMB) (unit)	4.986	4.986	14.805	15.353	15.480
2.	Perkembangan Jumlah Nilai Investasi (juta Rp)	17.963.135.900	476.863.260.087	408.285.309.235	237.611.120.290	396.069.566.864
3.	Perkembangan Tenaga Kerja yang Terserap	27.891	27.891	18.931	1.545	8.720

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep 2015

Perkembangan Industri Kecil Menengah Besar (IKMB) tahun 2011 sebesar 4.986 unit sedang tahun 2015 sebesar 15.480 unit atau ada peningkatan sebesar 210,4%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya upaya Kabupaten Sumenep melakukan terobosan untuk menarik investor lokal maupun luar negeri.

Demikian juga pada perkembangan jumlah nilai investasi tahun 2011 sebesar Rp. 17.963.135.900,- tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp.396.069.566.864, . Perkembangan kenaikan ini dipengaruhi adanya perkembangan IKMB.

## 8. Transmigrasi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan persebaran penduduk dan stabilitas sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terlaksananya pembangunan yang baik di daerah asal maupun di daerah tujuan transmigrasi. Perkembangan jumlah transmigran di Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 menurut daerah tujuan dapat disajikan dalam Tabel 2.75 berikut :



**Tabel 2.75**  
**Perkembangan Jumlah Transmigran menurut Daerah Tujuan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Transmigran (Jiwa)	128	278	87	22	32
2.	Jumlah Transmigran (KK)	40	80	25	5	10

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep

### 1.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1. Perencanaan

Sebagaimana Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah menekankan pada peningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana yang ditetapkan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan diawali dengan mengidentifikasi dan merumuskan persoalan-persoalan yang muncul dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian dilakukan analisa untuk merekomendasikan sebuah kebijakan.

Perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka panjang, menengah dan tahunan merupakan salah satu modal dasar keberhasilan suatu pembangunan, karena proses perencanaan memperhitungkan kemampuan daerah, potensi, sumber daya sampai dengan kelemahan yang berpotensi menjadi masalah dan hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Untuk menghasilkan rencana pembangunan, dibutuhkan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme perencanaan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

- a) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel) yang menghasilkan daftar usulan kegiatan pembangunan yang memerlukan pembiayaan dari



pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya).

- b) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) yang menghasilkan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya.
- c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) menghasilkan kesepakatan serta komitmen antar pelaku pembangunan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Sasaran perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengambil kebijakan yaitu dengan mewujudkan pemantapan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

## 2. Keuangan

Perkembangan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 2.76  
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011 (Ribuan)	2012 (Ribuan)	2013 (Ribuan)	2014 (Ribuan)	2015 (Ribuan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	57.940.353,70	85.886.851,77	97.052.073,11	162.371.865,15	172.687.320,52

Berdasarkan Tabel 2.76, dapat dilihat bahwa selama periode Tahun 2011-2015, Pendapat Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, Pendapatan Asli



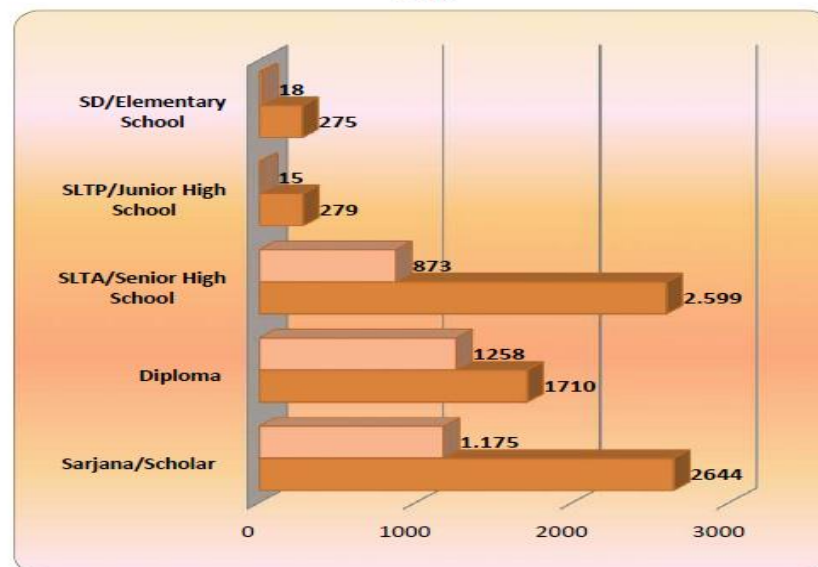
Daerah mencapai Rp. 57.940.353,70, hingga pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep mencapai Rp.172.687.320,52. Capaian PAD pada tahun 2015 tersebut menyumbang 8,84% dari total pendapatan Daerah sebesar Rp.1.952.700.349.515,34.

### 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan jumlah aparatur Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2016 disajikan dalam Gambar 2.3

**Gambar 2.3**

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Pememerintah Kabupaten Sumenep  
*Number of Civil Servants by Sex and Education Level of Sumenep Regency 2015*



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumenep  
*Source : Regional Personal Agency Sumenep*

### 4. Penelitian dan Pengembangan

Pada dasarnya penelitian dan pengembangan harus berjalan seiring dan sejalan dengan pembangunan termasuk di tingkat daerah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan, secara valid harus mampu menopang seluruh kerangka pembangunan. Perencanaan partisipatif selalu disuarakan sebagai model terbaik, dari hasil perencanaan bottom-up, program yang diusulkan masyarakat, dengan versus hasil perencanaan top-down, program yang diusulkan pemerintah.



Namun kedua model perencanaan tersebut sama-sama tidak memiliki basis data yang cukupkuat dan lengkap (speculative conjecture) untuk menghasilkan sebuah kebijakan yangberkualitas.Sekelumit persoalan yang dialami selama ini, dapat diselesaikan dengan pendekatanberbasis penelitian dan kajian, untuk mencari model-model kebijakan berkualitas terkait pencapaianarah pembangunan yang jelas dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya untuk memberikan ruang yang cukup bagi eksistensi penelitian dan pengembangan melalui Inovasi Daerah serta Roadmap Litbang yang didukung berbagai komponen sehingga penelitian dan pengembangan dapat berperan dalam pengambilan kebijakan maupun peningkatan produktivitas di berbagai aspek.

Tabel 2.77  
Jumlah Hasil Penelitian Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penelitian	2	7	4	4	3
2.	Jumlah Penelitian yang ditindaklanjuti	2	4	2	2	2

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sumenep

#### 1.3.4. Fungsi Lain

##### 1. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang



dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan parameter untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan yang telah dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. Pedoman umum ini, selain dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

## **2. Kerjasama Daerah**

Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga yang pada hakikatnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **3. Pengawasan**

Dalam upaya menuju terciptanya good government, maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh



anggotamasyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Informasi tersebut dapat MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui Sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.



Tabel 2.78

Capaian Indikator Kinerja Pengawasan di Kabupaten Sumenep Tahun 2015

No.	Uraian	Tahun 2015
1.	Prosentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK	68%
2.	Level APIP Kabupaten Sumenep	Level 1
3.	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat yang ditindaklanjuti	34%
4.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP/ LKJIP SKPD	C
5.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Review	35%
6.	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai Baik	18%

Pada tahun 2015, prosentase tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mencapai 68% dari jumlah temuan sebanyak 324 temuan. Sedangkan untuk prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil review LPPD sebesar 35% dari 11 SKPD yang direview dan Level APIP Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 mencapai level 1.

#### 1.4. ASPEKDAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur dan Fokus Sumber Daya Manusia.

Dalam Sistem Perwilayahan Propinsi Jawa Timur, posisi Wilayah Kabupaten Sumenep termasuk di dalam WP (Wilayah Pengembangan) Germakertosusila Plus (meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya), dan berada di antara WP Germakertosusila Plus dengan WP



Malang Raya (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dengan pusat pelayanan di Kota Malang). Hal ini memberikan efek positif dan negatif terhadap keberadaan Wilayah Kabupaten Sumenep terhadap kab./kota sekitarnya, maupun sebaliknya.

Adapun keunggulan Kabupaten Sumenep dalam hal kemampuan ekonomi daerah, fasilitas/infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

##### **1. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relative lebih baik dibandingkan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) dan yang dibayar (Ib) petani.

BPS Kabupaten Sumenep sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menghitung Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sampai dengan saat ini belum menyediakan data tersebut khusus Kabupaten Sumenep. Data yang tersedia masih merupakan data NTP dan NTN Provinsi Jawa Timur, tetapi dengandicantumkannya indikator ini dalam RPJMD Kabupaten Sumenep maka BPS diharapkan melakukan penghitungan atas NTP dan NTN setiap tahun sehingga dapat diketahui keberhasilan Pemerintah Sumenep dalam mendorong peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.



Tabel 2.79  
Indeks Harga yang Diterima Petani Jawa Timur  
Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Tanaman Pangan	Holtikultura Tanaman	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	Indeks Gabungan Jawa Timur
1	2009 (rata-rata)	163,24	171,00	145,03	151,98	144,52	159,80
2	2010(rata-rata)	149,29	159,53	138,29	138,88	135,48	147,27
3	2011(rata-rata)	139,79	152,93	130,10	132,40	132,39	139,26
4	2012(rata-rata)	149,29	159,53	138,29	138,88	135,48	147,27
5	2013(rata-rata)	163,24	171,00	145,03	151,98	144,52	159,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.80  
Indeks Harga yang Dibayar Petani Jawa Timur  
Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Tanaman Pangan	Holtikultura Tanaman	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	Indeks Gabungan Jawa Timur
1	2009 (rata-rata)	121,39	120,89	121,27	121,43	117,59	121,04
2	2010(rata-rata)	130,14	129,87	128,93	128,97	124,29	129,40
3	2011(rata-rata)	138,19	137,76	135,98	135,65	130,39	136,99
4	2012(rata-rata)	145,86	145,10	143,13	141,61	136,12	144,15
5	2013(rata-rata)	157,53	156,59	154,32	151,50	144,97	155,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.81  
Nilai Tukar Petani Jawa Timur  
Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Tanaman Pangan	Holtikultura Tanaman	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan	Indeks Gabungan Jawa Timur
1	2009 (rata-rata)	92,56	106,46	100,31	106,90	101,07	98,19
2	2010(rata-rata)	94,60	110,60	92,51	103,43	101,75	98,74
3	2011(rata-rata)	101,13	111,03	97,59	97,61	101,54	101,65
4	2012(rata-rata)	103,62	109,20	94,02	100,28	99,70	102,91

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Nilai Tukar Nelayan dihitung dengan juga membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) nelayan dan yang dibayar (Ib) nelayan.



Tabel 2.82  
 Nilai Tukar Nelayan Jawa Timur  
 Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Indeks Harga yang diterima Nelayan (It)	Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga	Indeks Harga yang dibayar Nelayan	Indeks Harga Biaya Produksi dan Pembentukan Barang Modal (BPPBM)	Indeks Nilai Tukar Nelayan
1	2012(rata-rata)	120,90	117,40	109,13	113,51	106,54
2	2013(rata-rata)	109,02	108,59	102,61	105,69	103,16
3	2014(rata-rata)	99,51	101,46	97,63	99,71	99,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

## 2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perKapita

Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin besar pula peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan tembakau, sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Sumenep menurut data BPS Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil Susenas 2012 sebesar Rp.420.361,-perbulan.

## 3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari



dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPS diketahui bahwa pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita sebesar 43,26%. Hal ini berarti pengeluaran rumah tangga sebagian besar atau lebih dari 50% masih dipergunakan untuk konsumsi pangan.

#### 4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura ditentukan oleh adanya peningkatan luas panen dan produktivitas tanaman sehingga penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan sarana prasarana yang sangat diperlukan. Perkembangan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.83.

Tabel 2.83  
Produksi Pertanian Tahun 2011 – 2015

Uraian	Perkembangan Produksi					
	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
Peningkatan Produksi Pertanian	Padi Sawah (ton)	164.129,73	180.258,52	13.862,98	179.423,13	186.717
	Jagung (ton)	431.463,34	432.851,84	382.640,78	397.600,58	418.386
	Ubi Kayu (ton)	214.010,02	161.527,07	189.627,21	103.185,06	107.018,33
	Ubi Jalar (ton)	665,21	487,14	766,67	273,36	404,27
	Kedelai (ton)	14.016,56	12.080,46	10.497,44	7.167,44	7.634
	Kacang Hijau (ton)	21.371,70	14.419,51	10.928,62	12.845,33	16.066,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

Produksi tanaman pangan selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 pada tanaman padi sawah cenderung meningkat hanya pada tahun 2013 yang turun disebabkan faktor cuaca, tanaman jagung selalu meningkat setiap tahunnya, untuk komoditas ubi kayu, ubi jalar kedelai dan kacang hijau tiap



tahun cenderung mengalami penurunannamun mengalami peningkatan produksi pada tahun 2015.Pergeseran produksi tanaman bahan pangan terjadi karena petani harus menyesuaikan dengan anomali iklim yang terjadi pada dekade terakhir, sehingga komoditas yang ditanam dipengaruhi oleh ketersediaan air untuk bercocok tanam.

### 5. Peningkatan Produksi dan Populasi Peternakan

Pencapaian peningkatan produksi dan populasi peternakan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan dan penyediaan bahan pangan asal ternak yang mencukupi serta memadahi merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi terutama kecukupan protein.Peningkatan produksi peternakan ditujukan untuk penyediaan kebutuhan pangan yang sehat, aman, utuh dan halal dengan jumlah yang memadahi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak muncul berbagai permasalahan di masyarakat.Perkembangan produksi peternakan dapat dilihat pada tabel 2.85

Tabel 2.84  
Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2011 – 2015

Uraian	Produksi					
	2011	2012	2013	2014	2015*	
Peningkatan Produksi Peternakan (Ton)	Daging	2.661.363	2.689.865	2.572.338	2.602.050	2.628.333
	Telur	2.285.570	2.310.061	2.333.358	2.356.267	2.380.068
	Susu					
	Sapi Potong	357.038	360.860	344.095	364.098	267.776
	Sapi Perah					
Peningkatan	Kambing	145.212	280.218	281.923	283.657	286.522
Populasi Ternak (Ekor)	Domba	37.411	65.849	66.217	66.645	67.318
	Ayam	302.959	252.966	255.814	258.614	261.226
	Petelur					
	Ayam Pedaging	328.440	558.555	560.159	561.731	567.405
	Itik	55.254	45.685	45.818	45.984	46.448

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep



Produksi peternakan pada periode 2011 sampai dengan 2015 cenderung meningkat setiap tahunnya. Produksi daging, telur dan susu meningkat secara signifikan disebabkan oleh berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendukung pengembangan sub sektor tersebut meliputi kemudahan perijinan investasi, penyediaan infrastruktur, pendampingan yang terus menerus dari instansi teknis sampai dengan tersedianya industri pengolahan produk peternakan sebagai jaminan pasar sektor primer. Demikian pula peningkatan populasi ternak setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup signifikan yang didukung oleh program kegiatan pembibitan ternak, inseminasi buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan baik bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumenep, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBN.

## 6. Peningkatan Produksi Perkebunan

Pencapaian peningkatan produksi perkebunan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan produksi perkebunan. Adapun perkembangan peningkatan produksi perkebunan mulai tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel 2.85.

Tabel 2.85  
Perkembangan Produksi Perkebunan Tahun 2011 - 2015

Uraian	Produksi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase Perkembangan Produksi Perkebunan Komoditas:	4,11	12,09	15,58	16,57	12,21
a. Kelapa/Ton	36.342,92	36.557,70	36.184,05	40.610,70	42.442,92
b. Siwalan/Ton	629,90	642,17	664,27	706,82	744,37
c. Cabe jamu/Ton	8.336,29	8.671,22	8.671,58	9.468,71	9.868,69
d. Jambu Mente/Ton	3.097,02	3.469,37	3.469,76	4.430,48	4.974,31
e. Tembakau/Ton	9.246,88	13.471,42	3.229,67	9.429,74	9.244,92

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep



## **7. Perikanan**

Potensi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di Kabupaten Sumenep cukup besar, namun perlu adanya upaya optimalisasi sumber daya perikanan dan sumber daya manusia dengan meningkatkan sumber daya kelautan serta mengoptimalkan aktivitas kelembagaan kelompok nelayan.

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Sumenep salah satunya dilaksanakan program pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip integritas efisiensi berkualitas dan percepatan yang dipertegas dengan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER 12 / MEN / 2011 Tentang Minapolitan. Adapun hasil penyusunan masterplan Minapolitan dialokasikan di Kecamatan Bluto sebagai Pusat Pengembangan Minapolitan dan Kecamatan Seronggi sebagai Hinter Land (Kawasan Penyangga).

## **8. Obyek Wisata Unggulan**

Kabupaten Sumenep memiliki potensi wisata unggulan komparatif, artinya potensi wisata yang berbeda bahkan tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Potensi wisata tersebut diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempromosikan dan menjual potensi daerah sehingga sektor lain dapat dijual sebagai obyek kunjungan yang mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah.

Wisata alam yang berbeda di Kabupaten Sumenep antara lain : Pantai Lombang yang di kenal dengan cemara udang berada di Kecamatan Batang-Batang, Pantai Slopeng dikenal dengan hamparan gunung pasir putih di Kecamatan Dasuk, Pulau Gililabak merupakan pulau dengan keindahan terumbu karang yang masih perawan berada di Kecamatan Talango dan Pulau Giliyang di kenal dengan wisata kesehatan karena mempunyai kadar oksigen tinggi ada di Kecamatan Dungkek. Dengan berbagai potensi wisata tersebut Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk mengembangkan obyek-obyek tersebut



sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan PDRB.

#### **1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

##### **1. Perhubungan**

Aksesibilitas wilayah Kabupaten Sumenep yang dapat menjadi unggulan daya saing wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi daerah, dapat ditunjukkan melalui ketersediaan jaringan prasarana/infrastruktur utama yang memiliki cakupan layanan yang memadai ke seluruh wilayah dan ketersediaan cakupan layanan transportasi umum lokal dan regional.

Pengembangan jaringan prasarana/infrastruktur utama pendukung pembentukan Pusat Kegiatan Perkotaan dan perdesaan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, meminimalkan tingkat disparitas wilayah sesuai potensi, kendala serta perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain:

- Angkutan darat berupa fasilitas jalan beraspal sepanjang 1.750,374 Km dengan kondisi jalan baik sepanjang 676,786 Km, kondisi jalan sedang 395,504 Km, kondisi jalan rusak sepanjang 12,600 Km dan kondisi jalan rusak berat menjangkau 508,610 Km. Adapun jenis jalan terbagi atas jalan Negara sepanjang 48,824 Km, jalan provinsi sepanjang 61,120 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.640,430 Km (*sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sumenep tahun 2014*);
- Untuk angkutan bagi masyarakat kepulauan telah tersedia fasilitas pelabuhan sebagai sarana transportasi dengan rute ke beberapa kepulauan di kabupaten Sumenep termasuk juga rute Kalianget – jangkar;
- Bandara Trunojoyo yang dibangun pada era pemerintahan Bupati Soemarmoem pada tahun 1970an. Seiring berjalannyawaktu, Bandara ini mengalami pasang surut dalam pengembangannya. Bandara Trunojoyo mengalami era



keemasan pada awal-awal pembangunannya diawali dengan penerbangan secara langsung jemaah haji Sumenep ke Surabaya tanpa melalui perjalanan darat yang menempuh waktu kurang lebih empat jam. Pada tahun 2011, untuk menjadikan bandara ini lebih nyaman dan bisa didarati oleh pesawat berukuran lebih besar, pemerintah Kabupaten Sumenep telah membebaskan lahan untuk perpanjangan runway bandara yang sebelumnya 905 m menjadi 1.600 meter pada tahun 2012, sudah tercatat ada dua Sekolah penerbangan yang memanfaatkan bandara ini, yaitu Sekolah Penerbangan Merpati Nusantara Airlines dan Sekolah Penerbangan PT Wing Umar Sadewa. Pada tahun 2014 penerbangan perintis telah terwujud dengan maskapai penerbangan PT. Susi Air sebagai operator penerbangan dengan rute Sumenep-Surabaya dan Sumenep-Jember jenis Pesawat Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 penumpang. Untuk jalur penerbangan pada tahun 2015 sebagai operator penerbangan yaitu PT. Airfast Indonesia dengan rute Sumenep-Surabaya dan Surabaya-Sumenep dengan jenis pesawat Twin Otter DHAC 300 berkapasitas 20 penumpang.

## **2. Penataan Ruang**

Dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Sumenep pada tanggal 18 Juli 2013 dengan Perda No. 12 Tahun 2013, maka secara langsung dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan (teknis/sektoral, dan operasional), pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, investasi pembangunan dan/atau perijinan serta administrasi pertanahan di Wilayah Kabupaten Sumenep.

Tujuan dari penataan ruang Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri, yang mempunyai Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi: Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan



minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi:

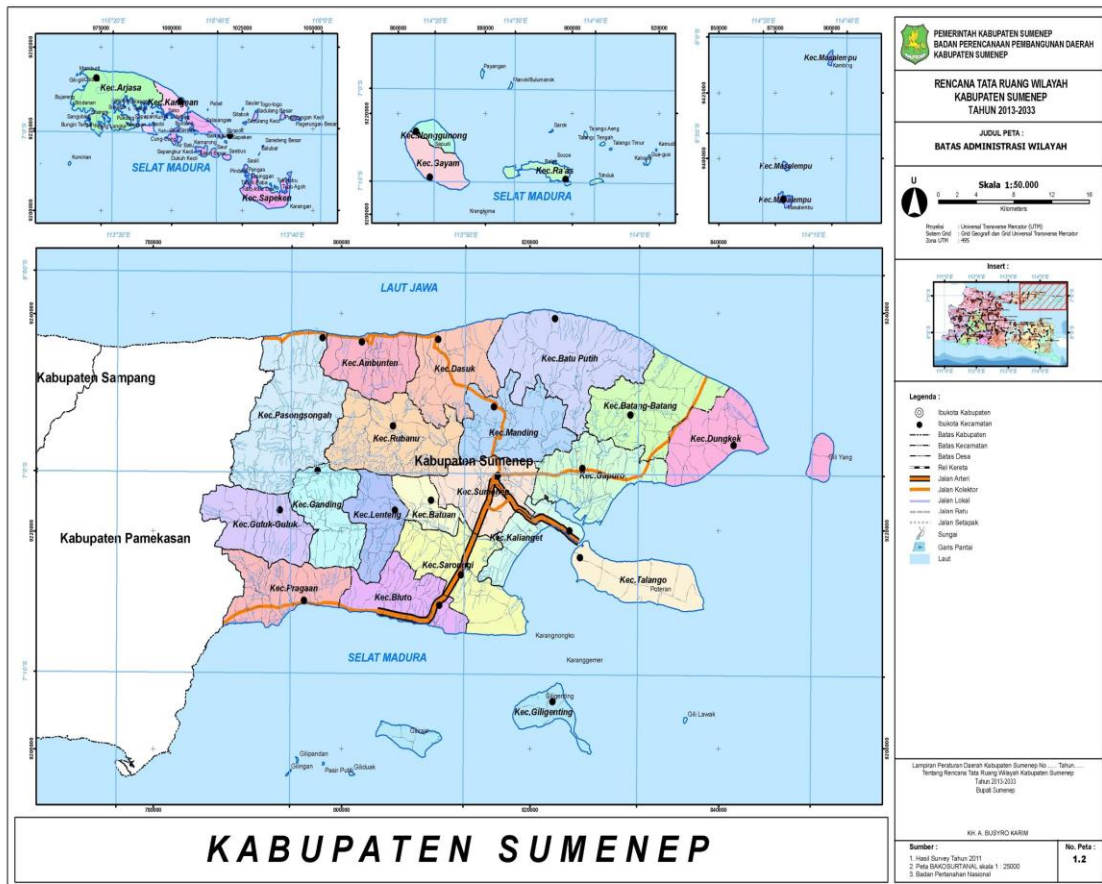
- a. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan; dan
- e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep adalah :

- a. Pengembangan kawasan minapolitan;
- b. Pengembangan kawasan agropolitan;
- c. Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata;
- d. Pengembangan kegiatan industri;
- e. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- f. Pengendalian dan pengelolaan fungsi kawasan lindung;
- g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
- h. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;
- i. Pengembangan potensi pertambangan mineral dan non mineral;
- j. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 2.4  
Peta Orientasi Wilayah Per Kecamatan



### 1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif merupakan salah satu faktor pendukung perkembangan investasi di suatu daerah. Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2011 – 2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.86  
Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2011 – 2015  
Di Kabupaten Sumenep

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kriminalitas	590	623	589	454	369
2.	Jumlah Penduduk	1,048,177	1,053,640	1,061,211	1,067,202	1,072,113
3.	Angka Kriminalitas	24.37	27.04	26.07	20.77	17.49

Sumber : SIPD Kabupaten Sumenep



## 2. Lama Proses Perizinan

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep bertekad untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kinerja pelayanan melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPADU). Sistem Informasi Teknologi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep meliputi :

- a. Aplikasi Perizinan.
- b. Website.
- c. Digital Fice dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) maupun pelayanan perizinannya secara langsung karena tidak ada jaringan sistem informasi elektronik di wilayah pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 53 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep, meliputi penerbitan, penandatanganan, penomeran, penetapan dan penarikan retrebusi perizinan merupakan aplikasi pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat dan tepat serta secara transparan. Saat ini telah ada 28 jenis izin yang dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep diantaranya sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Perizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Izin Lingkungan
2. Izin Lokasi (dibawah 1 Ha)
3. Izin Prinsip
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (TDI/IUI)



10. Izin Kesehatan Meliputi;
  - a. Izin Klinik Utama,
  - b. Izin Rumah Sakit kelas C dan D,
  - c. Izin Rumah Sakit khusus kelas A, B, dan C,
  - d. Izin Apotek,
  - e. Izin Toko Obat,
  - f. Izin Toko Alat Kesehatan,
11. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja,
12. Izin Pembudidayaan Perikanan,
13. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP),
14. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau,
15. Izin Tontonan,
16. Izin Pengumpulan Uang/Barang,
17. Izin Reklame/Media Luar Ruang,
18. Izin Usaha Penyewaan / Rental Play Station ( Kekayaan bersih >50 Juta )
19. Izin Penebangan Pohon Pemerintah,
20. Izin stren Kali,
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi;
  - a. Izin Usaha Jasa Boga,
  - b. Izin Hotel/ Penginapan/ Rumah Kost,
  - c. Izin Salon,
  - d. Izin Biro Jasa Travel,
22. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan,
23. Izin Usaha angkutan Darat,
24. Izin Penyimpanan Sementara dan/ atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),
25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM),
26. Izin Rencana Tapak/ Site plan,
27. Izin Perubahan Penggunaan Tanah/ Alih Fungsi Lahan,
28. Izin Usaha Peternakan.

**3. Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah**

Tabel 2.87

## Jenis dan Realisasi Pajak Retribusi Daerah Tahun 2015

NO.	JENIS PUNGUTAN	REALISASI	%
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>16,288,376,559.02</b>	<b>69.38</b>
<b>1.</b>	<b>PAJAK HOTEL</b>	<b>330,992,942.00</b>	<b>240.20</b>
	Hotel Melati Satu	299,762,942.00	253.39
	Losmen / Rumah Penginapan	31,230,000.00	160.15
<b>2.</b>	<b>PAJAK RESTORAN</b>	<b>1,652,191,676.00</b>	<b>105.42</b>
	Restoran	35,205,000.00	76.28
	Katering	1,603,966,676.00	106.93
	Warung Makan	13,020,000.00	102.72
	Pedagang Kaki Lima	-	-
<b>3.</b>	<b>PAJAK HIBURAN</b>	<b>101,067,000.00</b>	<b>55.32</b>
	Pagelaran Kesenian / Musik	83,467,000.00	85.89
	Pertandingan dan Olah Raga	17,600,000.00	20.58
<b>4.</b>	<b>PAJAK REKLAME</b>	<b>279,551,723.00</b>	<b>86.62</b>
	Pajak Reklame Papan / Billboard/ Megatron	219,461,523.00	95.71
	Pajak Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul Umbul	57,797,720.00	64.65
	Pajak Reklame Selebaran	2,292,480.00	57.19
<b>5.</b>	<b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b>	<b>10,598,327,676.00</b>	<b>70.89</b>
	Pajak Penerangan Jalan	10,598,327,676.00	70.89
<b>6.</b>	<b>PAJAK AIR TANAH</b>	<b>157,351,059.00</b>	<b>172.91</b>
	Pajak Air Tanah	157,351,059.00	172.91
<b>7.</b>	<b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>	<b>398,072,976.00</b>	<b>94.22</b>
	Pasir Kerikil	126,759,150.00	107.15
	Pasir Urug	12,093,001.00	47.70
	Batu Gunung	234,600,000.00	126.20
	Pasir Saur	21,406,700.00	253.33
	Batu Bata Putih	3,214,125.00	3.80
<b>8.</b>	<b>PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH &amp; BNGN</b>	<b>1,037,955,450.00</b>	<b>111.49</b>
	BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan)	1,037,955,450.00	111.49
<b>9.</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>1,732,866,057.02</b>	<b>35.57</b>
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1,732,866,057.02	35.57
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2,067,076,741.00</b>	<b>67.91</b>
<b>1.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1,396,355,700.00</b>	<b>62.90</b>
	Retribusi Pelayanan Pasar	1,396,355,700.00	62.90
<b>2.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>670,721,041.00</b>	<b>81.40</b>
	Sewa Tanah dan Bangunan / Tenda	297,248,041.00	124.39
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	373,473,000.00	63.84

Sumber : DPPKA Kabupaten Sumenep



#### 4. Status Desa

Untuk mewujudkan desa sejahtera, Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 6 tentang Desa atau sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desa-lah yang lebih tahu apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.

Program-program desa harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat rencana kegiatan dan penggunaan atau RKP Desa. Jumlah desa berdasarkan status desa di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.88  
Jumlah Desa menurut Status Desa  
di Kabupaten Sumenep

Jumlah Desa di Kabupaten Sumenep	Desa Tertinggal	Desa Berkembang	Desa Sejahtera
332 Desa	-	305	27

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sumenep

#### 1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia ikut berpengaruh pada aspek daya saing di Kabupaten Sumenep, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang baik tentunya akanmenambah beban bagi daerah tersebut sehingga menghambat pertumbuhan investasi dan perkembangan wilayah, antara lain dapat dilihat dari :

##### 1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan)

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kualitas penduduk diperlihatkan melalui rasio penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 2.89 semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga



keterampilan dan peluang memasuki dunia kerja. Rasio jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan pendidikan pada tahun 2015 menunjukkan daya saing daerah dari segi aspek sumberdaya manusia masih rendah. Rasio lulusan pendidikan penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015 pada tabel 2.89.

Tabel 2.89  
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2015

NO	Uraian	2015
1.	Belum Sekolah	688.649
2.	Jumlah lulusan SD	238.604
3.	Jumlah lulusan SMP	77.540
4.	Jumlah lulusan SMA	74.360
5.	Jumlah lulusan D3	9.323
6.	Jumlah lulusan S1	15.008
7.	Jumlah lulusan S2	881
8.	Jumlah lusan S3	73

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sumenep, Tahun 2015

## 2. Tingkat/ Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan penduduk menggambarkan besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia nonproduktif. Semakin rendah rasio ketergantungan semakin rendah beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sumenep diperlihatkan pada tabel 2.90.

Tabel 2.90  
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Sumenep  
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	-	-	206.593	222.647	223.762
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	-	-	146.470	133.119	134.469
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	-	-	353.063	355.766	358.231



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	-	-	748.858	747.008	746.211
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	-	-	47,15%	47,63%	48,01%

Sumber :BPS Kabupaten Sumenep, Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan yang semakin rendah atau semakin baik. Tahun 2013 rasio ketergantungan sebesar 47,15%sedangkan tahun 2015 naik menjadi 48,01%.

#### 4.1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan reformasi birokrasi atau restrukturisasi kelembagaan sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yaitu meliputi kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2011 Tentang



Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit - unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Kepala Daerah yang terdiri dari :

**1. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah

**2. Asisten Sekretaris Daerah, yaitu :**

**a. Asisten Pemerintahan :**

Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda

Bagian Pemerintahan Desa

Bagian Hukum

**b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :**

Bagian Perekonomian

Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Pembangunan

**c. Asisten Administrasi Umum :**

Bagian Umum

Bagian Organisasi

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

**d. Staf Ahli Bupati, yaitu :**

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

**3. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD dipimpin Sekretaris DPRD yang dibantu dengan 3 Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Rapat dan Risalah serta Kepala Bagian Publikasi.

**4. Dinas Daerah (18 Dinas), terdiri dari :**

a. Dinas Pendidikan

b. Dinas Kesehatan

c. Dinas Sosial



- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- e. Dinas Perhubungan
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika
- g. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- i. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
- j. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan
- n. Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- p. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- q. Dinas Peternakan
- r. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

#### **5. Inspektorat**

#### **6. Badan Daerah (7 Badan),** terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- c. Badan Lingkungan Hidup
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- f. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **7. Kantor Daerah (6 Kantor),** terdiri dari :

- a. Kantor Kebersihan dan Pertamanan
- b. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
- c. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Rumah Sakit Umum Dr. H. Moh. Anwar
- e. Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

#### **8. Kecamatan, Kelurahan dan Desa**

Terdapat 27 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 328 Desa



## 4.2. PERSONALIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penentu keberhasilan terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep pada akhir Tahun 2010 sebanyak 12.278 orang, Tahun 2011 sebanyak 11.958 orang, Tahun 2012 menjadi 11.567 orang Tahun 2013 sebanyak 11.180, Tahun 2014 menjadi 11.141 orang, sedangkan Tahun 2015 menjadi 10.843, dan Tahun 2016 menjadi 10.453 orang

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2**

**Perkembangan Keadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Sumenep  
Berdasarkan golongan, Pendidikan, Eselon, Jenis Kelamin  
Per Desember 2016**

URAIAN	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a. Golongan								
Golongan I	Orang	389	374	261	309	287	236	190
Golongan II	Orang	3.593	3.516	3.479	3.312	3.204	3.005	2.570
Golongan III	Orang	5.283	4.766	4.545	4.451	4.493	4.511	4.577
Golongan IV	Orang	3.013	3.302	3.282	3.108	3.157	3.091	3.116
Jumlah	Orang	12.278	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453
b. Pendidikan								
S-3	Orang	1	1	1	1	1	-	-
S-2	Orang	296	307	298	311	326	334	342
S-1	Orang	3.218	3.379	3.350	3.309	3.463	3.486	4.008
D-III	Orang	824	835	815	793	852	847	818
D-II	Orang	2.570	2.492	2.394	2.321	2.216	2.041	1.521
D-I	Orang	135	122	115	119	83	79	59
SLTA	Orang	4.374	4.017	3.839	3.657	3.575	3.469	3.161
SLTP	Orang	467	440	440	367	320	294	275
SD	Orang	393	365	315	302	305	293	269
Jumlah	Orang	12.278	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453
c. Eselon								
Eselon II	Orang	30	32	32	34	33	36	35



U R A I A N	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eselon III	Orang	186	194	199	207	206	206	188
Eselon IV	Orang	885	932	928	957	955	986	921
Eselon V	Orang	-	38	39	42	42	42	39
Fungsional	Orang	7.309	7.076	6.882	6.853	6.853	6.569	6.348
d. Staf PNS	Orang	3.827	3.686	3.487	3.087	3.052	3.004	2.922
Jumlah	Orang	12.278	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 adalah :

1. Dapat memberikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai sesuai RPJMD tahun 2016-2021 dan terukur kepada Pemerintah Pusat atas pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan evaluasi kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 sehingga akan lebih efektif.
4. Memacu inovasi kinerja dan berkompetisi dalam peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Daerah.

### 4. ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai daerah yang sedang membangun, dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang tidak mungkin lepas dari pengaruh dinamika lingkungan eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu



dipahami bahwa Kabupaten Sumenep tidak mungkin bersikap eksklusif dan sekadar hanya mempertimbangkan dinamika internal lingkungan sosialnya. Apa yang terjadi di tingkat nasional dan bahkan dunia internasional, sedikit-banyak mempengaruhi perkembangan dan efektivitas proses pembangunan yang dikembangkan dalam kurun lima tahun ke depan.

Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2016-2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dengan melalui serangkaian proses. Dimulai dari dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumenep, lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Selanjutnya dilakukan pembobotan melalui konsultasi publik, dihasilkan daftar isu strategis per bidang pemerintahan. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan masukan, aspirasi dan didukung komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, maka visi dan misi yang ditetapkan sebagai acuan dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025 adalah:

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep tahun 2005 – 2025 adalah : “ **SUMENEP YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN MAJU MANDIRI**”. Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak;
2. Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat;
3. Pengembangan fasilitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah dan menjangkau kebutuhan masyarakat;
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan ketrampilan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;



5. Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas;
6. Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan Tahap Ketiga (2015-2020) diarahkan untuk tetap mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pengurangan disparitas atau kesenjangan antara wilayah kepulauan dan daratan. Fasilitas layanan publik dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin dan akuntabel, dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan di dunia internasional.
2. Mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Melengkapi berbagai fasilitas layanan publik dan infrastruktur sosial ekonomi yang dibutuhkan wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan.
4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan bahkan dunia internasional.
5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar merata, terjangkau dan berkualitas, serta dapat diakses masyarakat secara keseluruhan, dan didukung tenaga profesional yang akuntabel.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan konsistensi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan Kabupaten Sumenep dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi



pembangunan Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, visi dan misi yang telah disusun dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan. Secara operasional, visi dan misi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

## 5. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Mengumpulkan data-data kinerja yang relevan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016.
2. Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagai bahan untuk menyusun matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016.
3. Menyusun narasi analisis tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2016 menurut urusan pemerintahan.
4. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2016 dengan capaian kinerja Tahun 2015 dan beberapa tahun terakhir serta menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan (performance gap) yang cukup signifikan.
5. Melakukan pembahasan secara bersama-sama diantara tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 beserta instansi terkait mengenai hasil penyusunan narasi analisis capaian kinerja dan data pendukung capaian kerjanya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran.

Memperhatikan sasaran dalam rencana strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 telah disusun Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021**

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

## 1. VISI

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab



permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah:

### **“SUPER MANTAP”**

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

1. **Sumenep Makin Sejahtera** di sini memiliki dua makna. Pertama, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (resources) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (home industry lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi trend terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai



teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (meaning) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

2. **Pemerintahan yang Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung stakeholders pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak ter subordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (self-help).
3. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan output pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-akhlaqul karimah. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/spirit dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. **Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang



sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5. **Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Good Governance di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (citizen) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (accountable), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.
6. **Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir 'ketimpangan' distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif fifty-fifty, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (need assesment) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan 'manis'nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.
7. **Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan skill dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak.



Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional disini tidaklah berarti mendatangkan 'orang luar' (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

## 2. MISI

Berdasarkan Undang – undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.*** Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah



strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

2. Misi Kedua, **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.** Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.
3. Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam



rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

4. Misi Keempat, **Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.** Tata Pemerintahan yang baik (good governance) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholder baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.



5. Misi Kelima, ***Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.*** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Misi Keenam, ***Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.*** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Disamping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk



meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.3.1.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pengentasan	1. Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	2. Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka  2. Persentase Angka Kemiskinan
<b>Misi 2:</b> Mempercepat	1. Meningkatkan Penyediaan	1. Indeks GINI (GINI Ratio)



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Yang Berkelanjutan	Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah	
	2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<b>Misi 3:</b> Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi	1. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan UMKM Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan	1. % Pertumbuhan ekonomi 2. PDRB per kapita
	2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah	1. Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)
<b>Misi 4:</b> Meningkatkan Kultur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan	1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan	1. Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Akuntabel	Pembangunan	Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah
	3. Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel	1. Nilai Opini BPK
<b>MISI 5:</b> Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman Dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat Serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan	1. Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat	1. % jumlah konflik
<b>Misi 6:</b> Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Serta Nasionalisme Yang Didukung Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga	1. Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep (%)

#### 4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terarah, sehingga visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumenep dapat terwujud. Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang merupakan satu kesatuan perencanaan



yang tidak dapat dipisahkan (tidak parsial), sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan



strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2016-2021).

**Misi Pertama,** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan

1. *Urusan Pendidikan* melalui strategi peningkatan aksesibilitas, integritas dan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan : (1) melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (Wajar Dikdas 9 Tahun); (2) Peningkatan Integritas dan kualitas hasil pendidikan; (3) meningkatkan jumlah sekolah yang terakreditasi.
2. *Urusan Perpustakaan* melalui strategi meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dengan arah kebijakan (1) Optimalisasi fungsi perpustakaan untuk mendukung upaya mencerdaskan masyarakat utamanya kalangan pemuda dan pelajar, serta (2) Optimalisasi layanan perpustakaan daerah maupun perpustakaan keliling.
3. *Urusan Kesehatan* melalui strategi meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dengan arah kebijakan (1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; (2) Meningkatnya mutu dan cakupan jaminan kesehatan; (3) Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat.
4. *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* melalui strategi penguatan akseptor KB dengan arah kebijakan (1) Peningkatan jumlah Akseptor KB; (2) Menurunnya persentase laju pertumbuhan penduduk.
5. *Urusan Ketenagakerjaan* melalui strategi Pertama, Peningkatan akses serta peluang kesempatan kerja dan berusaha dengan arah kebijakan (1) Memperluas akses informasi dan peluang kerja; (2) Menciptakan iklim berusaha yang kondusif; strategi Kedua yaitu Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan arah kebijakan Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja.



6. *Urusan Sosial* melalui strategi Penurunan Jumlah PMKS dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan dasar PMKS bagi masyarakat kurang mampu.
7. *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* melalui strategi, Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan Pemenuhan Hak Anak dengan arah kebijakan : Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Misi Kedua,** Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan.

1. *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* melalui strategi pertama, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum pada wilayah daratan dan kepulauan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pada wilayah daratan dan kepulauan; strategi kedua yaitu meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan arah kebijakan : Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau;
2. *Urusan Perhubungan* melalui strategi meningkatkan ketersediaan kelengkapan fasilitas perhubungan dengan arah kebijakan (1) Pemenuhan fasilitas kelengkapan perhubungan; (2) Meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum;
3. *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* melalui strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan untuk mendukung lingkungan sehat dan nyaman;
4. *Urusan Lingkungan Hidup* melalui strategi pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya lingkungan hidup dengan arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup oleh segenap masyarakat; strategi kedua, pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan arah kebijakan



meningkatkan ketersediaan akan kebutuhan listrik di daerah daratan dan kepulauan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

**Misi Ketiga,** Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

1. *Urusan Koperasi dan UKM*, melalui strategi meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan reaktivasi peran koperasi sejalan dengan pengembangan dunia usaha dengan arah kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM;
2. *Urusan Pariwisata*, melalui strategi mengembangkan dan mempromosikan pariwisata unggulan dengan arah kebijakan mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata daerah;
3. *Urusan Penanaman Modal*, melalui strategi mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru dengan arah kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
4. *Urusan Perindustrian dan Perdagangan*, melalui strategi mengoptimalkan kapasitas industri dan perdagangan yang ada serta mengembangkan potensi usaha baru dengan arah kebijakan (1) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif; (2) Peningkatan jumlah dan kualitas pasar tradisional (pasar tradisional sehat);
5. *Urusan Pertanian*, melalui strategi Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian unggulan (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan) dengan arah kebijakan (1) Penguatan Produksi dan produktivitas komoditi sektor pertanian dalam mendorong tumbuh kembangnya usaha berbasis pertanian; (2) Pengembangan dan pelestarian hutan rakyat dan pengelolaan lahan kritis;
6. *Urusan Kelautan dan Perikanan*, melalui strategi mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan dengan arah kebijakan penguatan dan menumbuh kembangkan usaha perikanan dan kelautan serta budidaya perikanan darat;



7. *Urusan Pangan*, melalui strategi mencukupi kebutuhan pangan daerah dengan gizi yang memadai dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan pangan dan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

**Misi Keempat**, Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

1. *Urusan Perencanaan*, melalui strategi pertama mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu berbasis kepentingan rakyat dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas perencanaan yang bersifat bottom up; strategi kedua yaitu revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor; dan strategi ketiga yaitu peningkatan kinerja aparat pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi desa dengan arah kebijakan Penguatan kelembagaan dan administrasi pemerintahan desa;
2. *Urusan Komunikasi dan Informatika*, melalui strategi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada pengembangan Teknologi Informasi;
3. *Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, melalui strategi meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan arah kebijakan meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
4. *Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*, melalui strategi pertama Pembangunan birokrasi modern sesuai Kebijakan ASN dengan arah kebijakan Membangun dan mengembangkan sistem prosedur dan tata kerja birokrasi sesuai ASN. Strategi kedua yaitu memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kapasitas



sumber daya aparatur. Strategi Ketiga, Pengelolaan sumber-sumber keuangan dan asset daerah secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan auditabel dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan pendapatan asli daerah serta Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah; (2) Meningkatkan kompetensi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

**Misi Kelima,** Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan.

1. *Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,* melalui strategi pertama yaitu terciptanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat melalui arah kebijakan : (1) Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam menghindari konflik dalam kehidupan masyarakat, (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum; strategi kedua adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ;
2. *Urusan Penanggulangan Bencana* melalui strategi meningkatkan penanggulangan bencana daerah dengan arah kebijakan meningkatkan penanganan dan pengendalian bencana daerah.

**Misi Keenam,** Meningkatkan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya serta Nasionalisme yang Didukung Kearifan Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat.

1. *Urusan Kebudayaan,* melalui strategi peningkatan potensi seni dan budaya daerah dengan arah kebijakan pengembangan seni dan pelestarian budaya daerah.
2. *Urusan Pemuda dan Olahraga,* melalui strategi pemberdayaan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan olahraga dengan arah kebijakan pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi kepemudaan dan karang taruna.



## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai program, hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan disebut RKPD di Daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Pemerintah Kabupaten Sumenep telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### MISI 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pengentasan Kemiskinan

### TUJUAN 1.1.

"Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	63,12



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	th	12,85
	2. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	%	79,34
	3. Angka rata-rata lama sekolah	th	6,28
	4. Persentase jumlah sekolah terakreditasi:		
	- Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	%	70,10
	- Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	%	72,20
	- Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	%	71,80
2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1. Jumlah kunjungan perpustakaan	orang	19.500
	2. IKM layanan perpustakaan	%	74,64
3. Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	1. Angka Harapan Hidup	tahun	70,2
	2. Persentase Penduduk yang dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan	%	59
	3. Persentase jumlah puskesmas terakreditasi	%	16,67
4. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kesehatan	1. Rasio Akseptor KB aktif	%	63,07
	2. Persentase Angka pertumbuhan penduduk	%	0,56

### TUJUAN 1.2.

"Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,14



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	1. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,03
	2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial	%	0,32
	3. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	38,06
	4. Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Peserta	3.895

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Persentase Angka Kemiskinan	%	18,90

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah PMKS Yang Ditangani		100.606
	2. Persentase PMKS Yang Ditangani (pemberdayaan PMKS)	%	4,00
3. Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT Dan Anak	%	0,019
	2. Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	%	50,00

## MISI 2

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Yang Berkelanjutan

### TUJUAN 2.1.

"Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah"



INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Indeks GINI (GINI Ratio)		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik:		
	<i>Daratan:</i>		
	- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	69,59
	- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	%	85,79
	- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Ha	6.498
	- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	%	71,54
	<i>Kepulauan:</i>		
	- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	51,82
	- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	%	80,56
	- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Ha	353
- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	%	60,03	
2. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	1. Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,0784
	2. Persentase Kecukupan Angkutan Umum Yang Layak	%	81,35
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	1. Indeks Kota Layak Huni :		
	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	75
	- Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	%	43,7



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
	- Persentase Rumah Layak Huni	%	21
	- Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	15
	- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget Dan Batuan)	%	66
	2. Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik	%	22

### TUJUAN 2.2.

"Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air Sungai		66,67
	2. Indeks Kualitas Udara		72,96
	3. Indeks Tutupan Lahan		73,66
	4. Jumlah Industri/Perusahaan/ Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)		472
2. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup	1. Rasio Elektrifikasi	%	54,47
	2. Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan	%	2,03



### MISI 3

Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi

#### TUJUAN 3.1.

"Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan UMKM Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
% Pertumbuhan Ekonomi	%	6,34
PDRB Per Kapita	Milyar Rp	23.427.15

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	%	2,92
	2. Persentase Pertumbuhan UMKM	%	16
2. Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	15
	2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	7
3. Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	1. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal:		
	- Nilai Investasi PMDN	Rp	408.347.723.437
	- Nilai Investasi PMA	Rp	5.010.000.000
4. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	2. Jumlah Investor	%	4,663
	1. Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB	%	6,22
	2. Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	%	11,50

#### TUJUAN 3.2.

"Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	%	80



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan:		
	- Jumlah Produksi Padi	Ton	219.643,12
	- Jumlah Produksi Jagung	Ton	418.345,68
	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	7.121,03
	- Jumlah Produksi Ubi kayu	Ton	104.387,40
	2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan		
	- Tingkat Produktivitas Padi	ton/ha	6,74
	- Tingkat Produktivitas Jagung	ton/ha	2,96
	- Tingkat Produktivitas Kedelai	ton/ha	1,61
	- Tingkat Produktivitas Ubi kayu	ton/ha	14,87
	3. Persentase Jumlah Produksi Hasil Ternak:		
	<i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>		
	- sapi potong	ekor	356.655
	- Kerbau	ekor	5.068
	- Kuda	ekor	2.162
	- Kambing	ekor	149.426
	- Domba	ekor	38.606
	- ayam buras	ekor	778.684
	- ayam petelur	ekor	321.302
	- ayam pedaging	ekor	115.424
	- Itik	ekor	56.167
	- Mentok	ekor	12.321
	<i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>		
	- Daging	Kg	4.386.096
	- Telur	Kg	2.707.419
	4. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton) :		
	<i>Peningkatan Produksi Perkebunan:</i>		
- Kelapa	Ton	42.643,00	
- Tembakau	Ton	8.852,18	
- cabe jamu	Ton	9.869,28	
- jambu mente	Ton	4.822,84	
- Siwalan	Ton	775,77	



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
	<i>Peningkatan Produksi Kehutanan:</i>		
	- produksi lebah madu	Ton	3,73
	- Kayu	m3	2.594,20
	5. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis		
2. Meningkatkan Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan	1. Produksi Perikanan :		
	- Jumlah hasil perikanan tangkap	Ton	47.100
	- Jumlah hasil perikanan budidaya	ton	610.172
	2. Persentase Jumlah Tingkat pertumbuhan konsumsi ikan	kg/kap/th	40,28
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Persentase Kualitas Gizi Pangan Daerah	%	76
	2. Persentase Daerah Rawan Gizi	%	15

#### MISI 4

Meningkatkan Kultur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel

#### TUJUAN 4.1.

"Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatkan Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	1. Persentase Usulan Desa Dan Kecamatan Yang Terakomodir Di Dokumen Perencanaan	%	22



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan	1. Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	%	55
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	1. Jumlah Desa Sejahtera	desa	27
	2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100

#### TUJUAN 4.2.

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) Terhadap Layanan Publik Daerah	Nilai	79,42

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	1. Jumlah Pengunjung Terhadap Website Instansi Pemerintah Daerah	orang	3.025
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas/ Telah Menikah Memiliki E-KTP	%	85

#### TUJUAN 4.3.

"Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Nilai Opini BPK	Opini	WDP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang	1. Persentase Penempatan ASN Yang Sesuai Dengan Kompetensi	%	85



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Memadai , Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai Dengan Kebutuhan Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	%	87
	3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,20
	4. Nilai Rangking LPPD se-Jawa Timur	Peringkat	34
	5. Nilai Rangking Sakip se-Jawa Timur	Peringkat	58,50
	2. Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD Yang Dihasilkan	Kali
	2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	Naskah	19
3. Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	-2,12
	2. Persentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	%	34,75
	3. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	%	14,85
	4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	70
	5. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	%	82

## MISI 5

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman Dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat Serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan

### TUJUAN 5.1.

"Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat"



INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
% Jumlah Konflik		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial Dan Keagamaan	%	91
	2. Jumlah Demo Besifat Sosial		
2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	1. Angka Kriminalitas	%	16,49
	2. Persentase Penegakan Perda	%	90,00
	3. Persentase Pelanggaran Perda	%	10
	4. Jumlah Korban Bencana	Orang	50
	5. Jumlah Korban Bencana Yang Tertangani	Orang	50

## MISI 6

Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Serta Nasionalisme Yang Didukung Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

### TUJUAN 6.1.

"Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pemberdayaan Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga"

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
1. Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	1. Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	%	8



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TH. 2016
2. Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	1. Persentase Jumlah Pemuda Yang Dibina Sehingga Berprestasi	%	10
	2. Persentase Jumlah Prestasi Atlet Cabang Olahraga Berprestasi		15



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan menjalankan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur dan dapat diukur. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Sesuai amanat Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran predikat nilai capaian kinerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai peringkat sebagai berikut :



No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d < 85	Berhasil
3.	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 55	Kurang Berhasil

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 maupun RKPD Tahun 2016. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya pengukuran realisasi kinerja dan pencapaian kinerja Tahun 2016 ditiap misi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun penilaian tingkat pencapaian kinerja dan pengukuran realisasi kinerja setiap sasaran. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Tingkat Realisasi Positif

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

- b. Rasio Ekonomi

Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan Rencana anggaran belanja, dengan formula :



*Realisasi Anggaran*

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio ekonomi, maka ditentukan peringkat (scoring) :

Rasio Ekonomi	Skor	Kesimpulan
< 90 %	5	Sangat Ekonomis
90 % - 94,99%	4	Ekonomis
95% - 100 %	3	Cukup Ekonomis
100% - 105 %	2	Kurang Ekonomis
> 105 %	1	Tidak Ekonomis

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rasio Ekonomi}}{\text{Capaian Kinerja Keluaran}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari berbagai variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan peringkat nilai sebagai berikut :

Rasio Efisiensi	Skor	Kesimpulan
< 96 %	4	Efisiensi
96 % - 100%	3	Cukup Efisiensi
101% - 105 %	2	Kurang Efisiensi
> 105 %	1	Tidak Efisiensi

**MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

Hasil pengukuran realisasi kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :



TUJUAN 1.1. : MENINGKATKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN SERTA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

**Tabel : 1.1.1  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I**

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1. Indeks Pembangunan Manusia	%	62,66	62,58	99,87	63,12	63,42	100,48	100,60

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan.</b>								
1. Harapan Lama Sekolah	Th	12,40	12,41	100,08	12,85	12,73	99,07	98,99
2. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	%	78,98	78,98	100	79,34	70,00	88,23	88,23
3. Angka rata-rata lama sekolah	Th	5,90	4,89	82,88	6,28	5,08	80,89	97,60
4. Persentase jumlah sekolah terakreditasi:								
- Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	%	60,00	60,00	100	70,10	70,10	100	100
- Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	%	60,25	60,25	100	72,20	72,20	100	100
- Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	%	61,30	61,30	100	71,80	71,80	100	100
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat</b>								
1. Jumlah kunjungan perpustakaan	orang	19.155	19.152	99,98	19.500	27.859	142,87	142,89
2. IKM layanan perpustakaan	%	73,54	-	-	74,64	74,64	100,00	-
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep</b>								
1. Angka Harapan Hidup	tahun	70,42	70,42	100,00	70,2	70,56	100,51	100,51
2. Persentase Penduduk yang dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan	%	57	57	100,00	59	57	96,61	96,61



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
3. Persentase jumlah puskesmas terakreditasi	%	-	-	-	16,67	17	101,98	-
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kesehatan</b>								
1. Rasio Akseptor KB aktif	%	62,07	73,76	118,83	63,07	62,07	98,41	82,82
2. Persentase Angka pertumbuhan penduduk	%	0,56	-	-	0,56	-	-	-

**Tabel : 1.1.2.  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Indeks Pembangunan Manusia	%	63.42	67,8	93.54

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,73	13.75	92.58
	1. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	%	70,00	80,78	86,66
	2. Angka rata-rata lama sekolah	%	5,08	7,13	71.25
	3. Persentase jumlah sekolah terakreditasi:				
	- Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	%	70,10	97,20	72.12
	- Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	%	72,20	93,40	77.30
	- Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	%	71,80	94,20	76.22
2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	1. Jumlah kunjungan perpustakaan	Orang	27.859	21.500	129,58
	2. IKM layanan perpustakaan	%	74,64	80,16	93,11
3. Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56	70,50	100.09



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
	2. Persentase Penduduk yang dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan	%	57	65	87,69
	3. Persentase jumlah puskesmas terakreditasi	%	17	100	17,00
4. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kesehatan	1. Rasio Akseptor KB aktif	%	62,07	67,07	92,55
	2. Persentase Angka pertumbuhan penduduk	%	-	0,56	-

Berdasarkan perbandingan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2015 sebesar 62,38% dan tahun 2016 sebesar 63,42% mengalami peningkatan sebesar 1,04%, adapun kondisi-kondisi mengalami peningkatan ada 4 (empat) sasaran diantaranya :

**Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan**

**1. Indeks Pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekola dan Angka Harapan Lama Sekolah)**

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumenep perbandingan dari tahun 2015 menghasilkan sebesar 12,41% sampai dengan tahun 2016 sebesar 12,73% mengalami kenaikan dan Angka Harapan Lama Sekolah perbandingan dari tahun 2015 menghasilkan sebesar 4,89% sampai dengan tahun 2016 sebesar 5,08%. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya persentase penduduk yang hanya berijazah SD/MI atau yang sederajat yakni 21,60%, tamat dari tingkat SLTP sebesar 7,2 % dan SLTA sebesar 6,73%. Dengan demikian berpengaruh kepada rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sumenep setingkat dengan lulusan SD/MI yaitu 5,63.

**2. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun**

Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pendidikan di suatu daerah (Kabupaten/Kota) serta adanya akses pemerataan layanan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk didalamnya program Keaksaraan Fungsional yang salah satu kegiatannya adalah pemberantasan buta huruf. Target/ garapan warga belajar buta huruf tahun 2016 sebanyak 3.728 warga,



sedangkan garapan buta huruf tahun 2016 mencapai 297.363 warga, capaian kinerja tahun 2016 sebesar 7976,48 % atau diatas target, hal ini di dukung oleh ketersediaan sarana belajar di masyarakat oleh pemerintah cukup tinggi dan juga keterlibatan guru-guru SD serta tokoh masyarakat sebagai tutor sangat efektif dan mendukung, didalam penyelenggaraan pada Kelompok Belajar Masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi tutor sebagai katalisator, motivator dan pembimbing warga belajar. Dukungan pemerintah cukup tinggi juga dalam hal dukungan keuangan untuk pembelajaran keaksaraan Fungsional, dan dari partisipasi masyarakat terlihat dari antusiasnya untuk mengikuti proses belajar mengajar baik Keaksaraan Fungsional maupun Kesetaraan, adanya semangat dan kesadaran dari warga belajar untuk mengikuti program ini secara keseluruhan dan berkesinambungan cukup tinggi. Disamping itu juga adanya kerja sama dengan Organisasi PKK Pemerintah Kabupaten, serta Darma Wanita dan juga dengan Persit Kartika candra kirana, Bayangkari, Nasyatul Aisyiah, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI dan PKBM disetiap kecamatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan di kab. Sumenep, cukup baik dan lancar.

Kesimpulannya adalah semakin besar garapan angka buta huruf yang dicapai berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis/ melek huruf yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang diterima oleh masyarakat.

### **Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan Minat Baca Masyarakat**

#### **1. Jumlah kunjungan perpustakaan**

Capaian indikator indeks Jumlah Kunjungan perpustakaan ditargetkan 19.500 orang pertahun dengan jumlah realisasi 27.859 orang sehingga capaian yang diperoleh 142%. Indek jumlah kunjungan ke perpustakaan terhitung naik dari tahun ketahun menggambarkan keberhasilan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dok Kab sumenep dalam meningkatnya minat baca masyarakat dan pelajar, dengan terpenuhinya target jumlah pengunjung perpustakaan pertahun. Program dan Kegiatan yang mendukung hasil indeks jumlah kunjungan perpustakaan antara lain : 1). Supervisi,



Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, 2). Lomba Minat Baca, 3). Bintek Pengelolaan perpustakaan Pondok pesantren, 4). Promosi Pembangunan.

## **2. IKM layanan perpustakaan**

Capaian indikator IKM Layanan Perpustakaan Capaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan pada tahun 2016 ditargetkan 74.64 dan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan tahun 2016 adalah 74.64. Dengan demikian dapat dikatakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan telah memenuhi target yang ditetapkan capaian 100%, penelitian IKM ini merupakan hasil kerjasama antara Perpustakaan dan Perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa di Kabupaten Sumenep. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan, namun dalam penelitian ini juga menghasilkan antara lain :

- Nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep,
- Tingkat harapan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan,
- Hasil analisis gap/kesenjangan antara persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan di setiap kecamatan kabupaten Sumenep.
- Keberhasilan pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep berkategori Cukup baik karena didukung oleh program dan kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan antara lain: 1). Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, 2). Bintek Pengelolaan perpustakaan Pondok pesantren, 3). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Meningkatnya minat baca masyarakat, dari indikator sasaran (Pelaksanaan Perpustakaan Keliling, Jumlah pengunjung perpustakaan



per-tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah) didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, kegiatannya adalah :
  - Terlaksananya dan terwujudnya Pemahaman sebagai Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa / Ponpes.
  - Peningkatan Minat Baca Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Perpustakaan Desa.
  - Tersedianya bahan pustaka berupa Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - Terlaksananya perpustakaan desa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat desa.
  - Peningkatan pelayanan Perpustakaan Keliling dengan Tersedianya bahan pustaka berupa Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - Terselenggaranya Kegiatan Lomba Minat Baca.
  - Peningkatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatnya Buku / data yang tertata rapi.
  - Terlaksananya Perpustakaan Keliling dan Meningkatnya pemanfaatan koleksi perpustakaan
  - Terselenggaranya pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan Pondok Pesantren, Sekolah dan Desa dalam Pemahaman Pengelola Perpustakaan.
  - Terlaksananya Masyarakat Gemar Membaca melalui promosi pembangunan

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah, dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja Urusan Kearsipan didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
  - Terlaksananya pendataan arsip terhadap 1 SKPD;



- Terlaksananya koordinasi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan 75 unit kerja/SKPD;
- b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
- Terlaksananya sosialisasi terhadap peraturan bidang kearsipan kepada seluruh perangkat daerah;
  - Terlaksananya pembinaan pengelolaan kearsipan kepada lembaga sekolah, 40 SMPN;
  - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kearsipan dengan mengikutsertakan petugas pengelola arsip dalam pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan;
  - Terlaksananya pembinaan teknis pengelolaan arsip dinamis berbasis teknologi informasi dalam kegiatan workshop pengelolaan arsip dinamis yang diikuti seluruh petugas pengelola arsip SKPD;
  - Permasalahan
  - Tertib pengelolaan arsip belum menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan;
  - Belum tersedianya regulasi bidang kearsipan yaitu Peraturan Daerah tentang Kearsipan;
  - Belum tersedianya sarana penyimpanan arsip inaktif dan arsip statis hasil penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumenep yaitu Depo Arsip, sehingga Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah belum melakukan penyimpanan arsip inaktif dan arsip statis hasil penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumenep;
  - Kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis petugas pengelola arsip, sehingga pengelolaan arsip belum bisa dilakukan secara seragam dan baku;
  - Belum ada dukungan dari pimpinan SKPD untuk melakukan tertib pengelolaan arsip di lingkungan SKPD masing-masing, terbukti kondisi arsip inaktifnya tidak teratur.



**Solusi :**

- Urusan kearsipan menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan prioritas dalam merumuskan kebijakan pemerintahan yaitu dengan merumuskan dan menetapkan regulasi yaitu Peraturan Daerah tentang Kearsipan dan peraturan lain di bidang kearsipan;
- Membangun Depo Arsip sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan arsip statis;
- Secara berkelanjutan melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan kepada seluruh unit kerja;
- Perlu penambahan wawasan pengetahuan bidang kearsipan kepada seluruh PNS.
- Penambahan SDM kearsipan sehingga pengelolaan kearsipan bisa dilakukan lebih baik.

**Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep**

**1. Angka Harapan Hidup**

Tingkat keberhasilan dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Masyarakat, pada tahun 2015 angka harapan hidup Kabupaten Sumenep mencapai 70,42 tahun, dan tahun 2016 mencapai 70,56 tahun. Hal ini menunjukkan masyarakat di Kabupaten Sumenep semakin sehat, semakin panjang usia harapan hidupnya, ada beberapa hal yang menunjang meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep adalah turunnya angka kematian bayi, turunnya angka kematian ibu, meningkatnya pola hidup sehat, pengelolaan tempat tinggal yang sehat, penyakit degeneratif dan pengelolaan tingkat stress yang baik.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, PMT Posyandu Lansia menunjang keberhasilan pencapaian indikator yaitu: Angka Usia Harapan Hidup, UHH (Usia Harapan Hidup).



## **2. Persentase Penduduk Yang Dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan**

Jumlah penduduk yang diindungi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Tahun 2016 untuk Kabupaten Sumenep sebanyak 545.481 orang dengan persentase 57%. Dengan capaian kinerja sebesar 99,63%. Jumlah penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional telah memenuhi target 2016 sebesar 547.481 orang. Masyarakat yang telah terdata dalam program JKN ini merupakan masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan sebelumnya, semisal Jamkesmas dan kalangan PNS dan TNI/Polri. Sementara, yang belum masuk dalam daftar program JKN kebanyakan merupakan kelompok masyarakat yang tidak mengikuti program JKN atau masyarakat kelas menengah keatas.

## **3. Persentase Jumlah Puskesmas Terakreditasi**

Persentase Jumlah puskesmas yang terakreditasi untuk Tahun 2016 sebesar 17%. yaitu sebanyak 5 Puskesmas yang sudah terakreditasi dari 30 Puskesmas di Kabupaten Sumenep. Akreditasi puskesmas dilakukan secara bertahap untuk tahun 2017 akan dilakukan 17 puskesmas yang akan dilakukan akreditasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas agar lebih baik sehingga derajat kesehatan masyarakat kabupaten Sumenep akan meningkat.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Evaluasi Kinerja Puskesmas, Penyusunan ISO Puskesmas, Akreditasi puskesmas dan Pembentukan Puskesmas BLUD menunjang keberhasilan pencapaian indikator yaitu:

- ✓ Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk
- ✓ Rasio Rumah sakit per satuan penduduk
- ✓ Rasio dokter per satuan penduduk
- ✓ Rasio tenaga medis per penduduk

### **Sasaran 1.1.4 : Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kesehatan**

#### **1. Rasio Akseptor KB aktif**

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Sumenep cukup mengembirakan dengan TFR sebesar 1,57. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Sumenep mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga



sebanyak 1-2 anak. Masyarakat Kabupaten Sumenep saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 sebanyak 146.410 peserta dari 235.223 pasangan usia subur. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2015-2016 masing-masing adalah 62,07% dan 62,24%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rasio Akseptor KB di Kabupaten Sumenep Tahun 2016

No.	Uraian	2015	2016
1	Jumlah PUS	202.894	235.223
2	Jumlah Peserta KB(Jumlah Akseptor KB)	125.936	146.410
3	Jumlah Tidak Ber-KB	76.96	88.813
4	Rasio Akseptor KB	62,07	62,24

Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2016 sebesar 63,07 % maka capaian kinerjanya adalah 98,68% atau dengan predikat Baik dari realisasi sebesar 62,24%, dan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan sebesar 0.17 % terhadap Jumlah Peserta KB ( Jumlah Akseptor KB).

TUJUAN 1.2. : MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEBAGAI BENTUK UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

**Tabel : 1.2.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II**

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,17	100	3,14	3,13	100,32	100,32



INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
2. Persentase Angka Kemiskinan	%	19,68	20,20	97,43	18,90	20,09	94,08	96,56

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha</b>								
1. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,96	73,94	99,97	74,03	74,25	100,30	100,32
2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial	%	0,35	0,53	151,43	0,32	0,35	109,38	72,23
3. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	37,66	9,13	24,24	38,06	40,95	107,59	443,81
4. Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan	Peserta	3.367	3.657	108,61	3.895	5026	129,04	118,81
<b>Sasaran 2 : Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>								
1. Jumlah PMKS	Orang	85.606	-	-	100.606	44.818	44,55	-
2. Persentase PMKS Yang Ditangani (pemberdayaan PMKS)	%	3,88	-	-	4,00	23,67	591,75	-
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender</b>								
1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT Dan Anak	%	0,089	-	-	0,019	0,020	105,26	-
2. Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	%	50,00	-	-	50,00	51,43	102,86	-

**Tabel : 1.2.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13	3,02	96,49



INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
2. Persentase Angka Kemiskinan	%	20,09	16,10	80,14

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	1. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,25	74,24	100,01
	2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial	%	0,35	0,20	175,00
	3. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	40,95	39,66	103,25
	4. Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenaga Kerjaan	Peserta	5.026	4.405	114,10
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah PMKS	Orang	44.818	100.606	44,55
	2. Persentase PMKS Yang Ditangani (pemberdayaan PMKS)	%	23,67	4,40	537,95
3. Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT Dan Anak	%	0,020	0,028	71,43
	2. Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	%	51,43	60,81	84,57

Berdasarkan perbandingan perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Angka Kemiskinan pada tabel diatas : (1.2.1), adapun kondisi-kondisi mengalami peningkatan ada 3 (tiga) sasaran diantaranya :

**Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha**

**1. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja**

Indikator capaian kinerja ini sebesar 99,99% sangat berhasil, dengan formula dari target tingkat partisipasi yang ditetapkan sebesar 74,25% atau jumlah angkatan kerja sebanyak 635.746 orang dibagi 856.275 orang penduduk usia



kerja, dengan realisasi kinerja 74,25% atau 635.746 orang angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja 856.275 orang.

## **2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial**

Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan Hubungan Industrial, capaian kinerja indikator ini sebesar 109,38% sangat berhasil, dengan formula dari target yang ditetapkan sebesar 0,32% atau 16 kasus dari tahun dasar 2010 sebanyak 550 perusahaan dengan realisasi kinerja 0,35% atau 2 kasus dari jumlah perusahaan sebanyak 565 pada tahun 2016. Keberhasilan tersebut diperoleh dari seringnya pembinaan dan sosialisasi terhadap pekerja/buruh dan pengusaha dalam bentuk kegiatan Bipartit dan Tripartit terhadap pengusaha dan pekerja/buruh.

## **3. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan**

Indikator capaian kinerja ini sebesar 80,37% kurang berhasil, dengan formula dari target Pencari Kerja yang mendaftar sebesar 50,95% atau 232 pencari dibagi dengan realisasi sebesar 40,95% atau 95 orang pencari yang ditempatkan.

## **4. Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan**

Indikator capaian kinerja ini sebesar 129,04% sangat berhasil, dari target kinerja Tahun 2016 Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3.895 peserta, teralisasi Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 5.026 peserta.

## **Sasaran 1.2.2 : Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

### **1. Jumlah PMKS**

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibantu dalam satu tahun. Pada tahun 2016 target kinerja untuk indikator jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 100.606 orang dengan realisasi sebanyak 44.818 orang sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 44,55%.



Tidak tercapainya target tahun 2016 disebabkan adanya pengurangan anggaran belanja secara total yang berakibat berkurangnya alokasi pemberian bantuan sosial.

## **2. Persentase PMKS Yang Ditangani (pemberdayaan PMKS)**

Indikator ini menggambarkan prosentase PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, target kinerja untuk indikator prosentase PMKS yang ditangani sebesar 4,00%. Dengan jumlah PMKS sebanyak 186.555 orang dan jumlah PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial tahun 2016 sebanyak 44.158 orang sehingga prosentase realisasi sebesar 23,67% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 591,75%.

Keberhasilan mencapai target tahun 2016 disebabkan perubahan metode pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial yang diharapkan mempercepat proses pengentasan PMKS.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin, Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan Keluarga Miskin, Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh, Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM), Perlindungan Sosial pada Komunitas Masyarakat Desa Terpencil, Pemberdayaan Keluarga Rentan, Pelatihan Keterampilan Pertukangan bagi Keluarga Miskin, dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial ekonomi.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia, Penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP), Bantuan Pemulangan Orang Terlantar, Rehabilitasi



- Sosial Gelandangan Psikotik, dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis.
- c. Program Pembinaan Anak Terlantar. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain Pembinaan dan Bantuan Kesejahteraan Anak dan Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Terlantar/Jalanan dan Anak Berkebutuhan Khusus.
  - d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain Rehabilitasi dan Penyantunan Penyandang Cacat dan Rehabilitasi dan Penyantunan Eks Penyandang Penyakit Kronis (Kusta).
  - e. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain Pendistribusian Bantuan bagi Anak Yatim dan Pemantapan Manajemen Yayasan / Panti.
  - f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain Rehabilitasi Tuna Sosial.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2016 tergolong sangat baik.

### **Sasaran 1.2.3 : Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender**

#### **1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT Dan Anak**

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak untuk mendukung indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), kegiatan Sosialisasi Penanganan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan Kreativitas dan Inovasi Pengembangan Mental Anak, kegiatan Workshop Penganggaran Pengarusutamaan Gender dan Anak, dan kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender

#### **2. Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan**

Dari program dan kegiatan tersebut diatas telah mendukung terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender serta



menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengetahui seberapa banyak jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.



**MISI II : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

Hasil pengukuran realisasi kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 2.1. : MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN TRANSPORTASI DI DARATAN DAN WILAYAH KEPULAUAN SEBAGAI BENTUK UPAYA MENURUNKAN DISPARITAS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ANTAR WILAYAH**

**Tabel : 2.1.1.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi</b>								
1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik:								
<i>Daratan:</i>								
- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	68,04	-	-	69,59	60,74	87,28	-
- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	%	84,83	-	-	85,79	80,99	94,40	-
- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Ha	6.458	-	-	6.498	6.515	100,26	-
- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	%	70,00	-	-	71,54	72,26	101,01	-
<i>Kepulauan:</i>								
- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	50,20	-	-	51,82	38,31	73,93	-
- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	%	79,31	-	-	80,56	78,20	97,07	-



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Ha	298	-	-	353	353	100,00	-
- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	%	60	-	-	60,03	48,3	80,46	-
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi</b>								
1. Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,0794	-	-	0,0784	0,0780	99,49	-
2. Persentase Kecukupan Angkutan Umum Yang Layak	%	80,15	-	-	81,35	72,14	88,68	-
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai</b>								
1. Indeks Kota Layak Huni :								
- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	70	-	-	75	67	89,33	-
- Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	%	40,2	-	-	43,7	43,7	100,00	-
- Persentase Rumah Layak Huni	%	20	-	-	21	20	95,24	-
- Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	20	-	-	15	20,27	135,13	-
- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget Dan Batuan)	%	65	-	-	66	66	100,00	-
2. Persentase Tersedianya Luasan Publik RTH	%	17	-	-	22	15,55	70,68	-

**Tabel : 2.1.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik:				



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
	<i>Daratan:</i>				
	- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	60,74	73,74	82,37
	- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	%	80,99	89,66	90,33
	- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Ha	6.515	6.638	98,15
	- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	%	72,26	77,70	93,00
	<i>Kepulauan:</i>				
	- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	38,31	55,61	68,89
	- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	%	78,20	84,21	92,86
	- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Ha	353	353	100,00
	- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	%	48,3	60,15	80,30
2. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	1. Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,0780	0,0744	104,84
	2. Persentase Kecukupan Angkutan Umum Yang Layak	%	72,14	86,15	83,74
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	1. Indeks Kota Layak Huni :				
	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	67	100	67,00
	- Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	%	43,7	57,7	75,74
	- Persentase Rumah Layak Huni	%	20	25	80,00
	- Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	20,27	0	#DIV/0!
	- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget Dan Batuan)	%	66	70	94,29



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
	2. Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik	%	15,55	42	37,02

TUJUAN 2.2. : MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

**Tabel : 2.2.1.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan</b>								
1. Indeks Kualitas Air Sungai		63,33	-	-	66,67	63,33	94,99	-
2. Indeks Kualitas Udara		71,03	-	-	72,96	72,96	100,00	-
3. Indeks Tutupan Lahan		73,24	-	-	73,66	73,64	99,97	-
4. Jumlah Industri/Perusahaan/ Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)		422	-	-	472	525	111,23	-
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup</b>								
1. Rasio Elektrifikasi	%	52,47	52,47	100,00	54,47	52,47	96,33	96,33
2. Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan	%	2,02	2,02	100,00	2,03	1,35	66,50	66,50

**Tabel : 2.2.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air Sungai		63,33	70,00	90,47
	2. Indeks Kualitas Udara		72,96	79,17	92,16
	3. Indeks Tutupan Lahan		73,64	75,58	97,43



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
	4. Jumlah Industri/Perusahaan/Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)		525	672	78,13
2. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup	1. Rasio Elektrifikasi	%	52,47	62,47	83,99
	2. Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan	%	1,35	2,07	65,22

Penjelasan analisis dan evaluasi capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 2.1. : MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN TRANSPORTASI DI DARATAN DAN WILAYAH KEPULAUAN SEBAGAI BENTUK UPAYA MENURUNKAN DISPARITAS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ANTAR WILAYAH**

**Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi**

**1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik:**

- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik**

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas jalan yang tersedia di wilayah Kabupaten Sumenep baik yang terdapat di wilayah daratan dan kepulauan.

Jumlah Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah sepanjang 874,936 km. Untuk jalan kondisi rusak ringan sepanjang 271,092 km dan jalan dengan kondisi rusak berat adalah 396,331 km. Kemudian total Panjang jalan keseluruhan adalah 1.542.359

Hanya saja Terdapat perbedaan antara jumlah total jalan yang tercatat pada tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena perbaikan data pengukuran panjang jalan melalui survey



ulang dan koreksi atas ruas jalan yang layak dijadikan jalan kabupaten terkait Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 188/474/KEP/435.013/2015 Tahun 2015.

Adapun pada tahun 2016 Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik secara total 812,979 km. wilayah daratan berubah menjadi sepanjang 601,392 km atau 60,74% dan untuk wilayah kepulauan 211,587 km atau 38,31%. Kondisi jalan baik tersebut berkurang di tahun sebelumnya karena ada kegiatan pada jalan-jalan luar ruas jalan kabupaten.

Indikator ini dapat berhasil dikarenakan kondisi jalan baik walaupun mengalami sedikit penurunan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada jalan-jalan desa yang tidak tercantum pada ruas jalan kabupaten sehingga tidak dapat dicatat sebagai penambahan jalan dengan kondisi baik.

- **Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tersedianya Jembatan yang memudahkan masyarakat perindividu dalam melakukan perjalanan transportasi sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat sumenep dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan kemajuan. Adapun untuk Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun 2016 di wilayah daratan adalah 219,46 m atau 80,99% dan kepulauan 270,95 m atau 78,20% dari jumlah jembatan yang ada secara keseluruhan yaitu 2.490m.

Perbandingan Capaian kinerja dari Tahun 2015 dengan Tahun 2016 untuk tahun 2015 indikator ini juga tidak diurai secara rinci baik yang terdapat diwilayah daratan maupun kepulauan hanya saja dibahas secara umum dan ditahun 2016 capaian kinerja kondisi Jembatan diwilayah daratan adalah 94,40% sedangkan untuk capaian kinerja wilayah kepulauan adalah 97,07%. sehingga jumlah Capaian Indikator-Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan rata-rata sebesar 95,74% (Sangat Berhasil).



Persentase Jembatan dalam kondisi baik terdiri dari Persentase Jembatan dalam kondisi baik diwilayah daratan dan Persentase jembatan dalam kondisi baik diwilayah kepulauan. Untuk wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 90,87% dapat terealisasi pada tahun 2016 sebesar 80,99%. Dengan capaian kinerja 112,19%.

Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 85,37% dapat terealisasi pada tahun 2016 sebesar 78,20% dengan capaian kinerja 109,16%.

Indikator ini sangat berhasil dikarenakan pada dasarnya jembatan-jembatan yang ada baik di daratan maupun kepulauan mendapat pembangunan atau pemeliharaan apabila mengalami kerusakan sehingga target yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan.

**Tabel : 2.1.1.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS		ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1		2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kebutuhan pemenuhan Infrastruktur Jalan.</b>					
<b>1.1.</b>	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik :					
	<i>Wilayah Daratan</i>	<b>55.114.655.415</b>	<b>43.439.807.672</b>	<b>78,81</b>	<b>87,28</b>	<b>90,29</b>
1	Peningkatan Jalan	17.950.043.970	14.856.478.820	82,76		
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.077.253.825,00	4.367.152.950,00	86,01		
3	Pemeliharaan Jalan & Jembatan DAK	32.087.357.620,00	24.216.175.902,00	75,46		
	<i>Wilayah Kepulauan</i>	<b>18.645.256.450</b>	<b>13.661.038.050</b>	<b>73,26</b>	<b>73,93</b>	<b>99,09</b>
1	Peningkatan Jalan	10.406.511.450	6.989.338.300	67,16		
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.887.745.000,00	1.780.651.000,00	94,32		
3	Pemeliharaan Jalan & Jembatan DAK	6.351.000.000,00	4.891.048.750,00	77,01		
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kebutuhan Pemenuhan Infrastruktur Jalan.</b>					
<b>1.1.</b>	Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik :					



SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
Wilayah Daratan	<b>2.663.950.000</b>	<b>2.072.554.000</b>			
Pembangunan Jembatan	2.398.025.000	1.953.008.000	<b>81,44</b>	<b>94,4</b>	<b>86,27</b>
Wilayah Kepulauan					
Pembangunan Jembatan	265.925.000	119.546.000	44,95	<b>97,07</b>	<b>46,30</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa penyerapan anggaran dari seluruh kegiatan yang ada di Wilayah Daratan yaitu Pembangunan Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK dianggarkan sebesar Rp.55.114.655.415 dapat terealisasi sebesar Rp.43.439.807.672 atau 78,81 % termasuk kategori “Sangat Ekonomis” dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran, maka hasil Rasio Efisiensinya adalah 90,29% atau termasuk kategori “Cukup Efesien”

Kemudian untuk wilayah kepulauan dari aloksi dana sebesar Rp.18.645.256.450 dapat terealisasi Rp.13.661.038.050 atau 73,26% dan termasuk kategori “Sangat Ekonomis”. Dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran maka hasilnya adalah 90,29% atau termasuk kategori “Cukup Efesien”

Adapun indikator Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik diwilayah daratan adalah Program pembangunan jembatan dengan kegiatan pembangunan jembatan yang di alokasikan dana sebesar Rp.2.398.025.000 dan terrealisasi sebesar Rp.1.953.008.000 atau 81,44% dan termasuk kategori “Sangat Ekonomis” dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran maka hasilnya adalah 86,27% atau termasuk kategori “Kurang Efesien”

Sedangkan untuk wilayah kepulauan di alokasikan dana sebesar Rp.265.925.000 dan terealisasi sebesar Rp.119.546.000 atau 97,07% atau termasuk kategori “Cukup Ekonomis” dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran maka hasilnya adalah 46,30% atau termasuk kategori “Kurang Efesiensi”



Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan

1.1. Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan. Indikator ini dapat berhasil dikarenakan kondisi jalan baik walaupun mengalami sedikit penurunan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada jalan-jalan desa yang tidak tercantum pada ruas jalan kabupaten sehingga tidak dapat dicatat sebagai penambahan jalan dengan kondisi baik.

1.2. Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Wilayah Daratan da Wilayah Kepulauan. Indikator ini sangat berhasil dikarenakan pada dasarnya jembatan-jembatan yang ada baik didaratan maupun kepulauan mendapat pembangunan atau pemeliharaan apabila mengalami kerusakan sehingga target yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan.

• **Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)**

Rasio kecukupan irigasi (Daratan dan Kepulauan)

Rasio Kecukupan irigasi di Daratan pada Tahun 2016 mencapai 72,26% dari target 71,54% sehingga pencapaian kinerja sebesar 101,01%. Adapun realisasi pembangunan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 di daratan yaitu :

- Saluran Primer : 295,79 m
- Saluran Sekunder : 7.127,45 m
- Saluran Tersier : 8.835,87 m

Adapun untuk Rasio Kecukupan irigasi di Kepulauan pada Tahun 2016 mencapai 48,30% dari target 48,46% sehingga pencapaian kinerja sebesar 99,67%. Adapun realisasi pembangunan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 di Kepulauan yaitu :

- Saluran Primer : - m
- Saluran Sekunder : - m
- Saluran Tersier : 534 m



Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator panjang saluran irigasi dalam kondisi baik ini adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumber/Irigasi Pedesaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Yang Telah dibangun
- Infrastruktur Keirigasian
- Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pengairan
- Intensif Infrastruktur Keirigasian
- **Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)**

Luas daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis, peningkatan kecukupan irigasi akan berbanding lurus dengan luas irigasi kabupaten yang dapat diairi dengan irigasi teknis. Dengan peningkatan rasio menjadi 72,60% (Daratan) dan 48,30% (Kepulauan) membuat Luas daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis pada tahun 2016 juga naik dari 6.498 Ha menjadi 6.515 Ha (daratan) dan untuk kepulauan tetap terjaga seluas 353 Ha.

### **Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi**

#### **1. Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Persentase korban kecelakaan lalu lintas merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi terhadap jumlah kendaraan bermotor. Dimana kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2016 adalah 118 kali sedangkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat adalah 151.333 unit. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 0.0780%.

Pada tahun 2016 tingkat kecelakaan lalu lintas sebanyak 118 kejadian dan mengalami kenaikan sebanyak 3 kejadian bila dibandingkan dengan kecelakaan Tahun 2015 sebanyak 115 kejadian. Namun sudah mencapai 100% target. Untuk menurunkan tingkat kecelakan perlu adanya



kegiatan kampanye tertib lalu lintas bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta perbaikan fasilitas keselamatan (rambu, apil, marka, dll)

## **2. Persentase Kecukupan Angkutan Umum Yang Layak**

Persentase kecukupan angkutan umum yang layak merupakan perbandingan antara jumlah angkutan umum yang lulus uji kelaikan terhadap jumlah angkutan umum yang wajib uji kelaikan. Dimana jumlah angkutan umum yang lulus uji kelaikan adalah 101 unit sedangkan jumlah angkutan umum yang wajib uji kelaikan adalah 140 unit. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 72.14%.

Pada Tahun 2016 angkutan umum yang layak (lulus uji kelaikan) baru mencapai 101 unit dari 140 kendaraan wajib uji. Dari data tersebut 19 unit diantaranya tidak lulus uji kelaikan dan 20 unit kendaraan wajib uji belum melaksanakan uji berkala.

Sebagaimana lampiran tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, hampir semua program/ kegiatan terlaksana dengan baik. Sehingga rata-rata capaian kinerjanya 95.12%. Dan serapan anggaran rata-rata kegiatan sebesar 92.05%. Namun bila dibandingkan antara jumlah total anggaran dan serapan anggaran total hanya mencapai 68.66%. Hal ini dikarenakan ada 6 (enam) kegiatan yang tidak terealisasi 100% yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional. Dari rencana Pengadaan 3 Unit Sepeda Motor hanya terealisasi 2 Unit. Hal ini dikarenakan sampai akhir tahun anggaran, pemesanan kendaraan dengan sistem E-Catalog belum ada jawaban dari pihak penyedia (dealer). Sehingga serapan anggarannya mencapai Rp. 45.952.500,- atau 74,34% dari Alokasi Anggaran Rp. 61.812.500,-
2. Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Bandara Trunojoyo. Dari beberapa bidang tanah yang rencananya akan dibebaskan, terdapat sebidang tanah yang masih bermasalah dengan hukum. Sehingga proses pembebasan tanah untuk peningkatan bandara tidak dapat dilanjutkan hingga permasalahan hukum tersebut selesai. Serapan anggarannya hanya mencapai Rp. 83.664.970,- atau 0,73% dari alokasi anggaran Rp. 11.437.000.000,-



3. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal. Dari 7 Orang yang direncanakan mengikuti diklat formal, tidak ada yang terkirim. Hal ini dikarenakan tidak ada penawaran diklat yang sesuai kebutuhan. Sehingga serapan anggarannya hanya mencapai Rp. 934.750,- atau 3,57 % dari alokasi anggaran Rp. 26.184.750,-
4. Kegiatan Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau. Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan adanya perubahan anggaran (PAK) yang terlalu dekat dengan akhir tahun anggaran sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Serapan anggarannya mencapai Rp. 14.904.250,- atau 23.30% dari alokasi anggaran Rp. 63.969.750,-
5. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Bandara / Terminal. Dari 2 paket pekerjaan yang direncanakan, yaitu : Pembebasan Lahan untuk kepentingan sarana umum dan Pemangkasan Lahan dan Perkerasan Airstrip, tidak terlaksana 100%. Hal ini dikarenakan proses pengajuan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan belum turun sesuai dengan surat pengajuan Bapak Sekda Kabupaten Sumenep tertanggal 3 Juni 2016 Nomor 503/815/435.011/2016 perihal permohonan penetapan lokasi Bandara Trunojoyo Kabupaten Sumenep. Sehingga dilakukan PAK untuk mengalihkan anggaran yang ada untuk kegiatan lain. Serapan Anggarannya mencapai Rp. 50.698.400,- atau 37.18% dari alokasi anggaran setelah PAK sebesar Rp. 80.707.500,-
6. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan. Dari 16 Paket pekerjaan, hanya 14 paket yang terlaksana 100%. Hal ini dikarenakan 2 paket Pekerjaan tidak terealisasi disebabkan penyelesaian pekerjaannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. sehingga rekanan pelaksana dikenakan pinalti putus kontrak dan masuk dalam daftar hitam (Black List). Serapan Anggarannya mencapai Rp. 4.009.823.348,- atau 89.24% dari alokasi anggaran Rp. 4.493.497.100,-  
Besarnya alokasi anggaran yang tidak terserap dari beberapa kegiatan diatas sangat berpengaruh terhadap serapan keseluruhan anggaran di Dinas Perhubungan Kab. Sumenep yang hanya mencapai Rp. 33.402.724.263,- atau 68.66% dari alokasi anggaran Rp. 48.650.192.247,-



## **Sasaran 2.1.3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai**

### **1. Indeks Kota Layak Huni :**

- **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**  
Rumah tinggalbersanitasi pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 75% dan dapat memenuhi target yang ditentukan dengan hasil realisasi sebanyak 67%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,97, dengan dukungan melalui kegiatan : Program Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan perdesaan.Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.
- **Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih**  
Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 73%, dengan hasil realisasi sebesar 68%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,41.  
Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 73%, dengan hasil realisasi sebanyak 68%. Capaian ini kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, dengan dukungan kegiatan : 1) Instalasi Air Minum/bersih. Tercapainya target pada indikator ini dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan serta anggaran dana yang disediakan mencukupi.
- **Persentase Rumah Layak Huni**  
Capaian tahun terakhir indikator Persentase rumah layak huni Nihil disebabkan karena Kegiatan Dana Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2016.
- **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**  
Capaian tahun terakhir indikator Lingkungan pemukiman kumuh 50%, untuk mencapai target 43% dan terealisasi 20,27%. Jika



dibandingkan dengan capaian tahun 2015, Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,44.

Capaian tahun terakhir indikator Lingkungan pemukiman kumuh 47% didukung Kegiatan antara lain : 1)Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan, untuk mencapai target 43% dan terealisasi 20,27% menunjang keberhasilan pada indikator ini. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 106,83%.

- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget Dan Batuan)

Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget Dan Batuan).

Persentase cakupan pelayanan kebersihan dan persampahan di 3 Kecamatan (Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Batuan) pada tahun 2016, tercapai sebanyak 66% dari target RPJMD 2016 sebesar 66%, sehingga pencapaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan alat-alat kebersihan.

Dalam mendukung pencapaian Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan, yang merupakan kinerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumenep, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah, dimana kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik itu pengadaan sarana dan prasarana ataupun pemeliharaan sarana dan prasarannya.



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain : Peningkatan Kebersihan Lingkungan, serta Pemeliharaan Alat-alat Kebersihan, dimana dana dari kegiatan-kegiatan ini dialokasikan untuk pembayaran gaji Petugas Kebersihan (Pasukan Kuning) dan pemeliharaan alat-alat kebersihan.

Dapat disimpulkan, bahwa seluruh program dan kegiatan tersebut, dalam pencapaian kinerja Tahun 2016 tergolong Sangat Baik.

## 2. Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik

Pada tahun 2016 Luasan RTH Publik(Kawasan Perkotaan) mencapai 15,55% (89,84 Ha) dari target sebesar 22% sedangkan tahun 2015 telah mencapai luasan 365,03 Ha. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 329,36. Hal tersebut disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumenep khususnya di Kawasan Perkotaan, serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di lapangan melalui kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2016 tergolong sangat berhasil.

**Tabel : 2.1.3.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMI	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>1. Indeks Kota Layak Huni :</b>	<b>2.456.510.800,00</b>	<b>2.237.140.700,00</b>	<b>89,8</b>	<b>104,93%</b>	<b>85,58%</b>
- <b>Persentase Rumah tinggal bersanitasi</b>					
Kegiatan:					
1. Dana Operasional Kegiatan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan	181.300.000,00	163.649.200,00	90,26		
2. Pembuatan Limbah Domestik (MCK/MWK) Kawasan Perdesaan	230.028.500,00	228.648.500,00	99,40		
3. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	79.495.000,00	65.495.000,00	82,39		
- <b>Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih</b>					
Kegiatan:					



INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMI	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	21.500.000,00	21.012.500,00	97,73		
2. Instalasi Air Minum/bersih	1.904.737.300,00	1.727.435.500,00	90,69		
3. AP. Pengadaan Sarana Air Minum	39.450.000,00	30.900.000,00	78,33		
- <b>Persentase rumah layak huni</b>					
Kegiatan:					
1.					
- <b>Persentase lingkungan pemukiman kumuh</b>					
Kegiatan					
1.					
<b>2. Persentase tersedianya luasan RTH publik</b>	<b>605.382.500,00</b>	<b>588.312.500,00</b>	<b>97,18</b>	<b>70,68%</b>	<b>137,49%</b>
Kegiatan:					
1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	605.382.500,00	588.312.500,00	97,18		

TUJUAN 2.2. : MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

**Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan**

### 1. Indeks Kualitas Air Sungai

Indeks Kualitas Air tahun 2016 adalah 63,33, nilai ini masih dibawah dari target yang ditetapkan yaitu 66,67 sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,99%. Indikator ini tidak berhasil karena ada di dua titik sungai yang dilakukan pengujian kadar BOD dan COD masih tinggi, sehingga status mutu sungainya tergolong pada tercemar ringan. Hal ini disebabkan dari limbah domestik yang masih dibuang langsung ke badan air.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya pengadaan 1 unit Mesin Pencacah Sampah Organik, 1 unit Mesin Pencacah Sampah Anorganik, 2 unit Mesin Pengering



Sampah, 3 unit Sepeda Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah, 1 unit Sepeda Motor Roda Tiga Tangki Air, 65 unit Gerobak Sampah yang diberikan kepada daerah titik pantau penilaian adipura, 100 unit Komposter yang diberikan kepada daerah titik pantau penilaian adipura, 15 unit Timbangan sampah yang diberikan kepada Bank Sampah Pendukung, 1 paket Rehabilitasi toilet Bank Sampah Sumekar, 1 unit TPST di Desa bangkal, dan 5 unit Bank Sampah di desa Kebunan, Marengan dan Kebunagung, dengan anggaran sebesar Rp. 1.321.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.281.071.500

b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan 1 unit Depo dan 1 unit Bank sampah dengan Anggaran sebesar Rp. 63.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.955.550

c. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya koordinasi tim penilaian Adipura dalam rangka meningkatkan score penilaian Adipura. Anggaran sebesar Rp. 336.379.500 dengan realisasi sebesar Rp. 336.364.966

d. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya pengawasan terhadap pelaku kegiatan/usaha dalam rangka penegakan hukum lingkungan sehingga dapat terinventarisir ketertiban pelaku kegiatan/usaha dalam hal penegakan hukum lingkungan. Anggaran sebesar Rp. 75.00.000 dengan realisasi sebesar Rp. 74.999.150

e. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terwujudnya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Daerah tentang ijin



lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 120.328.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.033.450

f. Koordinasi Penyusunan AMDAL

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya survey lokasi kegiatan/usaha yang wajib susun DPPL dan laporan informasi kegiatan/usaha yang wajib susun DPPL serta pembahasan Dokumen. Anggaran sebesar Rp. 299.060.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 297.264.000

g. Pembuatan IPAL (Instalasi IPAL UKM dan Puskesmas)

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya Pembuatan 10 unit IPAL UKM yaitu Batik Melati , Canteng Koneng , Batik Barokah, Ud. Tahu Nikmat, Ud. Berkat Usaha, Rumah Kita Wash, Family Car Wash, Fresh Mobile, Rph. H. Junaidi, Rm. Karaton dengan Anggaran sebesar Rp.1.203.515.000 dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 1.199.115.150.

h. Pengelolaan Limbah

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya pengadaan 1 paket IPAL dan Saluran Limbah Ternak Hewan terpadu di Kecamatan Bluto. Anggaran sebesar Rp. 285.404.000 dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 268.340.600.

i. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Pencapaian Kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan pengadaan 8 unit mesin pecacah sampah organik, 6 unit papan himbauan, 8 unit Rumah Kompos, yaitu di SMPN I Bluto, SMPN I Gapura, SMPN Saronggi, SMON I Dasuk, Desa Pakamban, Desa Bangkal, Desa Kalianget Barat, Desa batang-batang Laok, dan 1 paket Jogging Track di Desa Kebunagung Anggaran sebesar Rp. 1.133.044.700 dengan realisasi sebesar Rp. 1.109.991.780.

## 2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara tahun 2016 adalah 72,96 dan sesuai dengan yang ditargetkan sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Pengujian



kualitas udara dilakukan di 3 titik lokasi pengukuran yaitu Perum Bumi Sumekar Asri, Jalan Trunojoyo dan Perum Pondok Mutiara. Dari hasil pengukuran parameter kualitas udara dihasilkan nilai kualitas yang berada diatas baku mutu sehingga kualitas udara masih tergolong baik. Pencapaian target pada tahun 2016 disebabkan oleh masih banyaknya pohon-pohon peneduh sebagai penyerap polutan udara.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium dan IPAL

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan operasional Pengelolaan Laboratorium Lingkungan dan IPAL selama 1 Tahun dengan bahan operasional pengujian laboratorium, In house training serta pemeliharaan alat laboratorium dan pengadaan alat laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 271.324.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.957.304.

b. Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan.

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat. Anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 24.940.550

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas LH

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan dengan Anggaran sebesar Rp. 481.513.600 dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 473.195.900

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi.

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya Pengadaan 1 paket Mesin Penggerak Pencacah sampah dan 1 Paket perlengkapan Mesin Penggerak Pencacah sampah, 50 unit tong sampah pemilah 4 bilik dan 1 paket pembuatan Pengolahan Gas Methana di TPA Batuan. Anggaran



sebesar Rp. 536.752.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 533.222.990

### 3. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan tahun 2016 adalah 73,64 dengan target kinerja adalah 73,66 dengan capaian kinerja sebesar 99,97%. Pencapaian target pada tahun 2016 dilakukan dengan melakukan penambahan luas areal tutupan lahan dengan penanaman pohon yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi yaitu pohon mangrove seluas 8 Ha, Penanaman pohon keras di pinggir jalan dengan luas 1,55 Ha, sehingga total penambahan tutupan lahan seluas 9,55 Ha.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Program Adiwiyata

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya koordinasi tim penilai Adiwiyata dalam rangka meningkatkan score penilaian Program Adiwiyata dan juga pengadaan 2.500 batang bibit Jeruk, 2.500 batang bibit Mangga, 550 sak pupuk organik, dan 250 unit tanaman hias dan pot. Anggaran sebesar Rp. 295.847.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.961.450

b. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya pengujian kualitas 30 sampel Tanah di 3 Kecamatan yaitu Manding, Dasuk dan Pasongsongan. Anggaran sebesar Rp. 72.798.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.476.050.

c. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

Pencapaian Kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan pengadaan 6 paket sumur resapan di sekolah adiwiyata, Desa Pamolokan, Paberasan, Kebunan, Kalimook, Bangkal, dan pembuatan 1 paket taman Hijau di Desa Pabian Kecamatan Kota



Sumenep. Anggaran sebesar Rp. 848.890.000 dengan realisasi sebesar Rp. 845.063.500

d. Penataan RTH

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terwujudnya Pengadaan dan Penanaman 525 pohon Bintaro, 540 pohon Trembesi, 525 pohon Tanjung, 500 pohon tabebuya, 500 pohon Mangga, 505 pohon Rambutan di Kecamatan Kota Sumenep dan Pengadaan dan Pemasangan 28 unit papan Hibauan. Anggaran sebesar Rp. 531.310.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 528.862.690

e. Koordinasi Program Menuju Indonesia Hijau

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dan rencana dengan terlaksananya kegiatan koordinasi menuju indonesia hijau sebanyak 6 exemplar. Anggaran sebesar Rp. 91.109.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.174.700

f. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pencapaian kegiatan ini mencapai 100% dari rencana dengan terlaksananya penanaman bibit mangrove di Kecamatan Ra'as sebanyak 40.000 bibit, Transplantasi Terumbu Karang sebanyak 1000 substrat di Kecamatan Talango, 1000 substrat di Kecamatan Giligenteng. Anggaran sebesar Rp. 595.271.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 576.855.800.

**4. Jumlah Industri/Perusahaan/ Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)**

Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang membuat dokumen lingkungan(SPPL/UKL-UPL/Amdal) sampai dengan tahun 2016 ditargetkan 472 perusahaan/badan usaha dengan realisasi capaian sebanyak 525 perusahaan/badan usaha, Sehingga hasil capaian kinerja melebihi dari target atau sebesar 111,22%.



## **Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup**

### **1. Rasio Elektrifikasi**

Pada Tahun 2016 belum ada peningkatan terhadap pemenuhan rumah tangga yang menikmati listrik. Pada Tahun 2015 pemenuhan yang menikmati listrik sebesar 240 KK. dari jumlah pemenuhan rumah tangga yang belum menikmati listrik sebesar 45.500 KK. Maka capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 96,32% dari realisasi Tahun 2016 sebesar 52,47% sedangkan yang ditargetkan Tahun 2016 sebesar 54,47%.

Penurunan keberhasilan dikarenakan alokasi anggaran pada Tahun 2016 berkurang, namun realisasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu dibangunnya PJU PLTS yang meliputi 2 Desa di Kepulauan serta di daerah terpencil, solusi yang akan dilakukan adalah penambahan alokasi anggaran kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya daerah terpencil dan kepulauan guna menikmati penerangan listrik.

### **2. Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan**

Pada tahun 2016 target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 2,02% dari anggaran kegiatan Operasional Pembinaan Energi Pedesaan Tahun 2015 sebesar Rp. 4.432.272.155,00 yang dilokasikan pada pemanfaatan energi terbarukan pembinaan energi pedesaan sebesar 33 desa, jumlah pemenuhan listrik sebesar 240 KK jadi realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 1,14% dari jumlah pemenuhan kebutuhan listrik yang sudah terliasi sebesar 273 KK., jadi capaian kinerja sebesar 56,16%.

Penurunan keberhasilan dikarenakan penurunan alokasi anggaran pada tahun 2016, namun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan yaitu Biogas yang dilaksanakan pada 2 desa di daratan di daerah terpencil yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga kebutuhan energi bagi masyarakat dapat terpenuhi.



**Tabel : 2.2.2.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rasio Ekonomi	Capaian Kinerja Keluaran	Rasio Efisiensi
1.	<b>Rasio Elektrifikasi</b>	<b>3.485.933.428</b>	<b>3.278.352.150</b>	<b>94,05</b>	<b>96,33</b>	<b>97,94</b>
2.	<b>Jumlah desa yang menikmati listrik</b>	3.485.933.428	3.278.352.150	94,05	100	94,05
	Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan	3.354.609.178	3.149.780.825	93,8	100	93,8
	Operasional Pembinaan Energi Pedesaan	131.324.250	128.571.325	97,9	100	97,9
3.	<b>Persentase Pemanfaatan sumber Daya Alam Terbarukan</b>	<b>131.324.250</b>	<b>128.571.325</b>	<b>97,90</b>	<b>66,50</b>	<b>149,94</b>
	Operasional Pembinaan Energi Pedesaan	131.324.250	128.571.325	97,9	100	97,9
4.	<b>Jumlah desa yang dibangun : PJU PLTS</b>	<b>3.354.609.178</b>	<b>3.149.780.825</b>	<b>93,89</b>	<b>100</b>	<b>93,89</b>
	Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan	3.354.609.178	3.149.780.825	93,89	100	93,89
5.	<b>Jumlah Desa yang menikmati air bersih</b>	<b>501.018.750</b>	<b>497.309.049</b>	<b>99,19</b>	100	99,19
	Operasional Pembinaan Eksplorasi Air Tanah / Air Bawah Tanah	501.018.750	497.309.049	99,19	100	99,19
6.	<b>Jumlah Data Community Development</b>	<b>105.753.250</b>	<b>105.158.300</b>	<b>99,44</b>	<b>100</b>	<b>99,44</b>
	Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Community Development	105.753.250	105.158.300	99,44	100	99,44

Untuk mendukung capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Ratio Elektrifikasi

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan ini untuk mencapai indikator program kerja pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 100%, pencapaian ini didasarkan pada target lokasi yang dijadikan sasaran kegiatan untuk mendapatkan listrik. diantaranya bantuan Genset silent 2.200 rpm/100 KVA, 50 KVA, 25 KVA, 15 KVA, 10 KVA, dengan jumlah 7 Unit , Jaringan listrik 8 lokasi, PJU PLTS 2 lokasi, sehingga diperoleh



hasil tingkat capaian sasaran adalah baik, bertambahnya desa yang mendapatkan listrik didukung kegiatan antara lain Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan meliputi study Inventarisasi Listrik khususnya kepulauan.

Program Pembinaan Explorasi Air Tanah / Air Bawah Tanah ini untuk mencapai indikator meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah sulit air pada program kerja pemanfaatan sumber daya air mineral diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 100 %.Pencapaian ini didasarkan target tersedianya sarana kebutuhan air di daerah sulit air . Dari 4 lokasi yang direncanakan telah terpenuhi 4 lokasi. Yaitu : Tersedianya Air Bersih/air minum melalui sumur bor,pembuatan jaringan air bersih kerumah-rumah penduduk,sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi .Hal ini berarti capaian sasaran adalah baik.didukung kegiatan antara lain Operasional Pembinaan Explorasi Air Tanah di Daerah Sulit air meliputi kegiatan sosialisasi tentang penggunaan mesin dan pengelolaan air bersih kepada Pokmas atau Hipam yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan guna mencapai sasaran yang diinginkan adalah : Peningkatan Pengelolaan potensi SDA wilayah kepulauan serta menjamin kelestarian lingkungan hidup,dengan alokasi kegiatan pada program pembinaan bidang ketenagalistrikan di daratan serta kepulauan , dan meningkatkan Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahunn 2016 tergolong memuaskan/sangat baik.

## **2. Persentase Pemanfaatan sumber Daya Alam Terbarukan**

Indikator Jumlah desa yang menikmati listrik di daerah terpencil dan kepulauan tahun 2016 mengalami penurunan dan kenaikan capaian kinerja secara signifikan. Program kegiatan yang dilaksanakan operasional pembinaan energi pedesaan yaitu pemanfaatan instalasi Biogas.



**MISI III : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI**

Hasil pengukuran realisasi kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 3.1. : MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI, KUALITAS KELEMBAGAAN UMKM KOPERASI DAN PENGEMBANGAN WISATA DAERAH SERTA MENINGKATKAN KINERJA PENANAMAN MODAL/ INVESTASI DAERAH, INDUSTRI PERDAGANGAN**

**Tabel : 3.1.1.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM</b>								
1. Persentase Koperasi Sehat	%	-	2,9	-	2,92	3,08	105,48	-
2. Persentase Pertumbuhan UMKM	%	-	15	-	16	5	31,25	-
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata</b>								
1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	13	13,08	100,62	15	12,04	80,27	79,78
2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	6	15	250,00	7	36	514,29	205,71
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)</b>								
1. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal:								
- Nilai Investasi PMDN	Rp	396.069.566.864	-	-	408.347.723.437	484.888.472.384	118,74	-
- Nilai Investasi PMA	Rp	-	5.000.000.000	-	5.010.000.000	-	-	-
2. Jumlah Investor	%	4,239	-	-	4,663	4,090	87,71	-
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar</b>								
1. Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB	%	-	5,16	-	6,22	-	-	-



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
2. Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	%	-	10,45	-	11,50	-	-	-

**Tabel : 3.1.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	%	3,08	3	102,66
	2. Persentase Pertumbuhan UMKM	%	5	20	25
2. Meningkatkan Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	12,04	15	80,27
	2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	36	11	327,27
3. Meningkatkan Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	1. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal:				
	- Nilai Investasi PMDN	Rp	484.888.472.384	465.381.741.065	104,19
	- Nilai Investasi PMA	Rp	-	5.030.150.602	-
	2. Jumlah Investor	%	4,090	6,827	59,91
4. Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	1. Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB	%	-	6,41	-
	2. Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	%	-	13,84	-

TUJUAN 3.2. : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH

**Tabel : 3.2.1.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)</b>								
1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan :								
- Jumlah Produksi Padi	ton	216.498,00	240.829	111,24	219.643,12	273.618	124,57	111,99
- Jumlah Produksi	ton	405.809,00	439.495	108,30	418.345,68	428.081	102,33	94,48



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
Jagung								
Jumlah Produksi Kedelai	ton	7.006,00	7.532	107,51	7.121,03	6.049	84,95	79,01
- Jumlah Produksi Ubi kayu	ton	103.678,00	103.187	99,53	104.387,40	41.096	39,37	39,56
2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan								
- Tingkat Produktivitas Padi	ton/ha	6,71	7,25	108,05	6,74	6,70	99,41	92,00
- Tingkat Produktivitas Jagung	ton/ha	2,9	3,11	107,07	2,96	2,90	97,97	91,50
- Tingkat Produktivitas Kedelai	ton/ha	1,6	1,72	107,50	1,61	1,61	100,00	93,02
- Tingkat Produktivitas Ubi kayu	ton/ha	14,79	15,20	102,77	14,87	10,04	67,52	65,70
3. Persentase Jumlah Produksi Hasil Ternak:								
<i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>								
- sapi potong	ekor	353.124	353.124	100,00	356.655	357.422	100,22	100,22
- Kerbau	ekor	5.043	-	-	5.068	5.051	99,66	-
- Kuda	ekor	2.151	-	-	2.162	2.158	99,81	-
- Kambing	ekor	148.683	148.683	100,00	149.426	150.156	100,49	100,49
- Domba	ekor	38.414	38.414	100,00	38.606	38.961	100,92	100,92
- ayam buras	ekor	776.742	776.742	100,00	778.684	779.546	100,11	100,11
- ayam petelur	ekor	319.703	319.703	100,00	321.302	322.250	100,30	100,30
- ayam pedaging	ekor	114.850	114.850	100,00	115.424	116.850	101,24	101,24
- Itik	ekor	56.027	56.027	100,00	56.167	56.731	101,00	101,00
- Mentok	ekor	12.290	-	-	12.321	12.381	100,49	-
4. <i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>								
- Jumlah Produksi daging	kg	4.342.669	4.342.449	99,99	4.386.096	4.399.785	100,31	100,32
- Jumlah Produksi Telur	kg	2.680.613	2.680.613	100,00	2.707.419	2.766.542	102,18	102,18
5. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton) :								
<i>Peningkatan Produksi Perkebunan:</i>								
- Kelapa	ton	42.442,92	42.442,92	100,00	42.643,00	43075,74	101,01	101,01
- Tembakau	ton	9.244,92	9.244,92	100,00	8.852,18	2380,8	26,90	26,90
- cabe jamu	ton	9.868,69	9.868,69	100,00	9.869,28	9995,35	101,28	101,28
- jambu mente	ton	4.974,31	4.974,31	100,00	4.822,84	4966,93	102,99	102,99
- Siwalan	ton	744,37	744,37	100,00	775,77	739,51	95,33	95,33
<i>Peningkatan Produksi Kehutanan:</i>								
- produksi lebah madu	ton	3,73	3,73	100,10	3,73	3,89	104,40	104,30



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
- Kayu	m3	2.594,20	2594,2	100,00	2.594,20	2.594,20	100,00	100,00
6. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis								
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan</b>								
1. Produksi Perikanan :								
- Jumlah hasil perikanan tangkap	ton	46.739,50	46.739,50	100,00	47.100	46.980,30	99,75	99,75
- Jumlah hasil perikanan budidaya	ton	600.792,99	1.200.146,99	199,76	610.172	1.191.966	195,35	97,79
2. Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	39,88	39,88	100,00	40,28	40	99,30	99,30
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</b>								
1. Persentase Kualitas Gizi Pangan Daerah	%	-	-	-	76	76	100,00	-
2. Persentase Daerah Rawan Gizi	%	-	-	-	15	15	100,00	-

**Tabel : 3.2.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan :				
	- Jumlah Produksi Padi	ton	273.618	237.525,12	115,20
	- Jumlah Produksi Jagung	ton	428.081	450.684,29	94,98
	Jumlah Produksi Kedelai	ton	6.049	7.891,95	76,65
	- Jumlah Produksi Ubi kayu	ton	41.096	107.029,60	38,40
	2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan				
	- Tingkat Produktivitas Padi	ton/ha	6,70	6,88	97,38
	- Tingkat Produktivitas Jagung	ton/ha	2,90	3,01	96,35
	- Tingkat Produktivitas Kedelai	ton/ha	1,61	1,65	97,58
	- Tingkat Produktivitas Ubi kayu	ton/ha	10,04	15,16	66,23
3. Persentase Jumlah Produksi Hasil Ternak:					



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
	<i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>				
	- sapi potong	ekor	357.422	371.137	96,30
	- Kerbau	ekor	5.051	5.170	97,70
	- Kuda	ekor	2.158	2.205	97,87
	- Kambing	ekor	150.156	152.437	98,50
	- Domba	ekor	38.961	39.384	98,93
	- ayam buras	ekor	779.546	786.500	99,12
	- ayam petelur	ekor	322.250	327.776	98,31
	- ayam pedaging	ekor	116.850	117.750	99,24
	- Itik	ekor	56.731	56.731	100,00
	- Mentok	ekor	12.381	12.444	99,49
	4. <i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>				
	- Jumlah Produksi daging	kg	4.399.785	4.564.189	96,40
	- Jumlah Produksi Telur	kg	2.766.542	2.817.351	98,20
	5. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton) :				
	<i>Peningkatan Produksi Perkebunan:</i>				
	- Kelapa	ton	43075,74	42.663,92	100,97
	- Tembakau	ton	2380,8	9.242,28	25,76
	- cabe jamu	ton	9995,35	9.868,15	101,29
	- jambu mente	ton	4966,93	4.822,31	103,00
	- Siwalan	ton	739,51	776,37	95,25
	<i>Peningkatan Produksi Kehutanan:</i>				
	- produksi lebah madu	ton	3,89	3,73	104,40
	- Kayu	m3	2.594,20	2.594,20	100,00
	6. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis				
2. Meningkatnya Ekonomi Pemanfaatan Daya Laut Berkelanjutan	Manfaat Melalui Sumber Yang				
	1. Produksi Perikanan :				
	- Jumlah hasil perikanan tangkap	ton	46.980,30	49.000	95,88
	- Jumlah hasil perikanan budidaya	ton	1.191.966	666.675	178,79
	2. Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	40	41,92	95,42
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah					
	1. Persentase Kualitas Gizi Pangan Daerah	%	76	84	90,48
	2. Persentase Daerah Rawan Gizi	%	15	9	166,67



Penjelasan analisis dan evaluasi capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 3.1. : MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI, KUALITAS KELEMBAGAAN UMKM KOPERASI DAN PENGEMBANGAN WISATA DAERAH SERTA MENINGKATKAN KINERJA PENANAMAN MODAL/ INVESTASI DAERAH, INDUSTRI PERDAGANGAN**

**Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM**

### **1. Persentase Koperasi Sehat**

Indikator ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi. Persentase Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) sehat pada tahun 2016 sebanyak 18 atau 3,087% dari jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang aktif di kabupaten Sumenep sebanyak 583 sedangkan target Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang sehat mencapai 2,92%. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) sehat meningkat dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang pembinaan, pengembangan Koperasi Simpan Pinjam / USP Koperasi. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan pada Koperasi Berprestasi, Temu Koordinasi SDM Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Anggota Koperasi Melalui Wirausaha Pemula, Bimbingan Teknis Perpajakan Perkoperasian bagi Pengurus Koperasi.

### **2. Persentase Pertumbuhan UMKM**

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada tahun 2016 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan target 16% dan teralisasi 5% atau capaian kinerjanya 31,25%, menurunnya target pada tahun 2016 dikarenakan Rencana target yang terlalu tinggi dan juga di pengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku yang membuat sebagian usaha mikro dan kecil kurang memproduksi/ tidak memproduksi bahkan gulung tikar. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah



mengupayakan Program dan Kegiatan untuk menunjang para pelaku UKM melalui kegiatan : Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, Validasi Data UMKM, Peningkatan Kapasitas Produksi UMKM melalui Layanan Klinik KUMKM, Pelatihan Singkat (Short Course) Melalui Klinik Koperasi dan UKM, Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Pengolahan Roti/Kue, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Alat Pengolahan Roti dan Kue, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Meubiler dan Ukir, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Peralatan Meuliler dan Ukir, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Menjahit, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Mesin Jahit, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Tata Rias Pengantin, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Alat Rias Pengantin, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Sablon, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Alat Sablon, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Bordir, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Mesin Bordir, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di Bidang Ukir Kaca, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil



Tembakau dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Peralatan Ukir Kaca, Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dibidang Pengolahan Kerupuk Ikan, Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan.

### **Sasaran 3.1.2 : Meningkatkan Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata**

#### **1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD**

Berdasarkan target PAD Tahun 2016 sebesar Rp. 2.060.890.615.358,00 realisasi PAD sebesar Rp. 2.059.258.724.489,75 peningkatan sebesar 99,92%. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD mengalami peningkatan dari target kontribusi Tahun 2016 sebesar Rp. 280.000.000,00 realisasi kontribusi sebesar 313.703.000,00 persentase peningkatan sebesar 112,04% ada peningkatan sebesar 15% dari Tahun 2015, peningkatan sektor pariwisata terhadap PAD masih memberikan kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata, Pemeliharaan Obyek Wisata Pantai Slopeng dan Lombang, Perawatan dan Pemeliharaan Museum Keraton, Peningkatan Sarana Obyek Wisata Kabupaten Sumenep, Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Wisata, Seni dan Budaya.

#### **2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Indikator prosentase jumlah kunjungan wisatawan mengalami keberhasilan yang besar dari target kunjungan wisatawan Tahun 2016 sebesar 7% atau sebanyak 628.000 orang teralisasi kunjungan wisatawan sebesar 36% atau • Dari jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 798.000 orang yang terbagi antara lain 797.000 orang wisnus dan 1.000 orang wisman, terealisasi sebanyak 855.946 orang terdiri dari 854.614 orang wisnus dan 1.332



orang wisman. Peningkatan disebabkan penambahan jumlah lokasi wisata yang dikunjungi wisatawan dari 13 lokasi menjadi 20 lokasi.

### **Sasaran 3.1.3 : Meningkatkan Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)**

Pada Indikator Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian dan tidak memenuhi target pencapaian kinerja, sebagai berikut :

#### **1. Jumlah Nilai PMDN Tahun Berkenaan**

Pencapaian kinerja “Jumlah nilai investasi PMDN” mencapai 118,74%, hal ini dikategorikan Sangat Berhasil karena melebihi target pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja ini disebabkan karena :

- 1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik,
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan semakin tinggi.
- 3) Tingkat kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumenep semakin tinggi.
- 4) Adanya komitmen yang tinggi pada pemangku kebijakan untuk menerapkan kepastian hukum yang akuntabel.
- 5) Kesadaran masyarakat guna membangun daerahnya semakin tinggi dengan aktif memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **2. Jumlah nilai investasi Asing (PMA)**

Pencapaian kinerja “nilai investasi PMA” mencapai 0,00%, karena kegiatan ini merupakan kegiatan baru dan direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Fokus potensi yang bisa ditawarkan kepada investor PMA adalah potensi pariwisata yang islami dan sumber daya alam (bahan tambang). Solusi yang akan diterapkan pada Tahun 2017 yaitu

- 1) Adanya analisa akademik tentang potensi investasi.
- 2) Penyediaan fasilitas yang lengkap dalam menunjang operasional pelaksanaan penanaman modal.



- 3) Melakukan promosi yang intensif melalui media pameran, media cetak dan media elektronik.
- 4) Adanya komitmen yang tinggi pada pemangku kebijakan untuk menerapkan kepastian hukum yang akuntabel.
- 5) Peningkatan kualitas aparatur dalam pelayanan terkait kemahiran berbahasa (inggris atau bahasa asing lainnya), keahlian berkomunikasi dan berwawasan yang luas.

### 3. Jumlah Investor

Pencapaian kinerja “Jumlah investor” sebesar 87,71% atau sebanyak 4.090 investor dari target 4.663 investor. Pencapaian kinerja ini dikategorikan Sangat Berhasil, namun kurang dari target yang telah ditentukan, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkrit lagi, yaitu

- 1) Mengembangkan software perizinan yang telah ada.
- 2) Penambahan waktu pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian.
- 3) Lebih maksimal dalam mengumpulkan data potensi investasi secara analisa akademik.

**Tabel : 3.1.3.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMI	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
<b>Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal:</b>	<b>51.990.500</b>	<b>51.590.500</b>	<b>99,23%</b>	<b>118,74%</b>	<b>118,74%</b>
- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)				118,74%	
<b>Jumlah Investor</b>				<b>87,71</b>	
Kegiatan :					
- Penyusunan Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep	30.000.000	29.600.000			
- Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	21.990.500	21.990.500			

Capaian Rasio ekonomi Tahun 2016 dan alokasi anggaran untuk membiayai sasaran strategis sebesar Rp. 628.666.934,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 616.435.900,- dengan prosentase penyerapan sebesar 98,05% dengan katagori CUKUP EKONOMIS dan selanjutnya untuk Capaian



Rasio Efisiensi Tahun 2016 dari penyerapan sebesar 98,05% dibagi capaian kinerja keluaran dari sasaran strategis sebesar 100,45% maka capaian Rasio Efisiensi diperoleh nilai sebesar 97,61%, dengan hasil katagori CUKUP EFESIENSI.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja : - Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal  
- Nilai Investasi PMDN  
- Nilai Investasi PMA  
- Jumlah Investor

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, adalah :

- 1) Penyusunan Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep, jumlah anggaran Rp. 29.600.000,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
  - Memberikan informasi data profil, tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga masyarakat paham dalam mengurus ijin usahanya.
  - Adanya dukungan kerjasama yang baik dari instansi terkait dalam ikut menyebarkan informasi data profil, tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), jumlah anggaran Rp. 21.990.500,-, memberikan andil dalam keberhasilan pencapaian kinerja, karena :
  - Dalam SPIPISE ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pengurusan izin prinsip.
  - Kehandalan aparatur yang mengoperasikan SPIPISE.
  - Tersedianya kelengkapan hardware dan software yang memadai.



**Sasaran 3.1.4 : Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar**

**1. Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB**

Persentase pertumbuhan industrinya Indikator ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan jumlah Kelompok Pengrajin, menengah dan kerajinan. Persentase Pertumbuhan Industri adalah jumlah industri tahun yang ditargetkan di kurangi jumlah industri tahun realisasi, hasilnya dibagi jumlah industri tahun yang ditargetkan lalu dikalikan seratus persen. Dari masing-masing tahun di targetkan 50 pertumbuhan Industri.

Pada tahun 2016 realisasi Pertumbuhan Industri sebesar 33.117 dengan persentase 0,16%. atau mencapai 106,67% dari targetnya sebesar 0,15%.

**2. Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB**

Indikator ini mengukur volume perdagangan mengalami pergerakan yang hampir mencapai target persentase volume perdagangan adalah jumlah volume perdagangan tahun yang ditargetkan di bagi jumlah volume perdagangan tahun realisasi, lalu dikalikan seratus persen.

Pada tahun 2016 realisasi volume perdagangan sebesar 2,288,787.8 targetnya sebesar 2,390,431.2. Realisasi dibagi target dikalikan seratus persen mencapai hasil 95,75%.

TUJUAN 3.2. : MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI, KUALITAS KELEMBAGAAN UMKM KOPERASI DAN PENGEMBANGAN WISATA DAERAH SERTA MENINGKATKAN KINERJA PENANAMAN MODAL/INVESTASI DAERAH, INDUSTRI PERDAGANGAN

**Sasaran 3.2.1 : Meningkatkan Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)**

**1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan :**

Berdasar tabel 3.2.1. dapat digambarkan capaian kinerja untuk produksi padi ditargetkan sebesar 219.643 ton dan dicapai 273.618 ton (124,57%),



Jagung ditargetkan sebesar 418.346 ton dicapai 428.081 ton (102,33%), Kedelai ditargetkan sebesar 7.121 ton dicapai 6.049 ton (84,94%) dan Ubi kayu ditargetkan sebesar 104.387 ton dicapai sebesar 41.096 ton (39,37%).

## **2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan**

Produktivitas Tanaman Pangan pada Tahun 2016 ini mempunyai kecenderungan (trend) meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas padi dari target 6,74 ton/ha terealisasi sebesar 6,70 ton/ha atau telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,41%. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena petani sudah mulai berangsur-angsur menyadari terhadap penggunaan mekanisasi alat pertanian (pra dan pasca panen), penerapan aplikasi teknologi budidaya anjuran (transformasi teknologi), perbaikan pola tanam, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta adanya kenaikan indeks pertanaman (IP) di lahan sawah maupun tegal yang didukung dengan adanya intensitas curah hujan yang optimal. Selain hal tersebut, Tanaman Padi mengalami kenaikan luas areal secara vertikal pada tanaman kedua (habis panen dapat langsung tanam lagi) karena faktor ketersediaan air (intensitas curah hujan tinggi dan dampak dari adanya pembangunan/rehab jaringan irigasi sehingga ketersediaan air cukup).

Pada Komoditas Tanaman Jagung dan Kedelai juga dapat dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu untuk Jagung sebesar 97,80% , Kedelai 100,00%. Selanjutnya, untuk ubi kayu telah tercapai target 100%.

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:



**Tabel : 3.2.1.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran 1</b>					
<b>Jumlah Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan</b>	<b>30,832,858,599</b>	<b>30,535,243,235</b>	<b>99.03</b>	<b>131.93</b>	<b>75.07</b>
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	45,250,000	43,162,500			
Pengembangan Diversifikasi Tanaman	64,836,500	59,646,000			
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	89,913,500	89,238,000			
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	97,623,000	97,164,500			
Operasional Identifikasi dan Perumusan Program dan Kegiatan	121,020,000	95,892,382			
Perencanaan dan Monitoring Prasaranan dan Sarana Pertanian	367,396,000	365,945,000			
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	76,696,000	76,696,000			
Fasilitasi dan Monitoring Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	79,604,000	79,604,000			
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	50,000,000	49,886,550			
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	150,000,000	149,614,600			
Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)	29,085,519,599	28,830,540,153			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	220,000,000	219,062,300			
Pameran Potensi Produk Pertanian	100,000,000	99,625,000			
Penanganan Pasca Panen Jagung Sistem Resi Gudang	239,750,000	236,036,350			
Pengawasan Kawasan Agropolitan	25,250,000	23,329,900			
Analisis Usaha Tani dan Pasar Hasil Pertanian	20,000,000	19,800,000			

Dalam hal penjelasan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut :



1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman, Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya, Kegiatan Operasional Identifikasi dan Perumusan Program dan Kegiatan, Kegiatan Perencanaan dan Monitoring Prasarana dan Sarana Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Loan WISMP-2), dan Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah dan Pengembangan lumbung pangan.
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dan Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan.
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK), Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengembangan Agribisnis, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Kegiatan Gelar Produk Aneka Pangan Olahan, Kegiatan Pameran Potensi Produk Pertanian, Kegiatan Penanganan Pasca Panen Jagung Sistem Resi Gudang, Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kegiatan Analisis Usahatani dan Pasar Hasil Pertanian.

Dari keempat program dan kegiatan tersebut di atas telah mendukung Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar yaitu :

- Padi sebesar 6,70 ton/ha dari target sebesar 6,74;
- Jagung sebesar 2,90 dari target 2,96;



- Kedelai sebesar 1,61 dari target 1,61;

Serta Pengembangan dan Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian yaitu :

- Hand traktor sebanyak 3 unit dari target 0 unit;
- Jalan usaha tani (JUT) sebanyak 93 unit dari target 30 unit;
- Jalan produksi sebanyak 16 unit dari target 10 unit;
- Rumah pompa sebanyak 159 unit dari target 80 unit;
- Dam parit sebanyak 48 dari target sebanyak 48.

Jumlah kelompok tani/ wirausaha yang mempunyai produk olahan unggulan pertanian, yaitu :

- Wirausaha muda sebanyak 20 dari target sebanyak 20;

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana Alsintan (pasca-panen) yang dimiliki petani (unit) :

- Alat pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 dari target sebanyak 20 unit;
- Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 1 unit dari target sebanyak 1 unit.
- Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2016 tergolong Memuaskan.

### **3. Persentase Jumlah Produksi Hasil Ternak:**

#### **a. Sapi Potong**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak sapi potong di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 356.655 ekor sapi potong dengan realisasi sebesar 357.422 ekor sapi potong dengan capaian realisasi kinerja 100,22%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya banyak faktor salah satunya karena Dinas Peternakan berhasil dalam menjaga kestabilan populasi ternak sapi potong atau dapat meningkatkan populasi sapi potong. Hal ini merupakan suatu keberhasilan kinerja.

#### **b. Kerbau**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak kerbau di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 5.068 ekor kerbau dengan realisasi sebesar 5.051 ekor kerbau dengan capaian



realisasi kinerja 99.66%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya banyak faktor salah satunya karena Dinas Peternakan berhasil dalam menjaga kestabilan populasi ternak kerbau atau dapat meningkatkan populasi kerbau. Hal ini merupakan suatu keberhasilan kinerja.

c. Kuda

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak kuda di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 2.162 ekor kuda dengan realisasi sebesar 2.158 ekor kuda dengan capaian realisasi kinerja 99.81%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya banyak faktor salah satunya karena Dinas Peternakan berhasil dalam menjaga kestabilan populasi ternak kuda atau dapat meningkatkan populasi kuda. Hal ini merupakan suatu keberhasilan kinerja.

d. Kambing

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak kambing di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 149.426 ekor kambing dengan realisasi sebesar 150.156 ekor kambing dengan capaian realisasi kinerja 100.49%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya banyak faktor salah satunya karena Dinas Peternakan mampu memberikan penyuluhan, pendampingan kepada peternak kambing sehingga dapat meningkatkan populasi kambing.

e. Domba

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak domba di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 38.606 ekor domba dengan realisasi sebesar 38.961 ekor domba dengan capaian realisasi kinerja 100.92%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena Dinas Peternakan mampu mendukung peternak untuk terus berkarya, berprestasi dalam mengkreasikan



ternaknya, karena domba merupakan salah satu ternak yang ikut kontes ternak sehingga populasi domba dapat terus ditingkatkan.

f. Ayam Buras

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ternak ayam buras di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 778.684 ekor ayam buras dengan realisasi sebesar 779.546 ekor ayam buras dengan capaian realisasi kinerja 100.11%. Hal ini merupakan peningkatan populasi ayam buras dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena peternak juga dapat melawan wabah penyakit hewan menular dengan melakukan pengobatan dan pencegahan, pakan ternak yang terjaga ketersediaannya dan semua ini tidak lain merupakan peran dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep.

g. Ayam Petelur

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ayam ras petelur di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 321.302 ekor ayam ras petelur dengan realisasi sebesar 322.250 ekor ayam ras petelur dengan capaian realisasi kinerja 100.30%. Capaian ini merupakan peningkatan populasi ayam ras petelur dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena peternak juga dapat melawan wabah penyakit hewan menular dengan melakukan pengobatan dan pencegahan, pakan ternak yang terjaga ketersediaannya dan semua ini tidak lain merupakan peran dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep sehingga mencapai keberhasilan.

h. Ayam Pedaging

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi ayam pedaging di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 115.424 ekor ayam pedaging dengan realisasi sebesar 116.850 ekor ayam pedaging dengan capaian realisasi kinerja 101.24%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan populasi ayam ras pedaging dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena peternak juga dapat melawan wabah penyakit hewan menular dengan



melakukan pengobatan dan pencegahan, pakan ternak yang terjaga ketersediaannya dan peternak dapat menjaga kestabilan pendapatannya Hal ini merupakan peran dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep sehingga mencapai keberhasilan.

i. Itik

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi itik di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 56.167 ekor itik dengan realisasi sebesar 56.731 ekor itik dengan capaian realisasi kinerja 101%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan populasi itik dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya dari berbagai faktor yang saling terkait antara leading sector dan keterkaitan ini saling bekerjasama antara satu dan lainnya sehingga akan menumbuhkan suatu keberhasilan.

j. Mentok

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan populasi mentok di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 12.321 ekor mentok dengan realisasi sebesar 12.381 ekor Mentok dengan capaian realisasi kinerja 100.49%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan populasi mentok dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya dari berbagai faktor yang saling terkait antara leading sector dan keterkaitan ini saling bekerjasama antara satu dan lainnya sehingga akan menumbuhkan suatu keberhasilan.

#### **4. Peningkatan Produksi Peternakan**

a. Jumlah Produksi Daging

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan produksi ternak yaitu daging di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 4.386.096 kg produksi daging dengan realisasi sebesar 4.399.785 kg produksi daging dengan capaian realisasi kinerja 100.31%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan produksi bahan asal ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena adanya suatu usaha yang baik dan kerjasama yang baik antara Dinas Peternakan dan peternak dari



bantuan modal usaha, penyuluhan, pembinaan usaha peternakan dan pengobatan ternak. Dan hal ini merupakan suatu keberhasilan.

b. Jumlah Produksi Telur

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan produksi ternak yaitu telur di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 2.707.419 kg produksi telur dengan realisasi sebesar 2.766.542 kg produksi telur dengan capaian realisasi kinerja 102.18%. Hasil analisis ini merupakan peningkatan produksi bahan asal ternak dari target yang ditentukan sangat berhasil. Penyebab keberhasilannya karena adanya suatu usaha yang baik dan kerjasama yang baik antara Dinas Peternakan dan peternak dari bantuan modal usaha, penyuluhan, pembinaan usaha peternakan dan pengobatan ternak. Dan hal ini merupakan suatu keberhasilan.

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel : 3.2.1.3**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>1. Jumlah Populasi Ternak</b>	<b>Rp 7.941.825.793</b>	<b>Rp 7.543.489.305</b>	<b>94,98%</b>	<b>100,42%</b>	<b>94,58%</b>
- Sapi Potong				100,22%	
- Kerbau				99,66%	
- Kuda				99,81%	
- Kambing				100,49%	
- Domba				100,92%	
- Ayam Buras				100,11%	
- Ayam Petelur				100,30%	
- Ayam Pedaging				101,24%	
- Itik				101,00%	
- Mentok				100,49%	
<b>Kegiatan :</b>					
- Pembinaan Kelompok Tani Ternak	Rp 136.500.000	Rp 136.500.000			
- Pendataan Masalah Peternakan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000			
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Rp 47.000.000	Rp 46.600.000			
- Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000			
- Penanggulangan Penyakit Flu Burung	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000			
- Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknik Reproduksi (ATR)	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000			
- Pemeriksaan dan Pengujian Sampel	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000			
- Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat	Rp 79.000.000	Rp 78.100.000			



INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
Guna					
- Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui Integritas Tanaman & Ternak	Rp 1.557.030.000	Rp 1.479.288.720			
- Peningkatan Populasi Domba dan Kambing	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000			
- Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi kepada Masyarakat	Rp 886.267.000	Rp 819.225.000			
- Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Rp 56.703.000	Rp 56.703.000			
- Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Rp 409.525.793	Rp 409.525.000			
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Peternakan Sapi, Kambing dan Ayam	Rp 4.347.000.000	Rp 4.095.372.585			
- Monitoring Bantuan Keuangan Desa	Rp 17.800.000	Rp 17.175.000			
<b>2. Jumlah Produksi Ternak</b>	<b>Rp 1.687.632.364</b>	<b>Rp 1.679.222.364</b>	<b>99,50%</b>	<b>101,25%</b>	<b>98,28%</b>
- Daging				100,31%	
- Telur				102,18%	
<b>Kegiatan :</b>					
- Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000			
- Pengembangan Agribisnis Peternakan	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000			
- Inseminasi Buatan (IB)	Rp 42.441.000	Rp 42.141.000			
- Pengembangan Pakan Ternak	Rp 29.000.000	Rp 29.000.000			
- Pembinaan Pengembangan Usaha Sapi Madura	Rp 120.000.000	Rp 117.945.000			
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 14.676.364	Rp 14.676.364			
- Pameran Bidang Peternakan	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000			
- Pengembangan Pasar Ternak	Rp 1.312.515.000	Rp 1.306.460.000			

Dalam hal penjelasan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep oleh Dinas Peternakan sebagai berikut :

- a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ini untuk mencapai indikator kinerja Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi didukung dengan kegiatan antara lain Pendataan masalah peternakan, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penanggulangan Penyakit Flu Burung,



Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknik Reproduksi (ATR), serta Pemeriksaan dan Pengujian Sampel. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator populasi ternak Produksi Bahan Asal Ternak dan Konsumsi Bahan Asal Ternak, sebagai salah satu pendukung populasi ternak sehingga terjaga kestabilan populasi ternak sekaligus meningkatkannya. Dengan upaya tersebut Dinas Peternakan berhasil mencapai capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

- b. Program peningkatan produksi hasil peternakan ini untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak dan Produksi Bahan asal ternak didukung dengan kegiatan antara lain Pengembangan agribisnis peternakan, Inseminasi Buatan (IB), Pengembangan Pakan Ternak, Pengadaan Sarana Peternakan, Pembinaan dan Pengawasan Ternak, Pembinaan Pengembangan Usaha Sapi Madura, dan Monitoring Bantuan Ternak Pemerintah. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator populasi ternak, Produksi bahan asal ternak dan konsumsi bahan asal ternak sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Peternakan meraih keberhasilan.
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan ini untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak dan Produksi Bahan asal ternak didukung dengan kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan, Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah, Pameran Bidang Peternakan, dan Pengembangan Pasar Ternak. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator populasi ternak, Produksi Bahan asal ternak dan konsumsi bahan asal ternak sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep meraih keberhasilannya.
- d. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan ini untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak dan Produksi Bahan asal ternak didukung dengan kegiatan antara lain Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna. Program dan kegiatan ini merupakan keberhasilan indikator populasi ternak Produksi Bahan asal ternak dan



- konsumsi bahan asal ternak sebagai salah satu pendukung indikator kinerja sehingga bisa tercapai dengan baik.
- e. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku salah satu program untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak, Produksi Bahan asal ternak didukung dengan kegiatan antara lain Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Integritas Tanaman dan Ternak. Program dan kegiatan ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan 12 indikator kinerja Dinas Peternakan Kabuapten Sumenep.
  - f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial salah satu program untuk mencapai indikator kinerja populasi ternak, Produksi bahan asal ternak dengan kegiatan antara lain Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui bantuan hewan ternak dan sarana angkut ternak, Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak.
  - g. Program Peningkatan Pokok-pokok Pikiran salah satu program untuk mencapai indikator kinerja populasi ternak dan produksi bahan asal ternak dengan kegiatan antara lain Peningkatan Ekonomi masyarakat melalui usaha ternak sapi, kambing, ayam, itik dan burung.
  - h. Program Peningkatan Populasi Ternak salah satu program untuk mencapai indikator kinerja Populasi ternak dan Produksi Bahan asal ternak didukung dengan kegiatan antara lain Peningkatan Populasi domba/kambing. Program dan kegiatan ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan 12 indikator kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep.

**5. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton) :**

Peningkatan Produksi Perkebunan:

Indikator sasaran yang ditetapkan Tahun 2016 menghasilkan capaian kinerja sebesar 85,50 % dari target 100 %. Dalam pengertian umum peningkatan produksi perkebunan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi perkebunan dipengaruhi banyak faktor, misalkan pengolahan tanah, pasca panen, sarana produksi, tenaga kerja, musim panca roba, modal dan lain sebagainya.



Indikator keberhasilan kinerja adalah pencapaian penyediaan sarana prasarana produksi mulai awal budidaya sampai penanganan pasca panen. Terlihat pada realisasi kinerja pada Tahun 2016 dapat dikatakan bahwa upaya penyediaan sara dan prasarana berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan atau terjadi Peningkatan hal ini karena gagalnya panen tembakau karena perubahan musim (gagal panen) sehingga mempengaruhi produksi perkebunan secara keseluruhan.

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel : 3.2.1.5  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

INDUKATOR	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>1. Peningkatan Produksi hasil perkebunan :</b>	<b>10.873.292.300</b>	<b>10.546.192.050</b>	<b>96,99</b>	<b>85,50</b>	<b>113,45</b>
- Kelapa				101,01	
- Tembakau				26,90	
- cabe jamu				101,28	
- jambu mete				102,99	
- Siwalan				95,30	
<b>Kegiatan:</b>					
- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	46.613.000	46.313.000			
- Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	67.533.700	64.328.100			
- Penguatan kelembagaan kelompok tani Tembakau melalui fasilitasi penyuluhan	780.000.000	767.654.800			
- Standarisasi kualitas bahan baku melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi	312.383.000	289.831.700			
- Standarisasi kualitas bahan baku melalui pembuatan embung	460.477.900	417.701.400			
- Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui	5.578.810.000	5.399.264.450			



INDUKATOR	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
fasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)					
- Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku dengan kadar nikotin rendah	2.779.941.000	2.729.115.700			
- Penanganan panen dan pasca panen bahan baku melalui pengadaan alat perajang dan alat pendukungnya	67.533.700	64.328.100			
- Penanganan panen dan pasca panen bahan baku melalui pengadaan kendaraan roda 3 (tiga)	780.000.000	767.654.800			
<b>2. Peningkatan Produksi hasil kehutanan</b>	<b>7.673.385.400</b>	<b>6.714.204.950</b>	<b>87,50</b>	<b>102,15</b>	<b>85,66</b>
- <b>produksi lebah madu</b>				104,30	
- <b>Kayu</b>				102,82	
<b>Kegiatan :</b>					
- Optimalisasi PNBK	36.200.000	26.736.000			
- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	15.613.800	15.613.800			
- Pengembangan Lebah Madu (wirausahawan baru)	275.809.500	260.037.250			
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	60.600.000	55.165.000			
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	82.440.000	81.731.600			
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Kehutanan	78.194.600	71.999.800			
- Rehabilitasi Lahan, Hutan Mangrove, Hutan Pantai dan Pengembangan Sarana Prasarana Kehutanan	7.042.944.000	6.121.338.000			
- Pelaksanaan Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam	81.583.500	81.583.500			



## **6. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis**

Sasaran Strategis Meningkatnya nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan) didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- Optimalisasi PNBP
- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
- Pengembangan Lebah Madu (wirausahawan baru)

Program rehabilitasi hutan dan lahan

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Kehutanan
- Rehabilitasi Lahan, Hutan Mangrove, Hutan Pantai dan Pengembangan Sarana Prasarana Kehutanan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

- Pelaksanaan Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan

Program Peningkatan kualitas bahan baku

- Penguatan kelembagaan kelompok tani Tembakau melalui fasilitasi penyuluhan
- Standarisasi kualitas bahan baku melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi
- Standarisasi kualitas bahan baku melalui pembuatan embung
- Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui fasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
- Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku dengan kadar nikotin rendah
- Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau melalui pelatihan penerapan PHT pada pengendalian OPT



- Penanganan panen dan pasca panen bahan baku melalui pengadaan alat perajang dan alat pendukungnya
- Penanganan panen dan pasca panen bahan baku melalui pengadaan kendaraan roda 3 (tiga)

**Sasaran 3.2.2 : Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan**

**1. Produksi Perikanan :**

- Jumlah hasil perikanan tangkap  
 Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 46.980,30 ton, hal ini hampir memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 47.100 ton atau capaian kinerja mencapai 99,75%. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun dasar terealisasi sebesar 46.739,50 ton atau meningkat sebesar 240,8 ton. Program kegiatan pendukung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain Stimulasi Usaha Perikanan Tangkap, Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pengadaan Rumpon Laut Dangkal, Peningkatan Prasarana Penangkapan Ikan, yang pada umumnya bersumber dari dana DAK.
- Jumlah hasil perikanan budidaya  
 Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2016 terealisasi sebesar 1.191.966 ton dari target sebanyak 1.128.902 ton atau sebesar 97,79%. Capaian kinerja tidak mencapai target disebabkan karena produksi perikanan budidaya ini didominasi oleh rumput laut yang sangat tergantung dengan cuaca.

**2. Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat Konsumsi Ikan**

Jumlah pertumbuhan tingkat konsumsi ikan cukup bagus dari tahun ke tahun, terbukti pada tahun 2016 terealisasi sebesar 40 kg/kap/th dari target 40,28 kg/ka/th, hal ini hampir memenuhi target sehingga capaian kinerja mencapai 99,3%.

**Tabel : 3.2.2.1  
 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALIASI ANGGARAN	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	Produksi Perikanan :					



NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALIASI ANGGARAN	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
	a) Hasil Perikanan Tangkap (ton)	4.907.079.000	1.768.301.700	36,04%	99,75%	276,78
	b) Hasil Perikanan Budidaya (ton)	3.125.506.000	335.995.000	10,75%	97,79%	909,67
2	Jumlah Pertumbuhan Produksi Sumberdaya Laut lainnya /Rumput Laut (ton basah)	3.100.006.000	310.495.000	10,02%	97,03%	968,36
3	Jumlah Pertumbuhan tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)	241.000.000	240.599.000	99,83%	99,30%	99,47

Kegiatan Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap memiliki anggaran sebesar Rp. 39.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.553.500,- atau sebesar 93,6% dan keluran berupa belanja modal untuk percepatan operasionalisasi TPI Pasongsongan terealisasi 100%. Kegiatan Stimulasi Usaha Perikanan Tangkap terealisasi sebesar Rp. 516.988.500,- dari total pagu sebesar Rp. 3.593.919.500,- atau sebesar 14,4%. hal ini disebabkan karena adanya pengurangan dana DAK dari pusat sebesar 10%, sehingga jumlah bantuan hibah kepada masyarakat yang direncanakan sebanyak 359 unit hanya terealisasi sebanyak 107 unit atau 29,8%. Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan terealisasi sebesar Rp. 846.557.500,- dari total pagu sebesar Rp. 900.869.500,- atau sebesar 94%, jumlah bantuan hibah kepada masyarakat berupa Fish Finder dan GPS sebanyak 83 unit terealisasi sebanyak 71 unit, hal ini juga adanya pengurangan dana DAK. Kegiatan Peningkatan Prasarana Penangkapan Ikan merupakan kegiatan DAK yang belanja hibah kepada masyarakat berupa perahu ukuran 3-5 GT dihapus semua hanya dana pendampingan APBD yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 1.334.000,- dari pagu sebesar Rp. 4.700.000,- atau sebesar 28%. Kegiatan Pengadaan Prasarana Penangkapan Ikan berupa pengadaan perahu fiber dan mesin tempel juga mengalami pengurangan dana DAK, sehingga bantuan hibah dihapus dan hanya dana pendampingan yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 960.000,- Kegiatan



Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya ikan Lele terealisasi 100% dari total pagu sebesar Rp. 25.500.000,- sebanyak 1 paket kepada 1 kelompok saja. Kegiatan Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Unggul berupa bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut dan Sarana Pengangkutan Rumput Laut hanya terealisasi sarana pengangkutan rumput laut saja yaitu sebanyak 10 unit sedangkan 7 unit untuk sarana budidaya rumput laut mengalami pengurangan dana DAK sehingga dari total dana sebesar Rp. 200.606.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.755.000,-

### **Sasaran 3.2.3 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**

#### **1. Persentase Kualitas Gizi Pangan Daerah**

Persentase rata-rata jumlah dan kualitas yang tersedia di wilayah berdasar pada kebutuhan gizi aktual pada tahun berjalan. Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan konsumsi pangan, terutama kandungan protein dan vitamin di Indonesia masih sangat rendah. Kondisi tersebut yang mengakibatkan rendahnya tingkat gizi masyarakat saat ini, terutama balita. Berdasar tabel diatas telah ditetapkan untuk indikator ini sebesar 76 % dan tercapai sesuai target. Untuk Skor PPH, kualitas gizi pangan daerah dan daerah rawan gizi rencana realisasi RPJMD tahun 2016 sebesar capaian 100%, bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016 sebesar menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,00 %, ini juga termasuk predikat Sangat Berhasil.

#### **2. Persentase Daerah Rawan Gizi**

Pada tahun 2016 ditetapkan penurunan daerah/desa rawan pangan/gizi dengan target sebesar 15% dan tercapai sesuai target. Untuk penanganan rawan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan/gizi sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:



**Tabel : 3.2.3.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>Sasaran 3:</b>					
<b>Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah</b>	<b>428,089,000</b>	<b>427,078,300</b>	<b>99.76</b>	<b>103.83</b>	<b>96.08</b>
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	168,310,000	167,882,450			
Pengembangan Lumbung Pangan Desa	56,689,000	56,389,800			
Gelar Produk Aneka Pangan Olahan	203,090,000	202,806,050			

Dalam hal penjelasan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, untuk mencapai Indikator Kinerja Program tersebut antara lain didukung dengan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Pengembangan Lumbung Pangan Desa, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya.



**MISI IV : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL**

Hasil pengukuran realisasi kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 4.1. : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Tabel : 4.1.1.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat</b>								
1. Persentase Usulan Desa Dan Kecamatan Yang Terakomodir Di Dokumen Perencanaan	%	20	-	-	22	30	136,36	-
<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan</b>								
1. Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	%	50	-	-	55	75	136,36	-
<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik</b>								
1. Jumlah Desa Sejahtera	Desa	0	-	-	27	-	-	-
2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	-	-	100	-	-	-

**Tabel : 4.1.2.  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	1. Persentase Usulan Desa Dan Kecamatan Yang Terakomodir Di Dokumen Perencanaan	%	30	35	85,71
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan	1. Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	%	75	75	100,00



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	1. Jumlah Desa Sejahtera	desa	-	135	-
	2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	-	100	-

TUJUAN 4.2. : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**Tabel : 4.2.1.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa</b>								
1. Jumlah Pengunjung Terhadap Website Instansi Pemerintah Daerah	orang	2.987	-	-	3.025	3.350	110,74	-
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan</b>								
1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas/ Telah Menikah Memiliki E-KTP	%	100	75	75,00	85	77,75	91,47	121,96

**Tabel : 4.2.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatkan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	1. Jumlah Pengunjung Terhadap Website Instansi Pemerintah Daerah	orang	3.350	3.500	95,71
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas/ Telah Menikah Memiliki E-KTP	%	77,75	97	80,15

**Tabel : 4.3.1.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai , Kompeten, Bersih Dan Akuntabel</b>								



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1. Persentase Penempatan ASN Yang Sesuai Dengan Kompetensi	%	80	80	100,00	85	85	100,00	100,00
2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai Dengan Kebutuhan Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	%	86	86	100,00	87	80	91,95	91,95
3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,46	0,46	100,00	0,20	0,39	51,28	51,28
4. Nilai Rangkings LPPD se-Jawa Timur	Peringkat	35	10	350,00	34	-	-	-
5. Nilai Rangkings Sakip se-Jawa Timur	Peringkat	50,50	51,14	101,27	58,50	-	-	-
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif</b>								
1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD Yang Dihasilkan	Kali	45	-	-	111	66	59,45	17,41
2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	Naskah	16	-	-	19	11	57,89	55
<b>Sasaran 3 : Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel</b>								
1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	6,35	-	-	-2,12	15,75	1346,00	-
2. Persentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	%	34,69	-	-	34,75	50	143,88	-
3. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	%	18,90	-	-	14,85	13,10	88,22	-
4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	60	-	-	70	85	121,43	-
5. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	%	79	-	-	82	91,26	111,29	-

**Tabel : 4.3.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	1. Persentase Penempatan ASN Yang Sesuai Dengan Kompetensi	%	85	90	94,44



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
	2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai Dengan Kebutuhan Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	%	80	94	85,11
	3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,39	0,20	51,28
	4. Nilai Rangking LPPD se-Jawa Timur	Peringkat	-	27	-
	5. Nilai Rangking Sakip se-Jawa Timur	Peringkat	-	79,00	-
	2. Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD Yang Dihasilkan	Kali	-	379
	2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	Naskah	-	20	55
3. Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	15,75	15,00	105,00
	2. Persentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	%	50	34,99	142,90
	3. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	%	13,10	22,02	59,49
	4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	85	90	94,44
	5. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	%	91,26	95	96,06

Penjelasan analisis dan evaluasi capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 4.1. : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat**

**1. Persentase Usulan Desa Dan Kecamatan Yang Terakomodir Di Dokumen Perencanaan**



Pada indikator ini menunjukkan keberhasilan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 mencapai 30 % dari target 2016 sebesar 22% atau mencapai 136%. Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa dari keseluruhan usulan desa sampai dengan kecamatan yang diusulkan melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) hanya 30% usulan yang diakomodir di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016. Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan persentase usulan musrenbang yang dihasilkan di dalam musrenbang desa sampai dengan kecamatan untuk diakomodir ke dalam dokumen perencanaan terutamanya pada dokumen RKPD tahun 2016. Ini menandakan bahwa Pemerintah daerah semakin konsisten dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperhatikan asas partisipatif didalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai pedoman didalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang ada. Alternative solusi harus dipilih dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat mengurangi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja.

#### **Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan**

##### **1. Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan**

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelaraskan antar dokumen perencanaan sampai dengan dokumen perencanaan penganggaran yaitu mulai dari Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD sampai dengan dokumen perencanaan penganggaran dalam hal ini dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun capaian target indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan mencapai 75 % dari target sebesar 55 % pada tahun 2016 atau mencapai 136%. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep didalam meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan baik itu



dokumen perencanaan sampai pada dokumen penganggaran, mulai dari dokumen RPJMD sampai dengan dokumen APBD. Keberhasilan ini tak lepas dari semakin optimalnya peran Bappeda Kabuapten Sumenep didalam melakukan verifikasi maupun koordinasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 merupakan gambaran bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung pada target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian target indicator Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2016 dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 136% dari target yang direncanakan mengindikasikan bahwa Bappeda Kabupaten Sumenep didalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan telah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan top down and bottom up, sehingga dokumen perencanaan yang telah disusun semakin terarah dan konsisten serta tetap melihat kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu inovasi dan koordinasi sangat dibutuhkan didalam menyempurnakan proses dan pola penyusunan dokumen perencanaan sehingga kedepan diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan akan lebih sempurna dan sesuai dengan harapan masyarakat.

**Tabel : 4.1.2.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomis	Capaian Kinerja Keluaran	Rasio Efisiensi
<b>1</b>	<b>Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan</b>	<b>495.000.000</b>	<b>469.853.980</b>	<b>94,92</b>	<b>136</b>	<b>69,79</b>
	- Pelaksanan Musrenbang RKPD	295.000.000	291.613.980			
	- Penyusunan Rancangan RKPD	200.000.000	178.240.000			
<b>2</b>	<b>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan</b>	<b>350.786.000</b>	<b>346.145.950</b>	<b>98,67</b>	<b>136</b>	<b>72,55</b>



No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomis	Capaian Kinerja Keluaran	Rasio Efisiensi
	- Penyusunan Kebijakan umum Anggaran	117.700.000	115.260.000			
	- Penyusunan PPAS	183.086.000	181.885.950			
	- Pokja verifikasi kegiatan	50.000.000	49.000.000			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio ekonomi yang telah dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2016 terhadap indikator persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan sebesar 94,92 % dengan kategori ekonomis, sedangkan untuk rasio efisiensi indikator tersebut mencapai 69,79% dengan kategori efisien. Indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pelaksanaan musrenbang dan kegiatan penyusunan rancangan RKPD.

Untuk indkator kedua yaitu persentase keselarasan antar dokumen perencanaan, rasio ekonomis mencapai 98,67 % dengan kategori cukup ekonomis dan rasio efisiensi mencapai 72,55% dengan kategori efisiensi. Indikator tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan PPAS dan Pokja verifikasi kegiatan.

#### **Sasaran 4.1.3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik**

##### **1. Jumlah Desa Sejahtera**

Untuk mewujudkan desa sejahtera, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 6 tentang Desa atau sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desa-lah yang lebih tau apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.

Program-program desa harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat rencana kegiatan dan penggunaan atau RKP Desa.

Pelaksanaan Desa Sejahtera di Kabupaten Sumenep meliputi 4 aspek utama diantaranya :

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan)
- 2) Pemenuhan / pembangunan sarana dan prasarana
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Tahun 2016 indikator Desa Sejahterapada 27 Desa belum terlaksana sejalan dengan perubahan RPJM Kabupaten Sumenep sehingga konsep tersebut baru bisa terlaksana pada tahun 2017, Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu 27 Desa, Capaian Kinerjanya tidak dapat terukur.

## **2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi**

Indikator kinerja sasaran Desa yang tertib Administrasidifokuskan kepada desa yang menyampaikan Laporan (RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LPD). Pada tahun 2016 dari desa yang ada di kabupaten Sumenep (330 Desa) telah membuat dan menyampaikan Laporan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LPD, Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2016 maka capaian kinerjanya adalah 100%atau dengan predikat Baik.

TUJUAN 4.2. : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**Sasaran 4.2.1 : Meningkatkan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa**

### **1. Jumlah Pengunjung Terhadap Website Instansi Pemerintah Daerah**

Pada Persentase Peningkatan Sistem Komunikasi Informasi Dan Media Massa melalui Jumlah Pengunjung Web Kabupaten ditetapkan target 3.025 orang pengunjung web dan terialisasi 3.350 pengunjung web atau capaian kinerjanya 111% atau pada katagori (Sangat Baik) karena melebihi target yang telah ditentukan yang terdiri dari dua indikator kinerja diantaranya Jumlah pengembangan jaringan G-Online target 1 line dan terialisasi 1 line atau capaian kinerjanya sebesar 100% pengembangan jaringan G-Online yang dilaksanakan ke semua SKPD



Kabupaten Sumenep . Sedangkan dalam indicator pengembangan Telecenter yang ditempatkan di pualu dan daratan dengan target 4 line semua dapat terealisasi sebanyak 4 line sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 100 % dengan terealisasinya semua indicator kinerja dan tercapainya target maka kedepan kinerja Kominfo dalam pengembangan Komunikasi dan informasi akan semakin ditingkatkan guna untuk mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep dalam mendapatkan informasi yg actual dan kompetibel.

**Tabel : 4.2.1.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa</b>					
<b>1. Jumlah Pengunjung Web terhadap Instansi Pemerintah Daerah</b>	<b>143,000,000.00</b>	<b>143,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>111.00</b>	<b>90.09</b>
- Jumlah pengembangan jaringan G-Online	250,199,700	249,599,700			
- Jumlah Pengembangan Telecenter	212,922,600.00	212,922,000.00			

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Web Kabupaten dalam mendukung pencapaian pernyataan Indikator kinerja Prosentase Jumlah Pengunjung Web Kabupaten didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Meningkatkan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
  - Pengembangan Jaringan G-Online
  - Pengembangan Telecenter

**Sasaran 4.2.2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan**

**1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas/ Telah Menikah Memiliki E-KTP**

Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP untuk tahun 2016 adalah sebesar 77,75%



dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD pada tahun 2020 sebesar 97% dengan capaian kinerja sebesar 77,75%.

Berdasarkan Tabel 4.2.1. di atas sasaran tersebut didukung oleh 8 indikator sasaran yaitu Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP, Persentase Penerbitan Kartu Keluarga, Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran, Survei Kepuasan Masyarakat, Jumlah Penduduk yang memiliki KTP, Jumlah Penduduk yang memilki Kartu Keluarga, Jumlah anak 0 – 18 th yang memiliki Akte Kelahiran dan Jumlah Data Informasi kependudukan serta pengolahan data laporan kependudukan. Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP

Pada tahun 2016 Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP sebesar 77,75% dari target 85,00% sehingga pencapaian kinerja sebesar 91,47%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Desa-Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sumenep serta melalui sosialisasi media elektronik.

- b. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga

Pada tahun 2016 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 100% dari target 100% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Desa-Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sumenep serta melalui sosialisasi media elektronik tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

- c. Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran

Pada tahun 2016 Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran sebesar 59,15% dari target 74% sehingga pencapaian kinerja sebesar 79,94%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Desa-Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sumenep serta melalui sosialisasi media elektronik tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan



d. Survei Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2016 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 81,20 dari target 100 sehingga pencapaian kinerja sebesar 81,20. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya pelayanan dokumen kependudukan gratis tidak dipungut biaya dan cara penyampaian petugas layanan sangat baik dan sopan kepada masyarakat maupun pemohon dokumen kependudukan.

e. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP

Pada tahun 2016 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP sebesar 688.213 jiwa dari jumlah penduduk 1.123.310 jiwa sedangkan target kepemilikan KTP sebesar 746.518 jiwa sehingga pencapaian kinerja sebesar 92,19%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Desa-Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sumenep serta melalui sosialisasi media elektronik tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan

f. Jumlah Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga

Pada tahun 2016 Jumlah Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga sebesar 348.626 dari target 370.552 sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,08%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Desa-Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sumenep serta melalui sosialisasi media elektronik tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan

g. Jumlah anak 0 – 18 th yang memiliki Akte Kelahiran

Pada tahun 2016 Jumlah anak 0 – 18 th yang memiliki Akte Kelahiran sebesar 161.265 dari target 226.165 sehingga pencapaian kinerja sebesar 71,30%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya stelsel aktif Petugas untuk turun ke bawah melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran.

h. Jumlah Data Informasi kependudukan serta pengolahan data laporan kependudukan

Pada tahun 2016 Jumlah Data Informasi kependudukan serta pengolahan data laporan kependudukan sebesar 27 UPT. Kecamatan dari target 27 UPT. Kecamatan sehingga pencapaian kinerja sebesar



100%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya Kepala UPT. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep melakukan data ke setiap Desa tentang Pindah Datang, Lahir dan Mati setiap bulannya yang kemudian dibukukan menjadi sebuah Laporan Kependudukan.

**Tabel : 4.2.2.1**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMIS	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1		2	3	4	5	6
<b>1.</b>	Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP	<b>2.602.342.500</b>	<b>2.598.135.000</b>	<b>99,84</b>	<b>91,47</b>	<b>109,15</b>
	Registrasi Data Kependudukan	2.602.342.500	2.598.135.000	99,84		
<b>2.</b>	Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	<b>55.338.500</b>	<b>54.710.000</b>	<b>98,86</b>	<b>79,93</b>	<b>123,68</b>
	Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran	55.338.500	54.710.000	98,86		

Berdasarkan tabel diatas bahwa penyerapan anggaran dari kegiatan Registrasi Data Kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dianggarkan sebesar Rp 2.602.342.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp 2.598.585.000,00 atau 99,86 % termasuk kategori “Cukup Ekonomis” dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran indikator sasaran Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP, maka hasil Rasio Efisiensinya adalah 109,15% atau termasuk kategori “Tidak Efisien” hal ini dikarenakan bahwa kegiatan Registrasi Data Kependudukan tersebut merupakan Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- Honor Petugas Entry Data 42 or x 12 bln = Rp 302.400.000



- Honor Petugas SIAK Kec. 1 or x 27 kec x 12 bln = Rp162.000.000
- Honor Petugas Redes 1 or x 334 Desa x 12 bln = Rp 1.803.600.000

Dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.602.342.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp 2.598.585.000,00 atau 99,86% sehingga termasuk dalam kategori “Cukup Ekonomis” dan juga terlalu tingginya Target RPJMD pada tahun 2016 yakni 85 dibandingkan dengan Target RPJMD pada Tahun Dasar adalah 77 sedangkan Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 yakni 77,75 sehingga Capaian Kinerja Keluaran adalah 91,47 dan hal itu berpengaruh terhadap Rasio Efisiensi.

Sedangkan untuk penyerapan anggaran dari kegiatan Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dianggarkan sebesar Rp 55.338.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp 54.710.000,00 atau 98,86 % termasuk kategori “Cukup Ekonomis” dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran indikator sasaran Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran, maka hasil Rasio Efisiensinya adalah 123,68% atau termasuk kategori “Tidak Efisien” hal ini dikarenakan bahwa kegiatan Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran tersebut merupakan Cover buku register dan persyaratan akta Catatan Sipil sebesar Rp 33.500.000,00 serta belanja bahan pakai habis lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 55.338.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp 54.710.000,00 atau 98,86 % sehingga termasuk dalam kategori “Cukup Ekonomis” dan juga terlalu tingginya Target RPJMD pada tahun 2016 yakni 74 dibandingkan dengan Target RPJMD pada Tahun Dasar adalah 62 sedangkan Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 yakni 59,15 sehingga Capaian Kinerja Keluaran adalah 79,93 dan hal itu berpengaruh terhadap Rasio Efisiensi.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Registrasi Data Kependudukan.

Untuk mencapai indikator jumlah anak 0-18 tahun ber akta kelahiran didukung oleh kegiatan antara lain Registrasi Desa melakukan pendataan bagi anak yang masih belum mempunyai akta kelahiran agar



anak tersebut mempunyai data akta kelahiran yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Program Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran.

Buku register akta kelahiran disusun secara periodik untuk mengetahui dan untuk digunakan bagi masyarakat yang dokumen Akta Pencatatan Sipil yang hilang agar dapat diterbitkan kembali karena akta kelahiran berlaku seumur hidup.

c. Program Persertifikatan Tanah Pemerintah Daerah.

Tersedianya surat-surat sertifikat tanah gedung kantor UPT. Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kalianget, Rubaru, Ganding dan Kecamatan Nonggunong.

**TUJUAN 4.3. : MEWUJUDKAN KULTUR DAN TATA PEMERINTAHAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL**

**Sasaran 4.3.1 : Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai , Kompeten, Bersih Dan Akuntabel**

**1. Persentase Penempatan ASN Yang Sesuai Dengan Kompetensi**

Pada Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensinya ditetapkan target 85% dan terialisasi 85% atau capaian kinerjanya 100% atau pada katagori (Baik) yang terdiri dari satu indikator kinerja diantaranya Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai persyaratan Kepangkatan ditetapkan target 1.267 PNS dan terialisasi 1.270 PNS atau capaian kinerjanya 100%.

**2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai Dengan Kebutuhan Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep**

Pada Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep ditetapkan target 87% dan terialisasi 80% atau capaian kinerjanya 92% atau pada katagori (Baik) yang terdiri dari satu indikator kinerja diantaranya Jumlah Pejabat Struktural dan fungsional dilantik



ditetapkan target 1.284 PNS dan terialisasi 1.182 PNS atau capaian kinerjanya 92%.

### 3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN

Pada Persentase Jumlah pelanggaran Disiplin ASN target 0,20% dan terialisasi 0,39% atau capaian kinerjanya 51% atau pada katagori (Kurang) yang terdiri dari satu indikator kinerja diantaranya Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS target 21 PNS dan terialisasi 41 PNS atau capaian kinerjanya 51%. Dengan rincian sbb :

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	JML	KETERANGAN
Hukuman Disiplin Ringan	6	Tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan ( 6 Kasus)
Hukuman Disiplin Sedang	17	Menyalahgunakan wewenang (2 Kasus) Tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan ( 15 Kasus)
Hukuman Disiplin Berat	18	Tindak Pidana Penggelapan (3 Kasus) Tindak Pidana Narkoba (1 Kasus) Tidak melaporkan Perceraian (1 Kasus) Perselingkuhan (1 Kasus) Penyalahgunaan wewenang (1 Kasus) Pelecehan Seksual (1 Kasus) Perselingkuhan (2 Kasus) Tindak Pidana Korupsi (1 Kasus) Tidak melaksanakan tugas dinas tanpa keterangan ( 7 Kasus)

hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atasan langsung dalam melakukan penindakan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

**Tabel : 4.3.1.3**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMI	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
<b>Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai , Kompeten, Bersih Dan Akuntabel</b>					
<b>1. Prosentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi</b>	<b>63.275.000</b>	<b>61.345.000</b>	<b>96,95</b>	<b>100,00</b>	<b>96,95</b>



SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	RASIO EKONOMI	CAPAIAN KINERJA KELUARAN	RASIO EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
- Evaluasi dan Pelaporan Baperjakat	63.275.000	61.345.000			
<b>2. Prosentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep</b>	<b>76.050.900</b>	<b>46.242.263</b>	<b>60,80</b>	<b>92,00</b>	<b>66,09</b>
- Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	76.050.900	46.242.263			
<b>3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN</b>	<b>35.140.500</b>	<b>33.820.500</b>	<b>96,24</b>	<b>34,00</b>	<b>35,33</b>
- Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	35.140.500	33.820.500			

Meningkatnya Pengelolaan Aparatur Yang Profesioanal, dalam mendukung pencapaian pernyataan Indikator kinerja Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :

- Evaluasi Dan Pelaporan Baperjakat

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal, dalam mendukung pencapaian pernyataan Indikator kinerja Prosentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :

- Pelantikan Pejabat Struktural Dan Fungsional

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal, dalam mendukung pencapaian pernyataan Indikator kinerja Persentase



Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut antara lain didukung dengan kegiatan antara lain :
  - Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
  - Diharapkan pada tahun 2017 pemahaman atasan langsung dalam melakukan penindakan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

#### **4. Nilai Rangking LPPD se-Jawa Timur**

Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2016 menghasilkan capaian kinerja sebesar 300% karena pada tahun 2016 Kabupaten Sumenep mendapat peringkat 10 sedangkan peringkat LPPD ditargetkan 34. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya persentase capaian kinerja pada tahun 2016 jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, karena hasil capaian melebihi tiga kali lipat dari target.

#### **5. Nilai Rangking Sakip se-Jawa Timur**

Hasil evaluasi Tahun 2015 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh nilai 51,14 atau predikat “CC”, hasil evaluasi ini RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep periode tahun kelima. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerja cukup, taat kebijakan, memiliki sistem dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja pertanggungjawaban atau perlu banyak perbaikan. Implementasi yang harus dilakukan kedepan adalah sasaran-sasaran strategis dalam RPJMD berorientasi pada hasil (Outcome), relevan dan terukur penentuan target tiap tahun.

### **Sasaran 4.3.2 : Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif**

#### **1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD Yang Dihasilkan**

Target Tahun 2016, untuk jumlah risalah rapat / sidang paripurna sebanyak 111 kali. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 66 kali atau terpenuhi sebesar 59,46%. Risalah rapat / sidang paripurna yang dihasilkan pada tahun 2016 meliputi risalah rapat paripurna



pembahasan raperda APBD, risalah rapat paripurna pembahasan raperda perubahan APBD, risalah rapat paripurna pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD, risalah rapat paripurna pembahasan raperda non APBD berupa risalah rapat paripurna raperda usul eksekutif dan risalah rapat paripurna raperda usul prakarsa DPRD serta risalah rapat paripurna pembahasan non raperda. Dari penyusunan risalah rapat / sidang paripurna yang ditargetkan pada tahun 2016 namun tidak dapat terealisasi, dikarenakan tidak terlaksananya agenda kegiatan rapat / sidang paripurna DPRD antara lain agenda rapat paripurna pembahasan non raperda yakni pembahasan raperda penghapusan aset, agenda rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan, agenda rapat paripurna pembahasan perubahan alat kelengkapan DPRD dan agenda rapat paripurna pembahasan pembentukan peraturan tata tertib DPRD dan kode etik DPRD.

Tidak terlaksananya atau tidak terpenuhinya agenda-agenda kegiatan rapat paripurna dimaksud menyebabkan penyusunan risalah rapat / sidang paripurna tidak dapat dilakukan mengingat elemen rapat dan elemen risalah merupakan elemen yang saling berkaitan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan rapat kedewanan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak dapat terlaksananya agenda rapat paripurna tersebut, antara lain planning / perencanaan agenda kegiatan rapat yang belum tersusun dengan baik dan sistematis, lamanya waktu kegiatan pembahasan raperda khususnya pada raperda non APBD, belum adanya kesamaan visi dan persepsi antara pihak legislatif (pansus DPRD) dengan pihak eksekutif (mitra kerja) dalam kegiatan pembahasan raperda dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) yang kurang memperhatikan estimasi waktu dan materi raperda yang akan dibahas.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala belum terpenuhinya jumlah risalah rapat / sidang paripurna sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa solusi penyelesaian guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain perlunya menyusun time schedule yang



memperhatikan planning dan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap pembahasan raperda, menyusun grand design konsep yang runtut dan jelas dalam setiap materi pembahasan raperda, pentingnya membangun komitmen dan kesamaan persepsi antara pihak pansus DPRD dengan pihak mitra kerja eksekutif dalam rencana kegiatan pembahasan raperda serta perlunya pendampingan dan asistensi yang intensif dari pihak Sekretariat DPRD khususnya Bagian hukum dan perundang-undangan dalam memberikan saran dan masukan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) di setiap awal tahun anggaran.

## **2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah**

Target Tahun 2016, untuk jumlah naskah produk hukum daerah sebanyak 19 naskah. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 11 naskah atau terpenuhi sebesar 57,89%. Adapun naskah produk hukum daerah yang terelisasi pada tahun 2016 antara lain naskah produk hukum / peraturan daerah usul prakarsa DPRD sebanyak 4 naskah, naskah produk hukum / peraturan daerah usul eksekutif sebanyak 3 naskah dan naskah produk hukum / peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah (APBD) sebanyak 3 naskah. Untuk naskah produk hukum / peraturan daerah usul prakarsa DPRD meliputi naskah raperda pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), naskah raperda kepelabuhan dan naskah raperda tanggung jawab sosial perusahaan / corporate social responsibility (CSR). Untuk naskah produk hukum / peraturan daerah usul eksekutif meliputi naskah raperda penyertaan modal kepada PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan rasperda tentang susunan dan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk naskah produk hukum / peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah (APBD) meliputi raperda APBD Tahun Anggaran 2017, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Tidak terlaksananya atau tidak terpenuhinya target jumlah naskah produk hukum daerah pada tahun 2016 memiliki korelasi dan relevansi dengan agenda kegiatan pembahasan raperda yang tidak dibahas pada



tahun 2016, diantaranya raperda tentang rencana tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya target naskah produk hukum daerah antara lain alotnya pembahasan produk hukum daerah khususnya di tingkat panitia khusus (Pansus), belum terskedulnnya dengan baik agenda pembahasan raperda baik ditingkat pansus, komisi maupun di paripurna, penyusunan jadwal program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) yang *over estimate* atau kurang memperhatikan estimasi waktu dan materi raperda yang akan dibahas.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala belum terpenuhinya target naskah produk hukum daerah, maka dapat dikemukakan beberapa solusi penyelesaian antara lain perlunya menyusun jadwal agenda kegiatan pembahasan raperda yang runtut dan sistematis khususnya pada Bagian rapat dan risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, penyusunan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) yang terskedul dan memperhatikan estimasi waktu yang rasional dan prosedural dan pentingnya membangun pola kemitraan yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam setiap tahap pembahasan pembentukan peraturan daerah.

### **Sasaran 4.3.3 : Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel**

#### **1. Persentase Pertumbuhan PAD**

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep masih memberikan kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Berikut ini disampaikan pertumbuhan PAD terhadap APBD sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.3.3.1

## Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2015-2016

No.	Uraian	Realisasi		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Rupiah	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b><u>172.687.320.521,34</u></b>	<b><u>209.223.153.535,75</u></b>	<b><u>36.535.833.014,41</u></b>	1,21
1.	Hasil Pajak Daerah	16.288.376.559,02	17.736.010.382,00	1.447.633.822,98	1,09
2.	Hasil Retribusi Daerah	17.033.457.232,00	25.080.452.414,68	8.046.995.182,68	1,47
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.461.039.135,66	15.151.337.010,24	2.690.297.874,58	1,22
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	126.904.447.594,66	151.255.353.728,83	24.350.906.134,17	1,19
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b><u>1.312.971.944.697,00</u></b>	<b><u>1.520.895.089.675,00</u></b>	<b><u>207.923.144.978,00</u></b>	1,16
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	125.203.363.697,00	129.042.821.568,00	3.839.457.871,00	1,03
2.	Dana Alokasi Umum	1.010.159.421.000,00	1.110.487.853.000,00	100.328.432.000,00	1,10
3.	Dana Alokasi Khusus	177.609.160.000,00	281.364.415.107,00	103.755.255.107,00	1,58
<b>II</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b><u>467.041.084.297,00</u></b>	<b><u>329.385.291.279,00</u></b>	<b><u>(137.655.793.018,00)</u></b>	0,71
1.	Pendapatan Hibah	1.032.665.900,00	0,00	(1.032.665.900,00)	-
2.	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.260.013.397,00	83.029.447.279,00	2.769.433.882,00	1,03
3.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	334.852.752.000,00	213.894.164.000,00	(120.958.588.000,00)	0,64
4.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.895.653.000,00	32.461.680.000,00	(18.433.973.000,00)	0,64

## 2. Persentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab DPPKA sebagai pembantu pengelola Barang Milik Daerah yaitu mengkoordinir pengelolaan Barang



Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola Barang Milik Daerah dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Sumenep melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab DPPKAD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan

Pada saat laporan kinerja DPPKA tahun 2016 disusun, laporan barang milik daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016 sedang dalam proses penyusunan laporan Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Sumenep. Penyusunan laporan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh SKPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI). Pengukuran kinerja persentase keakuratan barang milik daerah dilakukan dengan membandingkan data aset daerah setelah daudit oleh BPK dengan data aset dari bidang Aset Daerah pada tahun 2017.



Salah satu dari pengelolaan asset daerah yang menjadi indikator kinerja adalah Persentase luas tanah Pemda yang bersertifikat dengan formula Tanah yang bersertifikat dibagi jumlah keseluruhan tanah milik Pemda x 100%;

Capaian indikator kinerja ini kurang sesuai dengan target, disebabkan belum memadai tata kelola tata kelola asset. Selama tahun 2016 dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan workshop pengurus barang guna meningkatkan pemahaman/pengetahuan pengurus barang seluruh SKPD/Unit Kerja dalam mengelola barang daerah sehingga diharapkan seluruh pengurus barang di semua SKPD dalam melaksanakan ketugasan dapat lebih kapabel untuk menunjang keberhasilan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien dan taat pada aturan yang berlaku.
- Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara akurat, cepat, efisien dan efektif
- Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.



- Telah dilaksanakan pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah, sesuai dengan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola barang milik daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menyimpan seluruh bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dan bukti kepemilikan kendaraan dinas/operasional. Sebagai titik berat kegiatan ini adalah penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang milik daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

### **3. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja**

Melalui indikator tersebut merupakan belanja pemeliharaan daerah yang manfaatnya melebihi tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan.

### **4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK**

Penyelesaian tindak lanjut melalui pemantauan dan koordinasi, jumlah Rekomendasi temuan LHP BPK keadaan sampai dengan semester I Tahun 2016 sebanyak 380 rekomendasi, adapun rekomendasi temuan yang telah tindak lanjut sebanyak 323 rekomendasi. Solusi yang dilakukan mengadakan rapat pemutakhiran data intern sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja/ Obyek Pemeriksaan Atas Temuan BPK.

### **5. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP**

Penyelesaian tindak lanjut melalui pemantauan dan koordinasi, jumlah temuan LHP Inspektorat Tahun 2016 sebanyak 835 Temuan, adapun temuan yang telah tindak lanjut sebanyak 762 Temuan. Solusi yang



dilakukan mengadakan rapat pemutakhiran data intern sebagai upaya menuntaskan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja/ Obyek Pemeriksaan Atas Temuan APIP.

**Tabel : 4.3.3.5**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Ekonomis	Capaian Kinerja Keluaran	Rasio Efisiensi
Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK;	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.137.011.600	2.135.160.625	99,91	121,43	94,44
Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan APIP;	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.137.011.600	2.135.160.625	99,91	111,29	96,06



**MISI V : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN**

Hasil pengukuran realisasi kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 5.1. : MENINGKATKAN KUALITAS NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Tabel : 5.1.1.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara</b>								
1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial Dan Keagamaan	%	-	90	-	91	90	98,90	-
2. Jumlah Demo Besifat Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)</b>								
1. Angka Kriminalitas	%	17,49	-	-	16,49	21,1	78,15	-
2. Persentase Penegakan Perda	%	85,35	85,35	100	90,00	98,62	91,25	91,25
3. Persentase Pelanggaran Perda	%	14,65	14,65	100	10	21,37	53,20	53,2
4. Jumlah Korban Bencana	Orang	40	-	-	50	26	52,00	-



INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
5. Jumlah Korban Bencana Yang Tertangani	Orang	40	-	-	50	26	52,00	-

**Tabel : 5.1.2.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial Dan Keagamaan	%	90	95	94,74
	2. Jumlah Demo Besifat Sosial	-	-	-	-
2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	1. Angka Kriminalitas	%	21,1	12,02	175,54
	2. Persentase Penegakan Perda	%	98,62	99,34	99,27
	3. Persentase Pelanggaran Perda	%	21,37	0,66	31,44
	4. Jumlah Korban Bencana	Orang	26	50	52,00
	5. Jumlah Korban Bencana Yang Tertangani	Orang	26	50	52,00

Penjelasan analisis dan evaluasi capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

TUJUAN 5.1. : MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN



**Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara**

**1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial Dan Keagamaan**

Indikator ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam penanganan kasus konflik yang bersifat sosial dan keagamaan. Pada tahun 2016 terjadi konflik yang bersifat keagamaan yaitu adanya aksi alisan sesat dari organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) tepatnya di Kecamatan Rubaru sebanyak 2 (dua) orang yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Diduga salah satu warga menganut aliran tersebut dimana Pemerintah dengan cepat menangani kasus dengan serius agar tidak menyebar ke warga lainnya. Untuk itu indikator kinerja pada tahun 2016 terealisasi 90% itu dikarenakan dengan adanya kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kecamatan-kecamatan dimana dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada para warga masyarakat setempat untuk lebih berhati-hati dengan organisasi ataupun kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

**2. Jumlah Demo Besifat Sosial**

Jumlah demo pada tahun 2016 sebanyak 41 demo, petugas dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep memantau setiap ada demo yang dilakukan para peserta aksi damai membubarkan diri dalam keadaan aman, tertib dan lancar serta tetap dalam pengawalan pihak Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Sumenep. Setelah itu melaporkan kepada Bapak Bupati.

**Sasaran 5.1.2 : Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)**

**1. Angka Kriminalitas**

Angka Kriminalitas dengan realisasi sebesar 21,10% atau 77 kasus setahun dari target 16,49% sehingga pencapaian kinerja sebesar 94,48% Adapun faktor penyebab kurang terpenuhinya target adalah kurangnya koordinasi secara terpadu dengan TNI/POLRI. Solusi yang dilakukan



adalah mengoptimalkan dengan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Satpol PP dalam Rangka Pemeliharaan Trantibum sebanyak 49 personil dan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Operasi Gabungan ) dengan target 48 kali operasi dari target yang sama.

## 2. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Perda dengan realisasi sebesar 98,62% atau 143 kasus pelanggaran perda yang terselesaikan, yang ditargetkan Tahun 2016 sebanyak 145 kasus ( 90,00% ) sehingga pencapaian kinerja sebesar 109,58% sangat berhasil, keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan Bupati melalui Perda serta didukung oleh potensi dan pengembangan SDM yang selalu ditingkatkan melalui kegiatan Pengembangan Satpol PP dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebanyak 144 kali operasi.

## 3. Persentase Pelanggaran Perda

Persentase Pelanggaran K3 Tahun 2016 terrealisasi sebesar 21,37% atau 78 kasus dari target 10,00%, sehingga pencapaian kinerja sebesar 87,37%. Adapun faktor penyebab kurang terpenuhinya target adalah kurangnya koordinasi secara terpadu dengan TNI/POLRI. Solusi yang dilakukan mengoptimalkan dengan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu) dengan kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP ( Patroli Insidentil ) sebanyak 180 kali patrol setahun dari target 180 kali patrol.

**Tabel : 5.1.2.3**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Ratio Ekonomi	Capaian Kinerja Keluaran	Ratio Efisiensi
Angka Kriminalitas - Peningkatan Kerjasama dgn Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu)	Rp. 69.143.000	Rp. 69.142.600	99.85%	109.58%	91.12%
Persentase Penegakan Perda	Rp. 64.824.000	Rp. 64.724.000	99.88%	83.37%	119.94%



Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Ratio Ekonomi	Capaian Kinerja Keluaran	Ratio Efisiensi
- Pengembangan Satpol PP dalam Penegakan Perda & Keputusan Bupati					
Persentase Pelanggaran K3 - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP (Patroli Insidentiiil)	Rp. 292.763.000	Rp. 292.412.200	99.88%	94.48%	105.72%

#### 4. Jumlah Korban Bencana Yang Tertangani

Jumlah korban bencana yang ditargetkan Tahun 2016 sebanyak 50 (orang) yang tertangani korban bencana sebanyak 26 (orang). Jumlah korban bencana keseluruhan sebanyak 341 (orang) diantaranya korban bencana :

- 1) Lonsor = 6 (orang)
- 2) Kebakaran = 24 (orang)
- 3) Kejadian dilaut = 8 (orang)
- 4) Sambar petir = 6 (orang)
- 5) Sengatan listrik = 2 (orang)
- 6) Bencana akibat angin kencang = 295 (orang)

Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana komunikasi antar kecamatan utamanya desa terpencil dan kecamatan kepulauan.



**MISI VI : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

Hasil pengukuran realisasi kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 6.1. : MENINGKATKAN KUALITAS NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Tabel : 6.1.1.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
1. Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep	%	7	-	-	8	7,89 %	98,6%	-

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016			Perbandingan Capaian Th. 2016 dibandingkan dgn Capaian Th. 2015
		TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	RIALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
<b>Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep</b>								
1. Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	%	7	3	42,86	8	3	37,50	87,50
<b>Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep</b>								
1. Persentase Jumlah Pemuda Yang Dibina Sehingga Berprestasi	%	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
2. Persentase Jumlah Prestasi Atlet Cabang Olahraga Berprestasi	%	15	15	100,00	15	20	133,33	133,33

Tabel : 6.1.2.  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	RIALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep	%	98,6%	12	65,75%



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2016	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN (+/-)
1. Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	1. Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	%	3	12	100,00
2. Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	1. Persentase Jumlah Pemuda Yang Dibina Sehingga Berprestasi	%	10	10	100,00
	2. Persentase Jumlah Prestasi Atlet Cabang Olahraga Berprestasi	%	20	25	133,33

Penjelasan analisis dan evaluasi capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

**TUJUAN 6.1. : MENINGKATKAN PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SENI, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Sasaran 6.1.1 : Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep**

**1. Persentase Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan**

Indikator persentase Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan mengalami keberhasilan penambahan sebesar 7,89%, sedangkan target tahun 2016 penambahan sebesar 8% yang diharapkan ada kenaikan persentase kesenian lokal sebesar 8% dari realisasi tahun sebelumnya. Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan ini meliputi penampilan seni budaya, pembinaan kesenian local, penghargaan terhadap pelaku seni dan pelestarian agenda sejarah. Pada tahun 2016 dilaksanakan 34 kali penampilan seni, 3 kali pembinaan kesenian local, 2 kali pelestarian agenda sejarah, serta 2 kali prosesi dan pawai budaya jadi total keseluruhan 41 kali kesenian lokal. Tahun 2015 jumlah kesenian lokal sebanyak 38 kali, jadi terjadi penambahan jumlah kesenian lokal yang dikembangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 7,89%.



## **Sasaran 6.1.2 : Meningkatkan Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep**

### **1. Persentase Jumlah Pemuda Yang Dibina Sehingga Berprestasi**

Prosentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi pada tahun 2016 yang ditarget sebesar 10% dari semua pemuda yang mengikuti pembinaan, terealisasi 10%. Jumlah pemuda berprestasi yang dibina mengalami keberhasilan 100% dimana dari target tahun 2016 sebanyak 5 orang pemuda yang dibina mampu berprestasi dan dipilih mengikuti perlombaan kepemudaan tingkat sellanjutnya, sebanyak 5 ( lima ) orang. Hal ini disebabkan adanya fasilitasi untuk membina sikap kepeloporan pemuda di beberapa bidang yaitu (1) Pendidikan; (2) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Bela Negara; (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (4) Pangan; (5) Teknologi Tepat Guna, Komunikasi dan Informasi.

### **2. Persentase Jumlah Prestasi Atlet Cabang Olahraga Berprestasi**

Indikator persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga yang berprestasi mengalami keberhasilan sebesar 133%, pada tahun 2016 yang ditargetkan atlet cabang olahraga yang berprestasi adalah 15% terealisasi sebesar 20% dari seluruh atlet cabang olahraga sebagai peserta. Adapun cabang olahraga yang dilaksanakan pencak silat yang diikuti oleh 50 atlet dari unsur padepokan dan paguyuban, sehingga diperoleh atlet cabang olahraga pencak silat yang berprestasi sebanyak 10 orang (5 atlet kagori padepokan dan 5 atlet katagori paguyuban)

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.



## 1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagai berikut:

**Tabel : B.1**  
**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2015 s/d Tahun 2016**

*Dalam jutaan Rupiah*

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Pertumbuhan Pendapatan Daerah			
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Rupiah	Target %	Realisasi Rupiah	Realisasi %
Pendapatan Asli Daerah	186.692,33	172.686,64	171.118,68	199.901,67	-15.574	-08,34	27.215	15,7
Dana Perimbangan	1.359.611,05	1.312.971,94	1.561.006,83	1.520.895,08	201.395	14,81	207.924	15,83
Lain-lain pendapatan yang sah	437.853,10	467.041,88	329.035,26	329.385,29	-108.818	-24,85	-137.656	-29,47
Jumlah pendapatan daerah	1.984.156,45	1.952.699,67	2.061.160,96	2.050.182,05	77.004	03,88	97,483	04,99

*Data sementara belum audit BPK*

## 2. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam upaya mewujudkan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021, yang masuk dalam kategori Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah, dengan satu Sektor dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membelanjakan anggaran daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG			
				(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1	URUSAN WAJIB	788.104.253.212,00	622.780.127.953,77	(165.324.125.258,23)	79,02		
1	01	PENDIDIKAN	49.314.382.459,00	25.801.525.237,00	(23.512.857.222,00)	52,32	
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN	49.314.382.459,00	25.801.525.237,00	(23.512.857.222,00)	52,32
1	02	KESEHATAN	312.043.814.912,00	233.771.147.424,62	(78.272.667.487,38)	74,92	
1	02	01	DINAS KESEHATAN	231.968.470.034,00	165.038.167.941,67	(66.930.302.092,33)	71,15
1	02	02	RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. MOH. ANWAR	80.075.344.878,00	68.732.979.482,95	(11.342.365.395,05)	85,84
1	03	PEKERJAAN UMUM	182.362.138.240,00	160.568.932.450,00	(21.793.205.790,00)	88,05	
1	03	01	DINAS PU BINA MARGA	84.797.755.334,00	69.016.772.203,00	(15.780.983.131,00)	81,39
1	03	02	DINAS PU PENGAIRAN	45.132.082.435,00	42.144.550.855,00	(2.987.531.580,00)	93,38
1	03	03	DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	52.432.300.471,00	49.407.609.392,00	(3.024.691.079,00)	94,23
1	06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	7.767.155.888,00	7.447.474.154,00	(319.681.734,00)	95,88	
1	06	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.767.155.888,00	7.447.474.154,00	(319.681.734,00)	95,88
1	07	PERHUBUNGAN	48.650.192.247,00	33.402.724.263,00	(15.247.467.984,00)	68,66	
1	07	01	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	48.650.192.247,00	33.402.724.263,00	(15.247.467.984,00)	68,66
1	08	LINGKUNGAN HIDUP	16.464.600.835,00	16.204.338.279,00	(260.262.556,00)	98,42	
1	08	01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	10.941.023.191,00	10.767.503.228,00	(173.519.963,00)	98,41
1	08	02	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	5.523.577.644,00	5.436.835.051,00	(86.742.593,00)	98,43
1	10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.362.586.313,00	4.266.236.436,00	(96.349.877,00)	97,79	
1	10	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.362.586.313,00	4.266.236.436,00	(96.349.877,00)	97,79
1	13	SOSIAL	4.788.743.239,00	4.655.545.050,00	(133.198.189,00)	97,22	
1	13	01	DINAS SOSIAL	4.788.743.239,00	4.655.545.050,00	(133.198.189,00)	97,22



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG			
				(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1	14		KETENAGAKERJAAN	7.065.765.000,00	6.110.879.878,00	(954.885.122,00)	86,49
1	14	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI	7.065.765.000,00	6.110.879.878,00	(954.885.122,00)	86,49
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.271.640.150,00	4.062.881.064,00	(208.759.086,00)	95,11
1	15	01	DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	4.271.640.150,00	4.062.881.064,00	(208.759.086,00)	95,11
1	17		KEBUDAYAAN	5.546.217.500,00	5.188.822.547,46	(357.394.952,54)	93,56
1	17	01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.546.217.500,00	5.188.822.547,46	(357.394.952,54)	93,56
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	4.512.750.925,00	4.334.700.365,00	(178.050.560,00)	96,05
1	19	01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.675.856.000,00	2.520.693.200,00	(155.162.800,00)	94,20
1	19	02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.836.894.925,00	1.814.007.165,00	(22.887.760,00)	98,75
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	128.239.539.152,00	106.720.243.881,69	(21.519.295.270,31)	83,22
1	20	04	SEKRETARIAT DPRD	41.409.198.834,00	25.393.982.361,00	(16.015.216.473,00)	61,32
1	20	05	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22.432.436.968,00	20.063.185.155,00	(2.369.251.813,00)	89,44
1	20	06	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.441.762.760,00	6.232.504.590,00	(209.258.170,00)	96,75
1	20	07	INSPEKTORAT	3.662.384.000,00	3.633.101.753,00	(29.282.247,00)	99,20
1	20	08	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.475.065.384,00	1.443.577.793,00	(31.487.591,00)	97,87
1	20	09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.541.231.600,00	1.514.253.650,00	(26.977.950,00)	98,25
1	20	10	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	300.000.000,00	293.903.482,00	(6.096.518,00)	97,97
1	20	11	KECAMATAN KOTA SUMENEP	584.068.000,00	578.152.248,00	(5.915.752,00)	98,99
1	20	12	KECAMATAN KALIANGET	465.000.000,00	463.585.421,00	(1.414.579,00)	99,70



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG			
				(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1	20	13	KECAMATAN TALANGO	465.000.000,00	464.812.219,00	(187.781,00)	99,96
1	20	14	KECAMATAN MANDING	465.000.000,00	461.040.542,00	(3.959.458,00)	99,15
1	20	15	KECAMATAN BLUTO	465.000.000,00	458.564.468,00	(6.435.532,00)	98,62
1	20	16	KECAMATAN SARONGGI	465.000.000,00	457.818.830,00	(7.181.170,00)	98,46
1	20	17	KECAMATAN LENTENG	480.700.000,00	470.688.508,00	(10.011.492,00)	97,92
1	20	18	KECAMATAN GILIGENTING	480.000.000,00	470.917.100,00	(9.082.900,00)	98,11
1	20	19	KECAMATAN GULUK-GULUK	465.000.000,00	464.637.420,00	(362.580,00)	99,92
1	20	20	KECAMATAN GANDING	465.000.000,00	464.283.032,00	(716.968,00)	99,85
1	20	21	KECAMATAN PRAGAAN	466.080.000,00	465.479.258,00	(600.742,00)	99,87
1	20	22	KECAMATAN RUBARU	465.000.000,00	464.732.100,00	(267.900,00)	99,94
1	20	23	KECAMATAN AMBUNTEN	480.700.000,00	472.091.828,00	(8.608.172,00)	98,21
1	20	24	KECAMATAN PASONGSONGAN	480.700.000,00	475.606.069,00	(5.093.931,00)	98,94
1	20	25	KECAMATAN DASUK	465.000.000,00	401.239.074,00	(63.760.926,00)	86,29
1	20	26	KECAMATAN BATANG-BATANG	480.700.000,00	480.616.745,00	(83.255,00)	99,98
1	20	27	KECAMATAN BATU PUTIH	480.700.000,00	478.434.000,00	(2.266.000,00)	99,53
1	20	28	KECAMATAN GAPURA	465.000.000,00	464.588.142,00	(411.858,00)	99,91
1	20	29	KECAMATAN DUNGKEK	480.700.000,00	490.230.000,00	9.530.000,00	101,98
1	20	30	KECAMATAN GAYAM	480.000.000,00	478.281.900,00	(1.718.100,00)	99,64
1	20	31	KECAMATAN NONGGUNONG	480.000.000,00	478.573.972,00	(1.426.028,00)	99,70
1	20	32	KECAMATAN RA'AS	480.000.000,00	469.347.000,00	(10.653.000,00)	97,78



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG			
				(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1	20	33	KECAMATAN MASALEMBU	480.000.000,00	477.691.440,00	(2.308.560,00)	99,52
1	20	34	KECAMATAN ARJASA	480.000.000,00	473.728.462,00	(6.271.538,00)	98,69
1	20	35	KECAMATAN SAPEKEN	480.000.000,00	477.406.670,00	(2.593.330,00)	99,46
1	20	36	KECAMATAN BATUAN	465.000.000,00	464.265.900,00	(734.100,00)	99,84
1	20	37	KECAMATAN KANGAYAN	480.000.000,00	474.021.500,00	(5.978.500,00)	98,75
1	20	40	KELURAHAN BANGSELOK	150.000.000,00	149.187.321,00	(812.679,00)	99,46
1	20	41	KELURAHAN KARANGDUAK	150.000.000,00	147.777.310,00	(2.222.690,00)	98,52
1	20	42	KELURAHAN KEPANJEN	150.000.000,00	147.871.485,00	(2.128.515,00)	98,58
1	20	43	KELURAHAN PAJAGALAN	150.000.000,00	137.127.400,00	(12.872.600,00)	91,42
1	20	51	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	13.427.792.353,00	12.589.871.746,00	(837.920.607,00)	93,76
1	20	52	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN	7.072.651.788,00	6.568.967.597,00	(503.684.191,00)	92,88
1	20	53	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	1.897.363.740,00	1.845.156.157,69	(52.207.582,31)	97,25
1	20	54	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.309.172.935,00	2.167.168.301,00	(142.004.634,00)	93,85
1	20	55	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	1.934.048.600,00	1.744.315.241,00	(189.733.359,00)	90,19
1	20	56	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	1.639.300.078,00	1.451.229.500,00	(188.070.578,00)	88,53
1	20	57	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.961.175.000,00	1.948.106.938,00	(13.068.062,00)	99,33
1	20	58	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	3.022.229.862,00	2.860.062.278,00	(162.167.584,00)	94,63
1	20	59	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	4.224.377.250,00	3.648.059.975,00	(576.317.275,00)	86,36
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.998.642.286,00	5.579.050.233,00	(2.419.592.053,00)	69,75
1	22	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	7.998.642.286,00	5.579.050.233,00	(2.419.592.053,00)	69,75



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG			
				(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
1	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.314.252.650,00	3.292.672.938,00	(21.579.712,00)	99,35
1	25	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.314.252.650,00	3.292.672.938,00	(21.579.712,00)	99,35
1	26		PERPUSTAKAAN	1.401.831.416,00	1.372.953.753,00	(28.877.663,00)	97,94
1	26	01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	1.401.831.416,00	1.372.953.753,00	(28.877.663,00)	97,94
2			URUSAN PILIHAN	104.740.762.796,00	80.277.893.099,00	(24.462.869.697,00)	76,64
2	01		PERTANIAN	42.694.195.687,00	41.839.522.057,00	(854.673.630,00)	98,00
2	01	01	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	32.206.114.530,00	31.878.490.649,00	(327.623.881,00)	98,98
2	01	02	DINAS PETERNAKAN	10.488.081.157,00	9.961.031.408,00	(527.049.749,00)	94,97
2	02		KEHUTANAN	19.099.754.558,00	17.787.306.908,00	(1.312.447.650,00)	93,13
2	02	01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	19.099.754.558,00	17.787.306.908,00	(1.312.447.650,00)	93,13
2	03		ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	4.910.192.678,00	4.604.017.420,00	(306.175.258,00)	93,76
2	03	01	KANTOR ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	4.910.192.678,00	4.604.017.420,00	(306.175.258,00)	93,76
2	05		KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.134.443.200,00	4.496.464.436,00	(6.637.978.764,00)	40,38
2	05	01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.134.443.200,00	4.496.464.436,00	(6.637.978.764,00)	40,38
2	07		INDUSTRI	26.902.176.673,00	11.550.582.278,00	(15.351.594.395,00)	42,94
2	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26.902.176.673,00	11.550.582.278,00	(15.351.594.395,00)	42,94



## BAB IV PENUTUP

Atas berkat, rahmat dan ridho Allah SWT, dengan dukungan dari seluruh pihak, partisipasi serta bantuan masyarakat maupun swasta dalam mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2016 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Meskipun terdapat beberapa target capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan, namun secara umum apa yang diinginkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan **“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”** seperti ditegaskan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016- 2021 secara bertahap dapat dicapai.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini tidak berarti kinerja pemerintahan telah berjalan secara baik dan lancar tanpa adanya suatu hambatan dan kendala. Kendala/hambatan maupun permasalahan- permasalahan yang dihadapi perlu adanya solusi pemecahan. Berkat bantuan semua stakeholders dan dilandasi oleh semangat, kerja keras, serta etos kerja untuk membangun, maka berbagai permasalahan yang ada akan dapat diatasi.

Akhirnya semoga laporan ini dapat menjadi bahan /informasi bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Semoga pada tahun mendatang kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat semakin ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan melalui cerminan capaian serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun



demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat, maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2016 akan selalu kami pantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terus-menerus sehingga tidak berhenti dalam tataran kebijakan formal saja, tetapi menjadi program dan kegiatan yang menjadiawal dan tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pilihan dan lebih utamanya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Langkah-langkah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga terwujud keselarasan dalam perencanaan daerah;
2. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil;
3. Dibangun sistem pengumpulan data kinerja

Harapan kami dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep ini, bukan hanya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang telah menjadi komitmen di Tahun 2016, namun dapat mencerminkan pula keselarasan dan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya mencerminkan secara utuh penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BUPATI SUMENEP  
VISI : SUPER MANTAP

Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil Dan Profesional

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN</b>				
<b>Tujuan 1.1. : Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Dan Perluasan Akses Pendidikan Serta Layanan Kesehatan Masyarakat</b>				
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>			<b>63,12%</b>	
1.1.1.	Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	1.1.1.1. IPM Pendidikan	62,00%	DINAS PENDIDIKAN
		1.1.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,28 Th	DINAS PENDIDIKAN
		1.1.1.3. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	79,34%	DINAS PENDIDIKAN
		1.1.1.4. Persentase jumlah sekolah terakreditasi :		
		- Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	70,10%	DINAS PENDIDIKAN
		- Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	72,20%	DINAS PENDIDIKAN
		- Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	71,80%	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	1.1.2.1. Jumlah Kunjungan Perpustakaan	19.500 Pengunjung	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
		1.1.2.2. IKM layanan perpustakaan	74,64	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
1.1.3.	Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	1.1.3.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,60%	DINAS KESEHATAN
		1.1.3.2. Persentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	59%	DINAS KESEHATAN
		1.1.3.3. Persentase Puskesmas Terakreditasi	16,67%	DINAS KESEHATAN
1.1.4.	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	1.1.4.1. Rasio KB Aktif	63,07%	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
		1.1.4.2. Persentase Angka pertumbuhan penduduk	0,56%	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
<b>Tujuan 1.2. : Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sebagai Bentuk Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan</b>				
<b>Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka</b>			<b>3,14%</b>	
1.2.1.	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	1.2.1.1. Persentase partisipasi angkatan kerja	38,06%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		1.2.1.2. Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	0,32%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		1.2.1.3. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	22,50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		1.2.1.4. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	106 usaha	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>Persentase Angka Kemiskinan</b>			<b>18,90%</b>	
1.2.2.	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.2.2.1. Jumlah PMKS	100.606 Jiwa	DINAS SOSIAL
		1.2.2.2. Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan)	4,00%	DINAS SOSIAL
1.2.3.	Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	1.2.3.1. Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	0,019%	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
		1.2.3.2. Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	50%	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
<b>MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN</b>				
<b>Tujuan 2.1. : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan Sebagai Bentuk Upaya Menurunkan Disparitas Ketersediaan Infrastruktur Antar Wilayah</b>				
<b>Indeks GINI (GINI Ratio)</b>				
2.1.1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	2.1.1.1. Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:		
		<i>Daratan:</i>		
		- Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	69,59%	DINAS PU. BINA MARGA
		- Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	85,79%	DINAS PU. BINA MARGA
		- Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	6.498 ha	DINAS PU. PENGAIRAN
		- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	71,540%	DINAS PU. PENGAIRAN
		<i>Kepulauan:</i>		
		- Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	51,82%	DINAS PU. BINA MARGA
		- Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	80,56%	DINAS PU. BINA MARGA
		- Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	353 ha	DINAS PU. PENGAIRAN
		- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	60,03%	DINAS PU. PENGAIRAN
2.1.2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	2.1.1.1. Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0784%	DINAS PERHUBUNGAN
		2.1.1.2. Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	81,35%	DINAS PERHUBUNGAN
2.1.3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.3.1. Indeks Kota Layak Huni		
		- Persentase rumah tinggal bersanitasi	75%	DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	43,7%	DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		- Persentase rumah layak huni	21%	DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		- Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	15%	DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	66%	KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
		2.1.3.2. Persentase tersedianya luasan RTH publik	22%	DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
<b>Tujuan 2.2 : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan SDA Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan</b>				
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>				
2.2.1.	Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA Dan Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	66,67	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.2.1.2. Indeks kualitas udara	72,96	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan	73,66	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
		2.2.1.4. Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UUKL-UPL/AMDAL)	472	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
2.2.2.	Meningkatnya Kualitas SDA Dan Lingkungan Hidup	2.2.2.1. Rasio elektrifikasi	54,47%	KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		2.2.2.2. Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	2,03%	KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BEI SAING TINGGI</b>				
<b>Tujuan 3.1. : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi, Kualitas Kelembagaan UMKM Koperasi Dan Pengembangan Wisata Daerah Serta Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal/Investasi Daerah, Industri Perdagangan</b>				
<b>% Pertumbuhan ekonomi</b>			<b>6,34%</b>	
<b>PDRB per kapita</b>			<b>23.427,15 (Milyar Rp)</b>	
3.1.1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	3.1.1.1. Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	2,92%	DINAS KOPERASI USAHA, KECIL DAN MENENGAH
		Persentase pertumbuhan UMKM	16%	DINAS KOPERASI USAHA, KECIL DAN MENENGAH
3.1.2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	3.1.2.1. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15%	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		3.1.2.2. Persentase jumlah kunjungan wisatawan	7%	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.1.3.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	3.1.3.1. Jumlah nilai investasi penanaman modal:		
		- Nilai Investasi PMDN	Rp 408.347.723.437	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
		- Nilai Investasi PMA	Rp 5.010.000.000	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
		3.1.3.1. Jumlah investor	4.663 Investor	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
3.1.3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	3.1.3.1. Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,22%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.1.3.2. Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	11,50%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
<b>Tujuan 3.2. : Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah</b>				
<b>Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)</b>			<b>80%</b>	
3.2.1.	Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	3.2.1.1. Jumlah produksi Tanaman pangan		
		- Padi (ton)	219.643,12	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		- Jagung (ton)	418.345,68	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		- Kedelai (ton)	7.121,03	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		- Ubi Kayu (ton)	104.387,40	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		3.2.1.2. Produktivitas tanaman pangan		
		- Padi (ton/ha)	6,74	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		- Jagung (ton/ha)	2,96	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		- Kedelai (ton/ha)	1,61	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		- Ubi Kayu (ton/ha)	14,87	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		3.2.1.3. Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Temak :		
		<i>Populasi Peternakan</i>		
		- sapi potong	356.655 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- kerbau	5.068 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- kuda	2.162 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- kambing	149.426 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- domba	38.606 ekor	DINAS PETERNAKAN

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)
		- ayam buras	778.684 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- ayam petelur	321.302 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- ayam pedaging	115.424 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- itik	56.167 ekor	DINAS PETERNAKAN
		- mentok	12.321 ekor	DINAS PETERNAKAN
		<i>Peningkatan Produksi Peternakan</i>		
		- Daging	4.386.096 kg	DINAS PETERNAKAN
		- Telur	2.707.419 kg	DINAS PETERNAKAN
		3.2.1.4. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)		
		Peningkatan Produksi Perkebunan :		
		- kelapa	42.643.00 ton	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		- tembakau	8,852.18 ton	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		- cabe jamu	9,869.28 ton	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		- jambu mete	4,822.84 ton	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		- siwalan	775.77 ton	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		Peningkatan produksi hasil perkebunan (ton) :		DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		- produksi lebah madu	3.73 ton	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		- kayu	2,594.20 m3	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		3.2.1.5. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis	11,7%	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
3.2.2.	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan	3.2.2.1. Produksi Perikanan :		
		- Jumlah hasil perikanan tangkap (ton)	47.100 ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		- Jumlah hasil perikanan budidaya (ton)	610.172 ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.2.2.2. Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	40,28 kg/kap/th	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.2.3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	3.2.3.1. Persentase kualitas gizi pangan daerah	76%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
		Persentase daerah rawan gizi	15%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL</b>				
<b>Tujuan 4.1. : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan</b>				
<b>Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
4.1.1.	Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	4.1.1.1. Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	22%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan	4.1.2.1. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	55%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	4.1.3.1. Jumlah desa sejahtera	27 desa	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
		4.1.3.2. Persentase desa yang tertib administrasi	100%	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
<b>Tujuan 4.2. : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>				
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah</b>				
4.2.1.	Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	4.2.1.1. Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	3.025 orang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.2.2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	4.2.2.1. Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	85%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>Tujuan 4.3. : Mewujudkan Kultur Dan Tata Pemerintahan Yang Tertib Dan Akuntabel</b>				
<b>Nilai Opini BPK</b>				
4.3.1.	Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai , Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	4.3.1.1. Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	85%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		4.3.1.2. Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	87%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		4.3.1.3. Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	0,20%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		4.3.1.4. Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	peringkat 34	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTODA SETDA
		4.3.1.5. Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	peringkat 58,50	BAGIAN ORGANISASI SETDA
4.3.2.	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	4.3.2.1. Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan	111 kali	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4.3.2.2. Jumlah naskah produk hukum Daerah	19 naskah	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.3.3.	Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	4.3.3.1. Persentase pertumbuhan PAD	-2,12%	DINAS PENGELOLAAN DAN ASET	PENDAPATAN, KEUANGAN
		4.3.3.2. Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	34,75%	DINAS PENGELOLAAN DAN ASET	PENDAPATAN, KEUANGAN
		4.3.3.3. Persentase Belanja modal terhadap total belanja	14,85%	DINAS PENGELOLAAN DAN ASET	PENDAPATAN, KEUANGAN
		4.3.3.4. Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	70%	INSPEKTORAT	
		4.3.3.5. Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	82%	INSPEKTORAT	

**MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA STAKEHOLDER DALAM PROS**

**PEMBANGUNAN**

**Tujuan 5.1. : Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial Dan Perlindungan**

**Masyarakat**

**% Jumlah Konflik**

5.1.1.	Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bermegara	5.1.1.1. Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	91%	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		5.1.1.2. Jumlah demo besifat sosial	48 demo	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.1.2.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	5.1.2.1. Angka Kriminalitas	16,49%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5.1.2.2. Persentase Penegakan Perda	90,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5.1.2.3. Persentase Pelanggaran K3	10,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5.1.2.4. Persentase penanganan daerah rawan bencana	70,75%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		5.1.2.5. Jumlah Korban Bencana	50 orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		5.1.2.6. Jumlah korban Bencana yang tertangani	50 orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

**Tujuan 6.1. : Meningkatkan Penguatan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pemberdayaan Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga**

**Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep**

6.1.1.	Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	6.1.1.1. Persentase kesenian lokal yang dikembangkan	7%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
6.1.2.	Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	6.1.2.1. Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi	10%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		6.1.2.2. Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	15%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>678.796.857.013</b>
<b>1.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>32.157.485.963</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.695.006.406
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.356.512.875
	- Program Pendidikan Anak Usia Dini	158.368.000
	- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	956.841.600
	- Program Pendidikan Menengah	1.031.492.000
	- Program Pendidikan Non Formal	2.329.951.250
	- Program Pendidikan Luar Biasa	18.850.000
	- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.030.540.000
	- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	19.384.018.332
	- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	264.266.000
	- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	228.000.000
	- Program Pengelolaan Keragaman Budaya	198.864.250
	- Program Peningkatan Kualitas Siswa	1.504.775.250
<b>2.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>158.472.720.174</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.688.263.800
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.432.633.159
	- Program peningkatan disiplin aparatur	368.850.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	128.391.250
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.500.000
	- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	30.524.478.450
	- Program Upaya Kesehatan Masyarakat	92.857.679.334
	- Program Pengawasan Obat dan Makanan	175.416.500
	- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	435.981.500

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program Perbaikan Gizi Masyarakat	687.160.000
	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	4.617.215.000
	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.168.079.000
	- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	759.616.050
	- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	17.558.526.131
	- Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	132.930.000
	- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	75.000.000
	- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	450.000.000
	- Pembinaan Lingkungan Sosial	4.350.000.000
<b>3.</b>	<b>RUMAH SAKIT DAERAH Dr. H. MOH. ANWAR</b>	<b>74.108.157.700</b>
	- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	27.208.157.700
	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	40.400.000.000
	- Pembinaan Lingkungan Sosial	5.500.000.000
	- Program Upaya Kesehatan Perorangan	1.000.000.000
<b>4.</b>	<b>DINAS PU BINA MARGA</b>	<b>87.953.910.138</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	760.933.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.095.677.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	52.203.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46.536.000
	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	30.414.290.113
	- Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	55.115.250.525
	- Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	75.365.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	318.655.500
	- Program Pelaksanaan Hari - hari Nasional	40.000.000
<b>5.</b>	<b>DINAS PU PENGAIRAN</b>	<b>46.885.097.435</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	439.019.988
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	488.242.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	50.300.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	51.550.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49.944.370
	- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.550.050.000
	- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	34.481.527.718
	- Program penyediaan dan pengolahan air baku	61.040.000
	- Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	596.727.900
	- Program pengendalian banjir	4.425.980.712
	- Program Tanggap Darurat Bencana Banjir	100.000.000
	- Program Pengembangan dan Pengelolaan Data Hidrologi	47.414.600
	- Program Pengendalian Abrasi Pantai	3.543.300.147
<b>6.</b>	<b>DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</b>	<b>45.734.410.701</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.226.623.324
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	995.039.284
	- Program peningkatan disiplin aparatur	194.100.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	108.081.000
	- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.993.216.000
	- Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.956.016.250
	- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	12.209.594.828
	- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1.249.059.400
	- Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	3.083.824.190
	- Program Pengembangan Perumahan	274.442.000
	- Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman	3.217.326.275
	- Program Perencanaan Tata Ruang	645.910.000
	- Program Pemanfaatan Ruang	809.895.650
	- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	97.482.500
	- Program Lingkungan Sehat Perumahan	78.000.000
	- Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	310.000.000
	- Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan	83.800.000
	- Program Pelaksanaan Hari - hari Nasional	102.000.000
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	16.000.000.000
<b>6.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>7.666.027.888</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	621.322.840
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	674.950.048

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program peningkatan disiplin aparaturnya	90.000.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	20.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.336.000
	- Program Pengembangan data/informasi	658.219.000
	- Program Kerjasama Pembangunan	146.623.000
	- Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	112.000.000
	- Program perencanaan pembangunan daerah	2.209.431.000
	- Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.303.608.000
	- Program perencanaan sosial budaya	984.300.000
	- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	107.195.000
	- Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	649.750.000
	- Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif	58.293.000
<b>7.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>51.427.651.197</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.298.621.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	12.240.006.250
	- Program peningkatan disiplin aparaturnya	62.998.750
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	31.184.750
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79.046.500
	- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	243.724.000
	- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.625.470.500
	- Program peningkatan pelayanan angkutan	1.440.354.047
	- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.031.500.000
	- Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	8.279.857.400
	- Program Pelaksanaan Hari - hari Nasional	94.887.500
<b>8.</b>	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>11.228.413.600</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	522.471.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	288.376.000
	- Program peningkatan disiplin aparaturnya	14.970.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	10.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.900.000
	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.923.245.000
	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.488.566.100
	- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2.018.162.000
	- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	481.127.500
	- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	394.756.000
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebersihan	488.840.000
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.500.000.000
	- Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan	30.000.000
	- Program Pelaksanaan Hari - hari Nasional	20.000.000
<b>9.</b>	<b>KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>	<b>5.161.498.844</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.254.844
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	1.221.998.100
	- Program peningkatan disiplin aparaturnya	112.710.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.121.000
	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	265.157.000
	- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	32.500.000
	- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	969.754.100
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebersihan	2.111.389.800
	- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	146.614.000
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<b>3.845.002.313</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	738.417.313
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	448.904.000
	- Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.657.681.000
<b>11.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>3.431.870.567</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	397.818.417
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	278.600.000
	- Program peningkatan disiplin aparaturnya	21.250.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	10.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.090.000
	- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	860.790.450
	- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	497.601.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program pembinaan anak terlantar	118.799.900
	- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	77.724.800
	- Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	179.863.500
	- Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	113.728.200
	- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	418.419.100
	- Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	449.185.200
<b>12.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>7.147.591.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	366.762.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	278.720.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000
	- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.095.650.000
	- Program Peningkatan Kesempatan Kerja	426.133.500
	- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	375.390.000
	- Program Pengawasan dan Pelatihan Kerja	49.935.500
	- Pembinaan Lingkungan Sosial	3.550.000.000
<b>13.</b>	<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>3.407.427.150</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.411.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	345.575.700
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.440.000
	- Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	88.496.000
	- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	417.282.000
	- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	284.395.000
	- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	627.826.950
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.100.000.000
<b>14.</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>10.603.556.300</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.340.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212.820.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.320.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.560.000
	- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	90.000.000
	- Program Pengelolaan Keragaman Budaya	921.000.000
	- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	1.135.000.000
	- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	800.000.000
	- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	850.000.000
	- Program Pengembangan Kemitraan	139.600.000
	- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	24.020.000
	- Program peningkatan peran serta kepemudaan	63.930.000
	- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	107.000.000
	- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	17.416.000
	- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	156.258.500
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.280.246.800
	- Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	133.045.000
<b>15.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>2.465.247.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.892.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	117.157.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22.000.000
	- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	79.126.000
	- Program pengembangan wawasan kebangsaan	218.770.000
	- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	284.504.000
	- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	368.505.000
	- Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	487.784.000
	- Program pendidikan politik masyarakat	287.509.000
	- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	200.000.000
<b>16.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>1.357.970.925</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129.867.491
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	134.158.434
	- Program peningkatan disiplin aparatur	67.763.000
	- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan	977.730.000
	- Program kemitraan pengembangan wawasan	48.452.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	
<b>17.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>32.925.403.217</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.747.100.625
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.809.345.142
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	470.806.250
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44.222.500
	- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	28.829.968.700
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	23.960.000
<b>18.</b>	<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>	<b>21.216.922.143</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.487.702.075
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.431.813.741
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	351.775.500
	- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	11.017.329.077
	- Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	62.500.000
	- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	1.815.801.750
<b>19.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>6.970.857.650</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.258.391.600
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	581.763.200
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	67.975.000
	- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.916.119.950
	- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.842.934.500
	- Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	323.673.400
<b>20.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>3.662.384.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	870.607.750
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	173.749.500
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	54.140.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.852.000
	- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	39.271.400
	- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.192.330.600
	- Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	199.840.750
	- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	68.592.000
<b>21.</b>	<b>BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>	<b>1.325.065.384</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.582.950
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	114.401.500
	- Program peningkatan disiplin aparatur	20.000.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.000.000
	- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	208.290.434
	- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan	282.800.000
	- Program Penataan dan Peraturan Perundang-undangan Perizinan	165.000.000
	- Program Pengembangan Data Informasi	81.990.500
<b>22.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>1.536.875.600</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	530.148.600
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	305.748.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.480.000
	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	330.983.500
	- Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam	93.719.500
	- Program Pengerahan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat	173.796.000
	- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90.000.000
<b>23.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>33.739.720.126</b>
<b>a.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM</b>	<b>11.721.017.353</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.707.833.300
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.814.108.100
	- Program peningkatan disiplin aparatur	360.066.400
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.341.000
	- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.482.947.553
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	210.318.500
	- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	109.402.500

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
b.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN</b>	<b>7.072.651.788</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.269.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	106.207.000
	- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	126.852.000
	- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	5.492.286.500
	- Program Sarana Promosi Unggulan Daerah	296.255.000
	- Program Peningkatan Kemampuan Berusaha	595.647.288
	- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	368.135.000
c.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTODA</b>	<b>1.911.364.740</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	142.886.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	322.116.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	86.161.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	130.753.740
	- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	60.168.000
	- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	144.498.000
	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	266.505.000
	- Program Penataan Wilayah Perbatasan	683.072.500
	- Program Unit Pelayanan Terpadu (Samsat Perizinan)	60.956.500
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	14.247.500
d.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>2.499.069.455</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.710.350
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12.230.000
	- Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	776.076.400
	- Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	133.331.000
	- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	976.596.705
	- Program Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	373.125.000
e.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM</b>	<b>1.807.048.600</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.410.100
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	130.540.000
	- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	562.996.500
	- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	288.508.950
	- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	303.893.050
	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	212.633.000
	- Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	220.067.000
f.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI</b>	<b>1.639.300.078</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.641.078
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44.700.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85.700.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	206.790.500
	- Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	430.775.350
	- Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	161.453.900
	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	547.239.250
g.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>	<b>1.711.175.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	638.928.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	180.981.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	27.721.000
	- Program Sarana Promosi Unggulan Daerah	604.424.000
	- Program Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan	168.390.000
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	90.731.000
h.	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.155.819.862</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	252.757.556
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83.244.000
	- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	584.096.250
	- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	143.155.000
	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	452.925.056
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	639.642.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
<b>I.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>3.222.273.250</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	114.444.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	49.908.000
	- Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan	3.057.921.250
<b>24.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI</b>	<b>300.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133.785.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44.340.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	18.675.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3.000.000
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	15.000.000
	- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	85.200.000
<b>25.</b>	<b>KECAMATAN KOTA SUMENEP</b>	<b>480.800.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.774.300
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43.480.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	19.000.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	191.949.700
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	16.596.000
<b>26.</b>	<b>KECAMATAN KALIANGET</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	139.064.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	221.070.500
	- Program peningkatan disiplin aparatur	7.500.000
	- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	18.770.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	41.150.000
	- Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	37.445.000
<b>27.</b>	<b>KECAMATAN TALANGO</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.727.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	226.648.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	139.501.500
	- Program Peningkatan Kemampuan Berusaha	10.123.000
<b>28.</b>	<b>KECAMATAN MANDING</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.550.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	183.750.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	16.900.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	128.800.000
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	5.000.000
<b>29.</b>	<b>KECAMATAN BLUTO</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124.479.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	207.756.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	10.850.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	21.285.500
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	100.629.000
<b>30.</b>	<b>KECAMATAN SARONGGI</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.116.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	254.937.500
	- Program peningkatan disiplin aparatur	20.150.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	62.796.000
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN LENTENG</b>	<b>480.700.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.314.200
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	188.832.800
	- Program peningkatan disiplin aparatur	18.750.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	125.878.000
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	19.925.000
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN GILIGENTING</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.854.100
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	184.376.700
	- Program peningkatan disiplin aparatur	19.968.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	104.801.200
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN GULUK-GULUK</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.461.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	191.989.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	12.600.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	105.950.000
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN GANDING</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138.550.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	197.325.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	12.150.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	116.975.000
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN PRAGAAN</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	144.260.300
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	228.720.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	22.200.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	69.819.700
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN RUBARU</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88.355.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	294.556.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	18.200.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	63.889.000
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN AMBUNTEN</b>	<b>480.700.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	146.633.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	271.308.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	6.600.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.438.000
	- Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	12.721.000
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN PASONGSONGAN</b>	<b>480.700.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.154.700
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92.638.300
	- Program peningkatan disiplin aparatur	23.400.000
	- Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	15.000.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	164.657.000
	- Program Peningkatan Kemampuan Berusaha	14.850.000
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN DASUK</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.122.200
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	231.810.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	7.500.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	64.567.800
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	10.000.000
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN BATANG-BATANG</b>	<b>480.700.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	143.470.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	199.436.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	27.200.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	110.594.000
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN BATU PUTIH</b>	<b>480.700.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	117.734.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	159.235.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	26.100.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	177.630.500
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN GAPURA</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.944.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	195.823.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	28.800.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	99.433.000
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN DUNGKEK</b>	<b>480.700.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166.243.400
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96.577.100
	- Program peningkatan disiplin aparatur	9.600.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	196.396.000
	- Program Peningkatan Kemampuan Berusaha	11.883.500
<b>44.</b>	<b>KECAMATAN GAYAM</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.380.560
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	142.141.440
	- Program peningkatan disiplin aparatur	25.650.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	140.923.000
	- Program Peningkatan Kemampuan Berusaha	16.905.000
<b>45.</b>	<b>KECAMATAN NONGGUNONG</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.890.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	166.447.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	13.225.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	125.162.000
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	14.650.000
	- Program Peningkatan Kemampuan Berusaha	14.626.000
<b>46.</b>	<b>KECAMATAN RAAS</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.230.800
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	155.741.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	19.190.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	148.838.200
<b>47.</b>	<b>KECAMATAN MASALEMBU</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.317.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	260.021.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	7.650.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.012.000
<b>49.</b>	<b>KECAMATAN ARJASA</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	294.500.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	24.500.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	41.000.000
<b>50.</b>	<b>KECAMATAN SAPEKEN</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.207.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	193.400.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	7.750.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	115.643.000
<b>51.</b>	<b>KECAMATAN BATUAN</b>	<b>465.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.128.400
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	173.058.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	21.000.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	155.228.600
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Nasional	16.585.000
<b>52.</b>	<b>KECAMATAN KANGAYAN</b>	<b>480.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.000.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	146.500.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000
	- Program Pembinaan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	132.500.000
<b>53.</b>	<b>KELURAHAN BANGSELOK</b>	<b>150.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104.241.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	40.808.500
	- Program peningkatan disiplin aparatur	4.950.000
<b>54.</b>	<b>KELURAHAN KARANGDUAK</b>	<b>150.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	113.010.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	32.445.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	4.200.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	345.000
<b>55.</b>	<b>KELURAHAN KEPANJEN</b>	<b>150.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.240.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	47.260.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	7.500.000
<b>56.</b>	<b>KELURAHAN PAJAGALAN</b>	<b>150.000.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.608.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	48.792.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	5.500.000
	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	11.100.000
<b>57.</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>6.719.997.486</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	591.509.800
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	401.511.786
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.182.500
	- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	646.950.050
	- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	160.000.000
	- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	190.000.000
	- Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	77.625.000
	- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	340.000.000
	- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000.000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program Keluarga Berencana	3.956.218.350
	- Program Keluarga Sejahtera	285.000.000
<b>58.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>2.568.252.650</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	389.672.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	255.085.740
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000
	- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.015.295.000
	- Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	32.500.000
	- Program kerjasama informasi dan media massa	795.719.910
<b>59.</b>	<b>KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI</b>	<b>1.392.339.862</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	464.389.862
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	192.550.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.000.000
	- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	517.400.000
	- Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	57.200.000
	- Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	142.800.000
<b>II</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>99.144.305.350</b>
<b>1.</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN</b>	<b>34.742.935.931</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	421.155.331
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	200.692.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.800.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.643.000
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1.040.215.000
	- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	50.000.000
	- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	32.204.430.600
	- Program Pengembangan Agribisnis	770.000.000
<b>2.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN</b>	<b>9.609.764.000</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	324.600.000
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	285.400.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80.823.000
	- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	51.000.000
	- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	137.000.000
	- Program peningkatan produksi hasil peternakan	303.441.000
	- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1.027.000.000
	- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	154.500.000
	- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.557.030.000
	- Program Pengembangan Budidaya Ternak	300.000.000
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	942.970.000
	- Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	4.436.000.000
<b>3.</b>	<b>DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b>	<b>13.610.593.758</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	447.216.658
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	31.180.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.102.500
	- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	183.990.000
	- Program rehabilitasi hutan dan lahan	8.040.694.600
	- Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	63.800.000
	- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	46.613.000
	- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	39.400.000
	- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	217.597.000
	- Peningkatan Kualitas Bahan Baku	4.500.000.000
<b>4.</b>	<b>KANTOR ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>4.532.922.678</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	447.392.250
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	219.195.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	8.800.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	120.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.200.000
	- Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	3.118.563.428

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	- Program Pembinaan Explorasi Air Tanah / Air Bawah Tanah	501.018.750
	- Program Pengembangan Energi / Tenaga Minyak dan Gas Bumi	105.753.250
<b>5.</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>12.185.077.583</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	431.919.500
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	171.624.000
	- Program peningkatan disiplin aparatur	21.000.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.656.000
	- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	73.045.000
	- Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	101.450.000
	- Program pengembangan perikanan tangkap	5.635.814.000
	- Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	850.858.883
	- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	399.906.000
	- Program pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	4.456.804.200
<b>6.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>24.463.011.400</b>
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	291.957.800
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	335.977.500
	- Program peningkatan disiplin aparatur	25.600.000
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000
	- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.371.800
	- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.207.215.400
	- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	707.708.500
	- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	351.560.000
	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.139.694.586
	- Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	13.324.685.814
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.396.005.000
	- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	91.800.000
	- Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar	281.240.000
	- Program Pembinaan Industri	262.195.000
<b>JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG</b>		<b>777.941.162.363</b>

Sumenep, Pebruari 2016

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP RPJMD TAHUN 2016-2021

**“SUMENEP MAKIN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN MANDIRI, AGAMIS, NASIONALIS, TRANSPARAN, ADIL DAN PROFESIONAL”**

## MISI 1 :

**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

### TUJUAN 1.1 :

MENINGKATKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN SERTA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Pendidikan}} \times I_{\text{Pengeluaran}}}$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I Kesehatan = Angka Harapan Hidup (Umur panjang dan hidup sehat)</li> <li>I Pendidikan = Angka Harapan Lama Sekolah (Pengetahuan)</li> <li>I Pengeluaran = lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (Standar hidup layak)</li> </ul>	%	62,66	63,12	64,51	65,23	66,32	67,8

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	IP = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks rata-rata lama sekolah)	%	61,5	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	1. Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	$\frac{(\Sigma \text{Lama Pendidikan} \times \text{Siswa setiap jenjang})}{\Sigma \text{Penduduk Usia Sekolah}} \times 100\%$	%	78,98	79,34	79,70	80,06	80,42	80,78		
	2. Angka rata-rata lama sekolah	$\frac{\Sigma \text{penduduk (usia diatas 15 th) yang bisa menulis pada tahun t}}{\Sigma \text{penduduk usia 15 th keatas}} \times 100\%$	Tahun	5,90	6,28	6,42	6,69	6,70	7,13		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
	3. Persentase jumlah sekolah terakreditasi:										
	- Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	$\frac{\sum \text{sekolah SD/MI terakreditasi}}{\sum \text{sekolah}} \times 100\%$	%	60	70,10	80,30	90,25	95,40	97,20		
	- Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	$\frac{\sum \text{sekolah SMP/MTS terakreditasi}}{\sum \text{sekolah}} \times 100\%$	%	60,25	72,20	76,80	81,30	88,60	93,40		
	- Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	$\frac{\sum \text{sekolah SMA/SMK/MA terakreditasi}}{\sum \text{sekolah}} \times 100\%$	%	61,3	71,80	75,40	82,30	89,70	94,20		
2. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	1. Jumlah kunjungan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah	Orang	19.155	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	2. IKM layanan perpustakaan	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor yang Terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	skor	73.54	74.64	75.75	77.22	78.69	80.16		
3. Meningkatkan Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	1. Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Tahun	70,42	70,2	70,28	70,32	70,41	70,5		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	2. Persentase Penduduk yang dilindungi JKN/Asuransi Kesehatan	$\frac{\sum \text{Penduduk yang dijamin JKN}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	%	57	59	61	63	65	65		
	3. Persentase jumlah puskesmas terakreditasi	$\frac{\sum \text{Puskesmas yang lulus penilaian akreditasi}}{\sum \text{Puskesmas}} \times 100\%$	%	0	16,67	50	100	100	100		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
4. Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kesehatan	1. Rasio Akseptor KB aktif	$\frac{\sum \text{akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun}}{\sum \text{pasangan usia subur pada tahun yang sama}} \times 100\%$	%	62,07	63,07	64,07	65,07	66,07	67,07		Program Keluarga Berencana
	2. Persentase Angka pertumbuhan penduduk	Data Bapedda	%	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56		

TUJUAN 1.2 :  
MENINGKATKAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEBAGAI BENTUK UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%	3,17	3,14	3,11	3,08	3,05	3,02

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	1. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\sum \text{pekerja usia angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk usia angkatan kerja}} \times 100\%$	%	73,96	74,03	74,10	74,11	74,17	74,24		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja P
	2. Persentase Penurunan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Masuk Kepengadilan	$\frac{(\sum \text{kasus Perselisihan HI thn (n) - thn (n-1)})}{(\text{Perkara Perselisihan HI thn (n-1)})} \times 100\%$	%	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
	Hubungan Industrial										
	3 . Pencari Kerja Yang Ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja}} \times 100\%$	%	37,66	38,06	38,46	38,86	39,26	39,66		Program Pengawasan dan Pelatihan Kerja
	4 . Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan}}{\sum \text{pekerja/buruh}} \times 100\%$	Peserta	3367	3.895	3.957	4.085	4.211	4.405		

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Persentase Angka Kemiskinan</b>	<b>GK = GKM + GKNM</b> <i>dimana :</i> GK : Garis Kemiskinan GKM : Garis Kemiskinan Makanan GKNM:Garis Kemiskinan Non Makan	%	19,68	18,90	18,16	17,45	16,76	16,10

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah PMKS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Keluarga per tahun berkenaan	orang	85.606	100.606	100.606	100.606	100.606	100.606		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
											(PMKS) Lainnya
	2. Persentase PMKS Yang Ditangani (pemberdayaan PMKS)	$\frac{\sum \text{PMKS yang diberdayakan tahun berkenaan}}{\sum \text{PMKS}} \times 100\%$	%	3,88	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40		
3. Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT Dan Anak	$\frac{\sum \text{Kasus Dalam Rumah Tangga}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$	%	0,089	0,019	0,021	0,022	0,025	0,028		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	2. Persentase Kasus KDRT dan Anak Terselesaikan	$\frac{\sum \text{Kasus Yang Terselesaikan}}{\sum \text{Kasus (Pengaduan)}} \times 100\%$	%	50	50,00	54,55	57,38	58,82	60,81		

**MISI 2 :**  
**MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER**  
**DAYA ALAM SERTA LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

TUJUAN 2.1 :  
 MENINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN TRANSPORTASI DI DARATAN DAN WILAYAH KEPULAUAN SEBAGAI  
 BENTUK UPAYA MENURUNKAN DISPARITAS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR ANTAR WILAYAH

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Indeks GINI (GINI Ratio)</b>	$GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$ Keterangan : • fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. • Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.	%	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik:										
	<i>Daratan:</i>										
	- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	$\frac{\sum \text{panjang jalan yang kondisinya baik, tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jalan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	68,04	69,59	70,82	71,76	72,80	73,74		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
	- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\sum \text{jembatan yang kondisi baik tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jembatan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	84,83	85,79	86,70	87,56	88,89	89,66		
	- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Luas daerah irigasi yang sudah dapat diairi dengan irigasi teknis, tahun berkenaan		6458	6.498	6.528	6.568	6.598	6.638		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang sudah ada}}{\text{Panjang jaringan irigasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$	%	70	71,54	73,08	74,62	76,16	77,70		
	<i>Kepulauan:</i>										
	- Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	$\frac{\sum \text{panjang jalan yang kondisinya baik, tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jalan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	50,2	51,82	52,37	51,09	54,02	55,61		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	- Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\sum \text{jembatan yang kondisi baik tahun berkenaan}}{\sum \text{panjang jembatan, tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	79,31	80,56	81,82	82,86	83,33	84,21		
	- Daerah Irigasi Yang Dapat Diairi Dengan Irigasi Teknis (Ha)	Luas daerah irigasi yang sudah dapat diairi dengan irigasi teknis, tahun berkenaan	%	298	353	353	353	353	353		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	- Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi yang sudah ada}}{\text{Panjang jaringan irigasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$	%	60	60,03	60,06	60,09	60,12	60,15		
2 Meningkatkan Sarana Dan Prasarana	1 Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	$\frac{\sum \text{Lakalantas pada Th. N}}{\sum \text{kendaraan pada Th. N}} \times 100\%$	%	0,0794	0,0784	0,0774	0,0764	0,0754	0,0744		Program peningkatan pelayanan angkutan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
Transportasi	2 . Persentase Kecukupan Angkutan Umum Yang Layak	$\frac{\Sigma \text{angkutan umum yg lulus uji pada Th. N}}{\Sigma \text{angkutan umum wajib uji pada Th. N}} \times 100\%$	%	80,15	81,35	82,55	83,75	84,95	86,15		
3 . Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman / Perumahan Secara Memadai	1 . Indeks Kota Layak Huni :										
	- Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi	$\frac{\Sigma \text{rumah tinggal bersantiasi}}{\Sigma \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	%	70	75	80	90	100	100		
	- Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	$\frac{\Sigma \text{rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih}}{\Sigma \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	%	40,2	43,7	47,2	50,7	54,2	57,7		
	- Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\Sigma \text{rumah tinggal layak huni}}{\Sigma \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	%	20	21	22	23	24	25		
	- Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	$\frac{\Sigma \text{lingkungan pemukiman kumuh yang ditangani}}{\Sigma \text{lingkungan pemukiman kumuh}} \times 100\%$	%	20	15	10	5	0	0		
	- Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget Dan Batuan)	$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang Terlayani Sampah 3 kecamatan}}{\text{Jumlah Penduduk di 3 Kec.}} \times 100\%$	%	65	66	67	68	69	70		
	2 . Tersedianya Luasan RTH Publik	$\frac{\Sigma \text{luasan RTH Publik yang tersedia diwilayah kota kawasan perkotaan}}{\Sigma \text{luasan RTH publik yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	%	17	22	27	32	37	42		

TUJUAN 2.2 :  
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	$IKLH \text{ Kabupaten} = (30\%)IPA + (30\%)ISPU + (40\%)ITH$ dimana: 1. IKLH_Kabupaten = indeks kualitas lingkungan tingkat Kabupaten Sumenep 2. IPA = indeks pencemaran air sungai 3. ISPU = indeks standar pencemar udara 4. ITH = indeks tutupan hutan		69,60	71,35	72,17	72,81	74,45	75,09

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air Sungai	$P_{ij} = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 R}}{2}$		63,33	66,67	66,67	66,67	70,00	70,00		
	2. Indeks Kualitas Udara	1. Indeks Udara IKLH = $100 - [50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ 2. $I_{eu}$ = rata rata (SO2 hasil pemantauan dibagi SO2 Ref EU, dan NO2 hasil pemantaun dibagi NO2 Ref EU)		71,03	72,96	74,51	76,06	77,62	79,17		
	3. Indeks Tutupan Lahan	$ITV = 100 - (84,3 - (TV \times 100)) \times (50 / 54,3)$ $TV = \frac{LTV}{L.W}$		73,24	73,66	74,54	74,98	75,42	75,58		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
	4. Jumlah Industri/Perusahaan/ Badan Usaha Yang Melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)	Pertambahan Jumlah industri yang mempunyai Dokumen Lingkungan = Jumlah Industri yang mempunyai dokumen lingkungan tahun sebelumnya + Jumlah Industri yang mempunyai dokumen lingkungan pada tahun berjalan		422	472	522	572	622	672		
2. Meningkatkan kualitas SDA dan lingkungan hidup	1. Rasio Elektrifikasi	$\frac{\Sigma \text{KK atau rumah yang mendapat pemenuhan energi listrik}}{\Sigma \text{ seluruh KK atau rumah se kab. Sumenep}} \times 100\%$	%	52,47	54,47	56,47	58,47	60,47	62,47		
	2. Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan	$\frac{\text{Anggaran tahun dasar pemanfaatan energi terbarukan}}{\Sigma \text{ untuk pemenuhan jaringan listrik}} \times 100\%$	%	2,02	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07		

**MISI 3 :**  
**MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI**  
**LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI**

TUJUAN 3.1 :

MENINGKATKAN KEGIATAN EKONOMI, KUALITAS KELEMBAGAAN UMKM KOPERASI DAN PENGEMBANGAN WISATA DAERAH SERTA  
 MENINGKATKAN KINERJA PENANAMAN MODAL/INVESTASI DAERAH, INDUSTRI PERDAGANGAN

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>% Pertumbuhan Ekonomi</b>	$G = \frac{(PNrii1 - PNrii0)}{PNrii0} \times 100\%$ <p><b>Dimana :</b>                      1. G = tingkat pertumbuhan ekonomi                      2. PNrii1 = pendapatan kabupaten untuk tahun dimana tingkat pertumbuhannya ekonominya dihitung.                      3. PNrii0 = pendapatan kabupaten pada tahun berikutnya</p>	%	6,23	6,34	6,43	6,2	5,89	6,31
<b>PDRB Per Kapita</b>	$PDRB \text{ Perkapita}_t = \frac{PDRB_t}{Jumlah \text{ Penduduk}_t}$ <p>Dimana:                      PDRB per kapita menghitung membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan untuk membagi adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah</p>	Milyar Rp	21.750,48	23.427,15	25.286,53	27.293,48	29.459,72	31.797,89

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{KSP/USP Koperasi Sehat}}{\text{KSP/USP Koperasi aktif}} \times 100$	%	2,9	2,92	2,94	2,96	2,98	3		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	2. Persentase Pertumbuhan UMKM	$= \frac{\Sigma \text{UMKM thn sekarang} - \text{Jml}}{\text{UMKM thn lalu}} \times 100\%$	%	15	16	17	18	19	20		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Meningkatkan Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	$= \frac{\text{Target PAD tahun berkenaan} - \text{Target PAD tahun sebelumnya}}{\text{Target PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	13	15	15	15	15	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	$= \frac{\Sigma \text{pengunjung tahun berkenaan} - \text{jumlah pengunjung tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{pengunjung tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	6	7	8	9	10	11		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Meningkatkan Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	1. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal:										
	- Nilai Investasi PMDN	Jumlah nilai PMDN tahun berkenaan	Rp	396.069.566.864	408.347.723.437	421.021.949.576	435.280.453.984	449.935.027.958	465.381.741.065		Program Pengembangan Data Informasi
	- Nilai Investasi PMA	Jumlah nilai PMA tahun berkenaan	Rp	5.000.000.000	5.010.000.000	5.015.030.000	5.020.060.120	5.025.100.301	5.030.150.602		
	2. Jumlah Investor	Jumlah investor tahun berkenaan	%	4.239	4.663	5.129	5.642	6.206	6.827		
4. Meningkatkan Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	1. Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB	Data Stastitik	%	5,16	6,22	6,28	6,28	6,28	6,41		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	2. Persentase Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	Data Stastitik	%	10,45	11,50	12,18	12,92	13,30	13,84		- Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan - Program

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
											Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

TUJUAN 3.2 :  
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN DAERAH

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<p>Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan</p> <p>Skor PPH :</p> $(\%)AKG = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$ <p>Dimana: Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum</li> <li>• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian</li> </ul>	%	79	80	81	82	83	84

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAIPI TUJUAN SASARAN			
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD		
1. Meningkatkan Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan :	Jumlah Produksi Tanaman pada areal yang di panen (ton)											
	- Jumlah Produksi Padi		ton	216.498,00	219.643,12	223.570,50	227.637,87	232.170,12	237.525,12				
	- Jumlah Produksi Jagung		ton	405.809,00	418.345,68	424.745,64	432.013,58	440.157,90	450.684,29				
	Jumlah Produksi Kedelai		ton	7.006,00	7.121,03	7.408,26	7.553,42	7.714,56	7.891,95				
	- Jumlah Produksi Ubi kayu		ton	103.678,00	104.387,40	105.028,20	105.670,40	106.384,50	107.029,60				
	2. Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman yang dipanen per hektar (ton/ha)											
	- Tingkat Produktivitas Padi		ton/ha	6,71	6,74	6,78	6,81	6,84	6,88				
	- Tingkat Produktivitas Jagung		ton/ha	2,9	2,96	2,97	2,98	2,99	3,01				
	- Tingkat Produktivitas Kedelai		ton/ha	1,6	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65				
	- Tingkat Produktivitas Ubi kayu		ton/ha	14,79	14,87	14,94	15,01	15,09	15,16				
	3. Persentase Jumlah Produksi Hasil Ternak:	- Jumlah populasi ternak (ekor) - Jumlah produksi ternak (kg)											
	<i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>												
	- sapi potong		ekor	353.124	356.655	360.222	363.824	367.462	371.137				
	- Kerbau		ekor	5.043	5.068	5.094	5.119	5.145	5.170				
	- Kuda		ekor	2.151	2.162	2.173	2.183	2.194	2.205				
	- Kambing		ekor	148.683	149.426	150.174	150.924	151.679	152.437				
- Domba		ekor	38.414	38.606	38.799	38.993	39.188	39.384					
- ayam buras		ekor	776.742	778.684	780.631	782.582	784.539	786.500					

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
	- ayam petelur		ekor	319.703	321.302	322.908	324.523	326.145	327.776		
	- ayam pedaging		ekor	114.850	115.424	116.001	116.581	117.164	117.750		
	- Itik		ekor	56.027	56.167	56.307	56.448	56.589	56.731		
	- Mentok		ekor	12.290	12.321	12.352	12.382	12.413	12.444		
	4. <i>Peningkatan Produksi Peternakan:</i>										
	- Jumlah Produksi daging		Kg	4.342.669,00	4.386.095,69	4.429.956,65	4.474.256,21	4.518.998,78	4.564.188,76		
	- Jumlah Produksi Telur		Kg	2.680.613,00	2.707.419,13	2.734.493,32	2.761.838,25	2.789.456,64	2.817.351,20		
	5. Jumlah produksi hasil perkebunan (ton) :	- Jumlah Produksi komoditi - Mengukur perkembangan produksi tanaman perkebunan									
	<i>Peningkatan Produksi Perkebunan:</i>										
	- Kelapa		Ton	42442,92	42.643,00	42.239,32	42.642,76	42.241,18	42.663,92		
	- Tembakau		Ton	9244,92	8.852,18	8.840,27	9.244,58	8.838,75	9.242,28		
	- cabe jamu		Ton	9868,69	9.869,28	9.974,01	9.865,92	9.865,28	9.868,15		
	- jambu mente		Ton	4974,31	4.822,84	4.823,44	4.974,94	4.822,48	4.822,31		
	- Siwalan		ton	744,37	775,77	776,97	776,27	776,37	776,37		
	<i>Peningkatan Produksi Kehutanan:</i>										
	- produksi lebah madu		ton	3,73	3,73	3,77	3,77	3,73	3,73		
	- Kayu		m3	2594,2	2.594,20	2.867,20	2.867,20	2.594,20	2.594,20		
	6. Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$= \frac{\text{Luas hutan rakyat yang direhabilitasi}}{\Sigma \text{ luas hutan rakyat}} \times 100\%$	%	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7		
2. Meningkatkan Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber	1. Produksi Perikanan :	- Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berkenaan - Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan									

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
Daya Laut Yang Berkelanjutan	- Jumlah hasil perikanan tangkap		ton	46.739,50	47.100	47.600	48.100	48.600	49.000		
	- Jumlah hasil perikanan budidaya		ton	600.792,99	610.172	628.459	647.294	666.693	666.675		
	2. Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan tahun berkenaan	kg/kap/ton	39,88	40,28	40,68	41,09	41,5	41,92		
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Persentase Kualitas Gizi Pangan Daerah	Prosentase rata-rata jumlah dan kualitas yang tersedia di wilayah berdasar pada kebutuhan gizi aktual pada tahun berjalan	%	74	76	78	80	82	84		
	2. Persentase Daerah Rawan Gizi	$= \frac{\sum \text{desa rawan pangan pada tahun berkenaan}}{\sum \text{desa}} \times 100\%$	%	16	15	14	12	11	9		

**MISI 4 :**  
**MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL**  
 TUJUAN 4.1 :  
 MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	$\frac{\text{Jumlah Usulan Desa dan Kecamatan yang Terakomodir di Dokumen Perencanaan}}{\text{Jumlah Total Usulan Perencanaan Daerah}} \times 100\%$	%	30	35	40	45	50	55

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	1. Persentase Usulan Desa Dan Kecamatan Yang Terakomodir Di Dokumen Perencanaan	$\frac{\Sigma \text{ usulan yang masuk APBD}}{\Sigma \text{ usulan Musreimbang}} \times 100$	%	20	22	24	26	30	35		
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan	1. Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	$\frac{\Sigma \text{ kegiatan RKPD yg diakomodir di APBD}}{\Sigma \text{ kegiatan RKPD}} \times 100$	%	50	55	60	65	70	75		
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	1. Jumlah Desa Sejahtera	Jumlah Desa yang Diintervensi dalam Pembangunan Desa Mandiri (Sejahtera)	desa	0	27	54	81	108	135		
	2. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	$\frac{\Sigma \text{ Desa yang menyampaikan Laporan (RPJMDes, RKPDdes, APBDdes dan LPD)}}{\Sigma \text{ Desa se Kabupaten Sumenep}} \times 100$	%	100	100	100	100	100	100		

TUJUAN 4.2 :  
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) Terhadap Layanan Publik Daerah</b>	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Tersisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \frac{1}{9} = 0,11$	Nilai	79,00	79,42	79,83	80,25	80,67	81,08

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	1. Jumlah Pengunjung Terhadap Website Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengunjung website instansi pemerintah daerah tahun berkenaan	Orang	2987	3.025	3.167	3.287	3.399	3.500		
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas/ Telah Menikah Memiliki E-KTP	$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang ber KTP}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \times 100$	%	77	85	88	91	94	97		

TUJUAN 4.3 :  
MEWUJUDKAN KULTUR DAN TATA PEMERINTAHAN YANG TERTIB DAN AKUNTABEL

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nilai Opini BPK</b>	<b>Hasil Evaluasi Kepatuhan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Negara oleh BPK</b>	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	1. Persentase Penempatan ASN Yang Sesuai Dengan Kompetensi	$\frac{\Sigma \text{pejabat struktural yg sesuai persyaratan kepangkatan}}{\Sigma \text{pejabat struktural}} \times 100$	%	80	85	85	85	90	90		
	2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai Dengan Kebutuhan Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	$\frac{\Sigma \text{jabatan struktural terisi}}{\Sigma \text{jabatan sesuai SOTK}} \times 100$	%	86	87	89	91	93	94		
	3. Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	$\frac{\Sigma \text{kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Pegawai ASN}} \times 100$	%	0,46	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		
	4. Nilai Rangking LPPD se-Jawa Timur	Hasil Evaluasi KPPD oleh Kementerian Dalam Negeri Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat	35	34	33	31	29	27		
	5. Nilai Rangking Sakip se-Jawa Timur	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian PAN & RB. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,	Peringkat	50,5	58,50	65,00	70,00	75,00	79,00		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
		Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.									
2. Meningkatkan Pelayanan Fungsi Legislatif	1. Jumlah Risalah Rapat/Sidang Paripurna DPRD Yang Dihasilkan	Jumlah rapat paripurna yang diterbitkan risalah rapat	Kali	45	111	181	247	312	379		
	2. Jumlah Naskah Produk Hukum Daerah	Jumlah Naskah Raperda, Peraturan DPRD serta	Naskah	16	19	22	23	23	20		
3. Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Auditabel	1. Persentase Pertumbuhan PAD	$= \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	%	6,35	-2,12	15	15	15	15		
	2. Persentase Luas Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	$= \frac{\text{Tanah yang bersertifikat}}{\text{Total Tanah milik daerah}} \times 100\%$	%	34,69	34,75	34,81	34,87	34,93	34,99		
	3. Persentase Belanja Modal Terhadap Total Belanja	$= \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$	%	18,90	14,85	17,70	19,12	20,82	22,02		
	4. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	$= \frac{\sum \text{tindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK}}{\sum \text{Rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%$	%	60	70	75	80	80	90		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	5. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	$= \frac{\sum \text{tindaklanjuti Rekomendasi LHP Inspektorat}}{\sum \text{Rekomendasi LHP Inspektorat}} \times 100\%$	%	79	82	84	87	90	95		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

**MISI 5 :  
MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA  
STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN**

TUJUAN 5.1 :  
MENINGKATKAN KUALITAS NILAI-NILAI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA  
MENJAGA STABILITAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
% Jumlah Konflik Sosial	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$ Keterangan: • P : Persentase • F : jumlah penanganan kasus konflik social • N : Jumlah demo yang ditangani	%	1	1	1	1	1	1

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Meningkatkan Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	1. Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial Dan Keagamaan	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang ditangani}}{\sum \text{konflik sosial seluruhnya}} \times 100\%$	%	90	91	92	93	94	95		
	2. Jumlah Demo Besifat Sosial	Jumlah demo yang ditangani		100	100	100	100	100	100		
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Perlindungan	1. Angka Kriminalitas	Jumlah kasus pelanggaran pidana tahun berkenan	%	17,49	16,49	15,39	14,28	13,15	12,02		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
n Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)											
	2. Persentase Penegakan Perda	$\frac{\Sigma \text{ pelanggaran terhadap Perda yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku}}{\Sigma \text{ pelanggaran terhadap Perda}} \times 100\%$	%	85,35	90,00	92,25	94,56	96,92	99,34		
	3. Persentase Pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku}}{\Sigma \text{ pelanggaran K3}} \times 100\%$	%	14,65	10	7,75	5,44	3,08	0,66		
	4. Persentase penanganan daerah rawan bencana	$\frac{\Sigma \text{ daerah rawan bencana yang ditangani}}{\Sigma \text{ daerah rawan bencana di Kab. Sumenep}} \times 100\%$	%	70.75	73.75	78.75	85.75	90.75	70.75		
	5. Jumlah Korban Bencana Yang Tertangani	Jumlah korban bencana yang ditangani tahun berjalan	Orang	40	50	50	50	50	40		

**MISI 6 :**  
**MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

TUJUAN 6.1 :  
 MENINGKATKAN PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SENI, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
<b>Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep</b>	$P = \frac{A1-A2}{A2} \times 100\%$ Keterangan: • P : Persentase • A1 : Jml apresiasi seni dan budaya sumenep tahun berkenaan • A2 : Jml apresiasi seni dan budaya sumenep tahun sebelumnya	%	7	8	9	10	11	12

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TAHUN DASAR 2015	TARGET KINERJA TAHUN					CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	STRATEGI	PROGRAM SKPD
1. Menguatny/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	1. Jumlah Kesenian Lokal Yang Dikembangkan	Jumlah apresiasi seni dan budaya Sumenep tahun berkenaan	%	7	8	9	10	11	12		
2. Meningkatkan Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	1. Persentase Jumlah Pemuda Yang Dibina Sehingga Berprestasi	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda yang berprestasi}}{\Sigma \text{ Pemuda yang dibina}} \times 100$	%	10	10	10	10	10	10		
	2. Persentase Jumlah Prestasi Atlet Cabang Olahraga Berprestasi	$\frac{\Sigma \text{ Atlet cabang olahraga yang berprestasi}}{\Sigma \text{ atlet cabang olahraga}} \times 100$	%	15	15	20	20	20	25		

